



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada akhirnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2023 ini diselesaikan dengan tepat waktu, yang dituangkan dalam tiga buku yang terdiri dari : Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banggai Kepulauan tahun 2023 dan Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banggai Kepulauan tahun 2023.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini merupakan ringkasan dari Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun anggaran 2023 yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dapat dievaluasi, sekaligus mohon saran dan masukan guna perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan mendatang.

Akhir kata, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai Kepulauan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dan tidak lupa kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Banggai Kepulauan yang telah bersamasama dengan pemerintah daerah membangun Banggai Kepulauan dan mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salakan, Juni 2024 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IHSAN BASIR, SH.,LL.M

DAFTAR ISI

HALAN	AN JUDUL	i
KATA 1	ENGANTAR	ii
DAFTA	ISI	iii
DAFTA	1.1. Dasar Hukum 1 1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah 3 1.2.1 Visi 3 1.2.2 Misi 4 1.3. Data Umum Daerah 7 1.3.1 Data Geografis Wilayah 7 1.3.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk 11 1.3.3 Jumlah Pegawai 13 1.3.4 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan 14 1.3.5 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja 24	
DAFTA	TABEL	vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Dasar Hukum	1
	1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah	3
	1.2.1 Visi	3
	1.2.2 Misi	4
	1.3. Data Umum Daerah	7
	1.3.1 Data Geografis Wilayah	7
	1.3.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	11
	1.3.3 Jumlah Pegawai	13
	1.3.4 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan	14
	1.3.5 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja	24
BAB II	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENADAPATAN DAN	
	BELANJA DAERAH	34
	2.1 Perubahan Pengelolaan Pendapatan Daerah	35
	2.2 Perubahan Pengelolaan Belanja Daerah	42
	2.3 Perubahan Pengelolaan Pembiayaan Daerah	45
BAB III		
	MENJADI KEWENANGAN DAERAH	47
	3.1 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	48
	3.1.1 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar	48
	Bidang Urusan Pendidikan	48
	2. Bidang Urusan Kesehatan	55
	3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60
	4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman	63
	5. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta	
	Perlindungan Masyarakat	65
	6. Bidang Urusan Sosial	71
	3.1.2 Bidang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	75
	Bidang Urusan Tenaga Kerja	75
	2. Bidang Urusan Pangan	76
	3. Bidang Urusan Pertanahan	77

	4.	Bidang Urusan Lingkungan Hidup	78
	5.	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82
	6.	Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika ————————————————————————————————————	85
	7.	Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86
	8.	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	87
	9.	Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		Berencana	89
	10.	Bidang Urusan Perhubungan ———————————————————————————————————	93
	11.	Bidang Urusan Kebudayaan	96
	12.	Bidang Urusan Koperasi, Usaha kecil dan menengah	97
	13.	Bidang Urusan Penanaman Modal————————————————————————————————————	98
	14.	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga ———————————————————————————————————	99
	15.	Bidang Urusan Perpustakaan ——————————————————————————————————	101
	16.	Bidang Urusan Kearsipan ————————————————————————————————————	103
	3.1.3. Bi	dang Urusan Pilihan	104
		Bidang Urusan Transmigrasi	
		Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan	
	3.	Bidang Urusan Pariwisata	107
	4.	Bidang Urusan Pertanian	109
	5.	Bidang Urusan Perdagangan	114
	6.	Bidang Urusan Perundistrian	114
	3.1.4. Bi	dang Urusan Fungsi Penunjang	113
	1.	Bidang Urusan Sekretariat Daerah	113
	2.	Bidang Urusan Sekretariat DPRD	116
	3.	Bidang Urusan Perencanaan	120
	4.	Bidang Urusan Keuangan	124
	5.	Bidang Urusan Kepegawaian	129
	6.	Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan	130
	7.	Bidang Urusan Inspektorat	132
	8.	Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	133
	3.2 Kebijaka	an Strategis yang Ditetapkan	147
		Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2021	
	olo Illiadii I	2011 101101101101101101101101101101101101	110
BAB IV	CAPAIAN KI	NERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN	
		V	153
		Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan	
		ıgas Pembantuan yang Diterima	
BAB V	PENUTUP		158
	Lamenter	abuilta	
	Lampiran Ma	auiks	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Batas Adminisitrasi Kabupaten Banggai Kepulauan	7
Gambar 1.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010-2023	11
Gambar 1.5	Jumlah Penduduk menurut Kelompok umur dan Jenis kelamin di Kabupaten	
	Banggai Kepulauan, 2023	13
Gambar 1.6	Belanja Operasi Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2023	24
Gambar 1.7	Belanja Modal Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2023	24
Gambar 1.8	Belanja Tak Terduga Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2023	24
Gambar 1.9	Belanja Transfer Kab. Banggai Kepulauan 2023	24

DAFTAR TABEL

Jumlah Desa dan Kelurahan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2023
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2023
Kondisi Topografi rata-rata per Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan
(km) Tahun 2023
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020
Kondisi Suhu Udara Rata-rata per Bulan
-
Kondisi Kecepatan Angin Rata-rata per Bulan
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut
Kecamatandi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023
Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023
Target, Realisasi, dan Kontribusi Kelompok Pendapatan terhadap
Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023
Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian PAD Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2023
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2023
Target dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2023
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2023
Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Pendapatan Transfer Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023
Target dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2023
Target, Realisasi dan Kontribusi Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

Tabel 1.20	Target dan Realisasi Belanja Kab. Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023
Tabel 1.21	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Banggai Kepulauan
	Tahun Anggaran 2023
Tabel 1.22	Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Banggai kepulauan
	Tahun 2023
Tabel 1.23	Target dan Realisasi Belanja Barang dan JasaKabupaten Banggai Kepulauan
	Tahun 2023
Tabel 1.24	Target dan Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Banggai Kepulauan
	Tahun 2023
Tabel 1.25	Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
	Tahun 2023
Tabel 1.26	Target dan Realisasi Belanja Operasi per Perangkat Daerah Kabupaten
	Banggai Kepulauan Tahun 2023
Tabel 1.27	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
	Anggaran 2023
Tabel 1.28	Target dan Realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Banggai Kepulauan
	Tahun 2023
Tabel 1.29	Target dan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Banggai Kepulauan
	Tahun 2023
Tabel 2.1	Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
	Tahun Anggaran 2023
Tabel 2.2	Rincian Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
	Tahun Anggaran 2023
Tabel 2.3	Rincian Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
	Tahun 2023
Tabel 3.1	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Pelaksana
Tabel 3.2	Kebijakan strategis Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023
Tabel 3.3	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atas
	Lanoran Keterangan Pertanggungjawahan Akhir Tahun Anggaran 2022

Bab 1

Pendahuluan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai Kepulauan merupakan mandatory Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) penyelenggaraan yang memuat hasil urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagaimana diatur pada Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud berkenaan dengan capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan; kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya. Adapun hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan berupa capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari tingkat pemerintahan di atasnya serta capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.

LKPJ disampaikan oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, selanjutnya untuk dilakukan pembahasan oleh DPRD dan menerbitkan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi DPRD tersebut, ditindaklanjuti oleh bupati sebagai bahan penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati.

Penyusunan LKPJ merujuk pada kebijakan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 Bab I - 2 sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 yang diimplementasikan melalui Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun

2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun. Sedangkan kebijakan penganggaran keuangan daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Tahun Anggaran 2023, adapun kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah difokuskan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pencapaian atas hasil pembangunan melalui pelaksanaan Kebijakan sebagaimana dimaksud merupakan bentuk kolaborasi dan sinergisitas antara Bupati Banggai Kepulauan dengan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah dan juga seluruh elemen masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

1.1 DASAR HUKUM

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;;
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017–2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- 15. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026
- Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023
- 17. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Darerah Tahun 2023
- 18. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1.2.1 Visi

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT DAN BERKEADILAN SEJAHTERA"

terhadap Berdasarkan visi yang hendak dicapai kepala daerah, maka perumusan dan penjelasan visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagai berikut:

1. Maju: Gambaran dari tatanan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, mampu memanfaatkan peluang serta dapat menjawab tantangan yang ada dan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan.

- 2. **Mandiri**: Dimaknai sebagai suatu kondisi masyarakat yang mempunyai kapasitas untuk menggerakkan dan mengelola secara swadaya segala potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pembangunan daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan(*stakeholders*).
- 3. **Bermartabat**: Sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri sehingga berada pada tatanan kehidupan masyarakat yang mulia.
- 4. Berkeadilan: adalah suatu tatanan Mendistribusikan kegiatan dan hasil pembangunan secara merata, menghilangkan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan serta menghilangkan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan yang ada dalam masyarakat.
- 5. **Sejahtera** : Gambaran masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang terpenuhi kebutuhan dasar meliputi: Sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai.

1.2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2022 sebagai berikut:

- 1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif.
- 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan perekonomianmasyarakat.
- 3. Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya lestari.
- 4. Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat.
- 5. Mengembangkan sarana kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai.
- 6. Penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin, tunjangan hari tua dan santunan kematianbagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Banggai Kepulauan pada 5 (lima) tahun depan, yaitu;

Tujuan I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan Inovatif

Dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance & CleanGovernment);
- b. Meningkatnya profesionalisme pemerintah daerah dalam tugasnya melayani masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan;

- c. Terwujudnya pengembangan potensi dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja;
- d. Terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Tujuan II: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat

Dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas sumber daya menusia;
- b. Terwujudnya peningkatan sarana pendidikan yang berkualitas;
- c. Terwujudnya peningkatan mutu tenaga pendidik dan anak didik;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- e. Meningkatnya fasilitas kesehatan yang berkualitas;
- f. Meningkatnya pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau;
- g. Tersedianya Tenaga Kesehatan secara merata di seluruh wilayah.
- h. Terwujudnya penyediaan sarana pengembangan usaha;
- i. Terwujudnya dukungan permodalan dalam pengembangan usaha;
- j. Tersedianya lembaga pembiayaan mikro.

Tujuan III: Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya lestari

Dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya toleransi kehidupan beragama masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sosial budaya;
- c. Meningkatnya potensi budaya sebagai dasar untuk memperkuat karakter bangsa dan kesatuan NKRI;
- d. Terwujudnya kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilainilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta aset kesenian dan budaya lokal.

Tujuan IV: Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat

Dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Pengembangan tujuan wisata dan destinasi wisata;
- b. Meningkatnya akses infrastruktur dan pemasaran bidang pariwisata di tingkat lokal, regional dan nasional;
- c. Meningkatnya sistem manajemen dan pengelolaan wisata melibatkan peran aktif masyarakat dan kelompok masyarakat penggiat pariwisata;
- d. Meningkatnya investasi di bidang pariwisata dan kebudayaan lokal.

Tujuan V: Mengembangkan sarana kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai

Dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Pengembangan dan pemanfaatan teknologi modern dan tepat guna dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan;
- b. Meningkatnya kualitas hasil pertanian dan perikanan;
- Terwujudnya peningkatan dan penataan sistem pemasaran hasil pertanian dan perikanan melalui pengembangan koperasi dan kelompok petani dan nelayan;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pertanian dan perikanan;
- e. Meningkatnya sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian petani dan nelayan;
- f. Meningkatnya sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian buruh tani dan buruh nelayan.

Tujuan VI : Penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin, tunjangan hari tua dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni melalui program perbaikan rumahdan pengentasan lingkungan permukiman kumuh;
- b. Meningkatnya jumlah rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar lingkunganpemukiman;
- d. Terwujudnya pemberian tunjangan hari tua dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Prioritas Pembangunan Daerah

Tidak dapat disangkal bahwa setiap daerah mempunyai keterbatasan tertentu, baik dari segi dana, tenaga kerja, sumberdaya alam, dan lain sebagainya. Karena itu dalam rangka mencapai sasaran pembangunan secara optimal, dalam setiap rencana pembangunan biasanya ditetapkan beberapa prioritas tertentu. Dengan demikian prioritas pembangunan pada dasarnya diperlukan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan dana dan sumber daya yang terbatas. Tetapi ini tidak berarti bahwa aspek lain diluar yang ditetapkan sebagai prioritas menjadi tidak penting sama sekali. Prioritas pembangunan pada dasarnya menunjukkan pusat perhatian dan tekanan utama yang harus dilakukan untuk dapat mencapai sasaran yang digambarkan visi pembangunan. Sedang aspek dan kegiatan pembangunan lainnya merupakan faktor penunjang yang dapat dilakukan kegiatannya sebagaimana biasa bilamana sumber daya tersedia mencukupi.

Melalui Tema pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 yaitu "Meningkatkan Daya Saing Kabupaten Banggai Kepulauan Melalui Penyediaan Infrastruktur Daerah Yang Memadai". Tema tersebut masih relevan dengan kondisi tahun 2023. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, melalui penekanan fokus pembangunan pada prioritas pembangunan daerah dan program prioritas yang telah ditetapkan. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (tiga) arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 yang pada perubahan APBD tidak mengalami perubahan yaitu:

- 1. Peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (public service quality);
- 2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan; dan
- 3. Peningkatan infrastruktur daerah dalam rangka peningkatan daya saing.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2023, dirumuskan 4 (empat) agenda prioritas pembangunan daerah di tahun 2023 yang pada perubahan APBD tidak mengalami perubahan yaitu:

- 1. Tersedianya sarana dan prasarana Pelabuhan Salakan dan penataan kawasan ibukota;
- 2. Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta optimalisasi percepatan penurunan stunting; dan
- 4. Optimalisasi pelayanan publik dan sektor pendukung ekonomi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

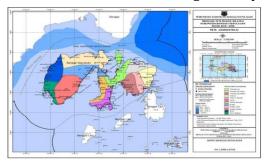
1.3 DATA UMUM DAERAH

1.3.1 Data Geografis Wilayah

A. Letak dan Luas Wilayah Administrasi

Kabupaten Banggai Kepulauan beribukota di Salakan, secara astronomis terletak antara 1° 06′ 30″ - 1° 35′ 58″ Lintang Selatan dan 122° 37′ 6,3″ - 123° 40′ 1,9″ Bujur Timur. Secara administratif batas wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Laut
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Peling
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banggai



Gambar 1.1 Batas Adminsitrasi Kabupaten Banggai Kepulauan

Kabupaten Banggai Kepulauan secara administrasi memiliki 12 kecamatan yang terbagi menjadi 141 desa, dan 3 kelurahan. Kecamatan Bulagi Selatan memiliki jumlah desa terbanyak yakni 20 desa dan Kecamatan Tinangkung Utara merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu sebanyak 6 desa. Jumlah desa dan kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, diuraikan secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Desa dan Kelurahan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

	ur madipaton Bunggar nopuladan Tunun 2020							
No	Kecamatan	Desa	Kelurahan					
1	Totikum	11	-					
2	Totikum Selatan	8	-					
3	Tinangkung	10	1					
4	Tinangkung Selatan	9	-					
5	Tinangkung Utara	6	-					
6	Liang	16	-					
7	Peling Tengah	11	-					
8	Bulagi	15	1					
9	Bulagi Selatan	20	-					
10	Bulagi Utara	11	1					
11	Buko	13	-					
12	Buko Selatan	11	-					
C 1	Banggai Kepulauan 141 3							

Sumber : Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2024

B. Luas Wilayah

Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri atas daratan dengan luas 2.488,79 km² dan lautan dengan luas 6.671,32 km². Kecamatan Bulagi Selatan merupakan kecamatan dengan daratan terluas di banding kecamatan lain. Di lain pihak, Kecamatan Totikum merupakan kecamatan dengan wilayah laut yang paling luas. Adapun ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan terletak di Kecamatan Tinangkung yaitu kota Salakan. Ketinggian daratan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dari permukaan laut yaitu sebesar 98,61% berada kurang dari 500 Mdpl dan 1,39% berada pada ketinggian lebih dari 500 Mdpl. Berikut ini tabel yang menunjukkan luas wilayah yang terdiri atas luas wilayah darat dan luas wilayah laut menurut kecamatan.

Tabel 1.2
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

No	Kecamatan	luas Wilayah (km²)			
140	Kecamatan	Darat	%	Laut	%
1	Buko	184,84	7,43	1.082.85	16,23
2	Buko Selatan	187,32	7,53	663,09	9,94
3	Bulagi	275,66	11,08	446,96	6,70
4	Liang	176,19	7,08	251,23	3,77
5	Peling Tengah	140	5,63	195,38	2,93
6	Tinangkung	312,6	12,56	507,78	7,61
7	Tinangkung Selatan	187,89	7,55	403,49	6,05
8	Tinangkung Utara	136,65	5,49	303,58	4,55

9	Totikum	155,45	6,25	351,45	5,27
10	Totikum Selatan	95,19	3,82	350.21	5,25
11	Bulagi Selatan	319	12,82	1050,60	15,75
12	Bulagi Utara	318	12,78	1064,70	15,96
Banggai Kepulauan		2.488,79	100	6.671,32	100

Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2024

C. Topografi

Berdasarkan tinjauan bentuk muka bumi yang ditunjukan oleh Topografi atau morfologi,struktur, dan proses pembetukan, wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dibagi menjadi 4 satuan utama, yaitu : pegunungan/perbukitan struktural, pegunungan/perbukitan karst, perbukitan intrusif, dan dataran rendah.

Pegunungan stuktural terdapat di bagian barat Pulau Peling, memanjang dengan pola selatan – utara dengan ketinggian lebih dari 700 Mdpl, lereng curam hingga sangat curam dengan kemiringan ≥40%. Morfologi ini terdapat di sekitaran perbatasan Kecamatan Buko, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Bulagi. Perbukitan struktural terdapat hampir diseluruh pulau, dengan ketinggian mulai ±200 hingga ±700 meter di atas permukaan laut, dengan lereng relatif miring (15-30%) hingga berbukit curam (30-40%), yang terdapat di Pulau Peling. Puncak−puncak bukit terdapat di Bukit Babasal di Pulau Peling bagian timur.

Perbukitan dan pegunungan karst menempati sebagian besar Pulau Peling, dan secara lokal-lokal pada pulau-pulau lainnya. Ciri khas morfologi ini adalah pola kerucut dan lembah karst, dolin, goa, ponor, dan sungai bawah tanah. Puncak terdapat di Gunung Tinakong (558 meter) dan Bukit Blombong di Pulau Peling. Daratan rendah terbentang di sepanjang wilayah pesisir dan lembah-lembah antar perbukitan atau pegunungan, yang sebagian besar dijumpai di bagian utara Pulau Peling, dan sebagian kecil di Selatan Pulau Peling. Rincian kondisi tinggi rata- rata dari permukaan laut di tiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3

Kondisi Topografi rata-rata per Kecamatan
di Kabupaten Banggai Kepulauan (km) Tahun 2023

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi DPL (m)
1	Totikum	Sambiut	10
2	Totikum Selatan	Kalumbatan	2
3	Tinangkung	Salakan	3
4	Tinangkung Selatan	Mansamat A	3
5	Tinangkung Utara	Batulombu	1
6	Liang	Liang	2
7	Peling Tengah	Patukuki	2
8	Bulagi	Bulagi 1	3
9	Bulagi Selatan	Lolantang	5
10	Bulagi Utara	Sambulangan	5
11	Buko	Tataba	2
12	Buko Selatan	Lumbi-Lumbia	3

Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2024

D. Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Banggai Kepulauan dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim hujan ini dapat digolongkan menjadi tiga jenis berdasarkan frekuensi curah hujan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April sekitar 180,80 mm, sedang pada bulan Maret sekitar 89,40 mm, dan rendah pada bulan Oktober 2,80 mm, Selanjutnya untuk penyinaran matahari terbanyak pada bulan Desember yaitu 9,27% dan terendah September sebesar 2,93%.

Tabel 1.4 Kondisi Curah Hujan Rata-rata Per Bulan

Bulan	Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)	
Januari	65,90	20	6,46	
Februari	76,60	14	5,60	
Maret	89,40	18	5,03	
April	180,80	23	4,14	
Mei	77,30	22	5,22	
Juni	78,00	14	5,77	
Juli	79,20	22	4,53	
Agustus	66,50	21	4,09	
September	25,40	10	2,93	
Oktober	2,80	3	4,21	
November	23,60	10	6,09	
Desember	46,30	16	9,27	

Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2024

Sepanjang tahun 2023, suhu udara terendah yaitu 22,10°C terjadi pada bulan September dan tertinggi sebesar 34,60°C pada bulan Desember. Untuk kelembaban udara di Kabupaten Banggai Kepulauan selama tahun 2023 tertinggi terjadi pada Bulan Mei sampai Bulan Agustus sebesar 98,00% dan terendah 50,00% pada Bulan Oktober.

Tabel 1.5 Kondisi Suhu Udara Rata-rata per Bulan

Bulan	Suhu (°C)			Kelembapan (%)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	23,80	28,20	33,30	58,00	79,40	97,00
Februari	24,30	28,40	33,40	53,00	77,90	95,00
Maret	24,00	28,20	32,90	61,00	79,40	95,00
April	23,60	28,10	33,40	62,00	80,20	97,00
Mei	23,30	27,70	32,60	60,00	80,10	98,00
Juni	23,80	27,40	31,70	61,00	79,70	98,00
Juli	22,70	27,00	31,50	56,00	78,80	98,00
Agustus	22,60	26,60	31,90	56,00	75,40	98,00
September	22,10	27,00	31,80	53,00	72,70	95,00
Oktober	22,70	28,40	32,10	50,00	72,10	96,00
November	25,00	29,10	33,60	60,00	76,50	96,00
Desember	23,50	29,10	34,60	55,00	78,50	95,00

Sumber : Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2024

Sementara untuk kecepatan angin di Kabupaten Banggai Kepulauan tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan Oktober sebesar 19,00 m/detik sedangkan terendah terjadi sepanjang bulan Januari sampai Desember sebesar 0,00 m/detik.

Tabel 1.6 Kondisi Kecepatan Angin Rata-rata per Bulan

Kondisi Kecepatan Angin Rata- Bulan	Kecepatan Angin (m/detik)			
Dulan	Minimum	Rata-rata	Maksimum	
Januari	0,00	4,10	14,00	
Februari	0,00	4,10	17,00	
Maret	0,00	4,20	15,00	
April	0,00	4,60	16,00	
Mei	0,00	5,70	15,00	
Juni	0,00	6,00	17,00	
Juli	0,00	7,20	18,00	
Agustus	0,00	8,40	19,00	
September	0,00	8,80	17,00	
Oktober	0,00	7,60	19,00	
November	0,00	4,40	13,00	
Desember	0,00	4,30	12,00	

Sumber : Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2024

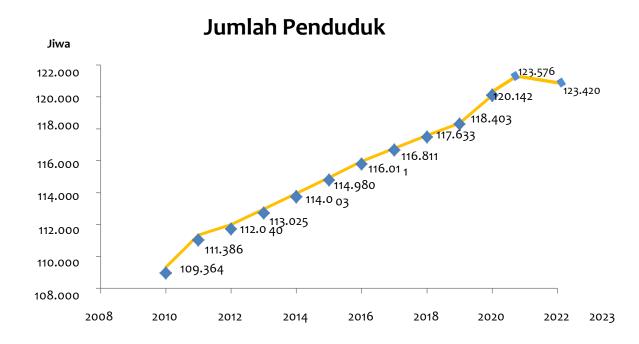
1.3.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan, karena permasalahan kependudukan tidak hanya menyangkut kelahiran, kematian dan migrasi, tetapi juga menyangkut masalah sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan yang sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu data kependudukan yang akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan dalam upaya penyelesaian masalah-masalah tersebut.

Jumlah penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami Penurunan sebanyak 156 jiwa dari jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 123.576 jiwa menjadi 123.420 jiwa pada tahun 2023 yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan. Tingkat kepadatan penduduk secara umum di Kabupaten Banggai Kepulauan tidaklah merata, dan wilayah yang terpadat adalah di Kecamatan Totikum selatan (90,61 jiwa per km persegi). Kawasan yang paling jarang penduduknya ada di wilayah Kecamatan Bulagi Selatan (30,40 jiwa per km persegi).

Laju pertumbuhan penduduk selama periode tahun 2022-2023 yaitu -2,90%. Sedangkan laju pertumbuhan selama periode tahun 2020-2024 sebesar 0,98%. Data

jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel 1.7



Sumber : Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2024

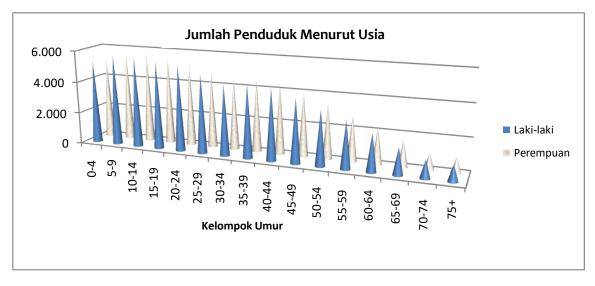
Gambar 1.4 : Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010-2023

Tabel 1.7

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

B.I.	W	Jumlah P	Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan	
No	Kecamatan	2022	2023	2022-2023 (%)	Penduduk 2020-2024	
1	Totikum	10.692	10.638	-0,51	0,58	
2	Totikum Selatan	8.671	8.625	-0,53	0,54	
3	Tinangkung	18.266	18.534	1,47	2,59	
4	Tinangkung Selatan	8.226	8.220	-0,07	1,01	
5	Tinangkung Utara	8.990	9.002	0,13	1,22	
6	Liang	9.764	9.736	-0,29	0,80	
7	Peling Tengah	10.735	10.741	0,06	1,14	
8	Bulagi	9.581	9.478	-1,08	-0,04	
9	Bulagi Selatan	9.803	9.698	-1,07	0,00	
10	Bulagi Utara	9.883	9.854	-0,29	0,79	
11	Buko	10.077	10.022	-0,55	0,53	
12	Buko Selatan	8.888	8.872	-0,18	0,90	
	nggai Kepulauan	123.576	123.420	-2,90	0,98	

Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2024



Sumber : Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 1.5 Jumlah Penduduk menurut Kelompok umur dan Jenis kelamin di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

Berdasarkan gambar 1.5 diatas data yang tergambar menunjukkan bahwa penduduk dari kelompok umur 0-14 tahun berjumlah 32.868 jiwa atau mencapai presentase 26,63%. ini berarti rasio ketergantungan (*defendency ratio*) penduduk mencapai 49,79%. kondisi ini menyumbang persoalan kontraproduktif, apalagi kondisi rata-rata tingkat pendidikan penduduk masih rendah. Keadaan ini tidak menguntungkan untuk pembangunan dan akan menghambat perekonomian masyarakat.

1.3.3 Jumlah Pegawai

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 3.045 orang yang terdiri dari PNS Laki-laki berjumlah 1473 orang dan Perempuan berjumlah 1572 orang. Kinerja Pemerintah sangat tergantung pada kualitas sumberdaya manusia pegawai yang menjadi pendukung dan pelaksana dari kebijakan dan program yang dibuat oleh Kepala Daerah. Berikut disajikan jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin pada tabel berikut:

Tabel 1.8

Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis KelaminKabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2023

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD/Sederajad	1	0	1
SMP/Sederajad	5	1	6
SMA/Sederajad	322	144	466
DI	0	3	3
DII	55	65	120
DIII	96	286	382
DIV/S1	900	1.012	1912
S2	94	65	159
S3	2	0	2
Jumlah	1.473	1.572	3.045

Sumber : Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, terlihat bahwa sebagian besar ASN di Kabupaten Banggai Kepulauan sudah memiliki pendidikan tingkat sarjana atau sekitar 68,07% dari total ASN Kabupaten Banggai Kepulauan dibandingkan denga ASN dengan tingkat pendidikan lainnya. Hal ini memberikan indikasi yang positif bagi kemajuan Kabupaten Banggai Kepulauan di masa yang akan datang. Meskipun tingkat pendidikan formal cukup menentukan kapasitas kerja aparat, namun kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah banyak ditentukan oleh pengalaman kerja dan tambahan pendidikan Diklat penjenjangan. Seperti diketahu bahwa jumlah ASN yang telah mengikuti diklat penjenjangan memang masih terbatas jumlahnya. Hal tersebut bagi Pemerintah Daerah membutuhkan perhatian ekstra agar dapat ditingkatkan frekuensi dan kualitasnya.

Tabel 1.9

Jumlah PNS Menurut Jabatan dan Jenis KelaminKabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pimpinan Tinggi Pratama	28	7	35
Administrator	106	52	158
Pengawas	132	113	245
Fungsional Guru	529	676	1.205
Fungsional Medis	79	317	396
Fungsional Teknis	183	164	347
Fungsional Umum	416	243	659
Jumlah	1.473	1.572	3.045

Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2024

1.3.4 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Sumber Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 secara keseluruhan sebesar Rp.827.853.187.730,31,- atau 96,26% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.860.045.753.599,- Rincian anggaran, realisasi, dan kontribusi masing-masing kelompok pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.9

Target, Realisasi, dan Kontribusi Kelompok Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi terhadap Pendapatan (%)
Pendapatan Asli Daerah(PAD)	41.060.725.094	41.330.438.640,31	100,66	4,99
Pendapatan Transfer	815.007.805.657	783.226.137.466	96,10	94,61
Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.977.222.848	3.296.611.624	82,89	0,40
Jumlah Pendapatan Daerah	860.045.753.599	827.853.187.730,31	96,26	100,00

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024 (Sesudah audit BPK RI)

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tingkat kemandirian daerah salah satunya bisa diukur dengan tingkat kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dan transfer pusat ke daerah, dengan demikian peran pendapatan asli daerah sangat vital dalam pembangunan daerah. PAD adalah pendapatan pendapatan yang berasal dari: (1)Pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; serta (4) lain-lain pendapatan asli daerahyang sah.

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.41.060.725.094,- dan realisasinya sebesar Rp.41.330.438.640,31 atau 100,66% dari target yang telah ditetapkan dengan sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah menjadi penyumbang utama yaitu sebesar 40,09% terhadap PAD. Target, realisasi dan kontribusi masing-masing rincian PAD terhadap total PAD Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.10

Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian PAD Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi terhadap PAD (%)
Pajak Daerah	6.348.922.837	6.627.541.142,85	104,39	16,04
Retribusi Daerah	13.816.841.258	13.903.900.977	100,63	33,64
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	4.231.364.872	4.231.364.872	100,00	10,24
Lain- lain PendapatanAsli Daerah yang Sah	16.663.596.127	16.567.631.648,46	99,42	40,09
Jumlah PAD	41.060.725.094,00	41.330.438.640,31	100,66	100,00

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan 2024 ((Sesudah audit BPK RI))

1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ditargetkan sebesar Rp.6.348.922.837,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.627.541.142,85,- atau sebesar 104,39% dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1.11
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
Anggaran 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(kurang)
Pajak Hotel	123.470.492	128.451.700,10	104,03	4.981.208
Pajak Restoran	930.207.511	1.154.422.502	124,10	224.214.991
Pajak Hiburan	1.500.000	1.875.000,00	125,00	375.000
Pajak Reklame	40.000.000	36.584.483	91,46	(3.415.517)
Pajak Penerangan Jalan	2.800.000.000	2.793.562.564	99,77	(6.437.436)
Pajak Air Tanah	1.000.000	1.084.000,00	108,40	84.000
Pajak Mineral Bukan Logam danBatuan	1.102.744.834	1.038.461.088,75	94,17	(64.283.745)
PBB sektor perkotaan danPerdesaan	1.300.000.000	1.409.160.895	108,40	109.160.895
Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan	50.000.000	63.938.910	127,88	13.938.910
Jumlah Pajak Daerah	6.348.922.837	6.627.541.142,85	104,39	278.618.306

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terjadi kendala penagihan pajak karena sebagian masyarakat beralasan masih memprioritaskan kebutuhan lain daripada untuk membayar pajak. Sementara pada pendapatan pajak daerah lainnya sudah melampaui target yang ditetapkan.

2. Hasil Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah yang dapat dipungut serta telah disetorkan ke kas daerah selama tahun 2023 sebesar Rp.13.903.900.977,- atau 95,79%dari target yang telah ditetapkan pada APBD perubahan sebesar Rp.13.816.841.258,- dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel. 1.12
Target dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(kurang)
Retribusi Jasa Umum	13.228.841.258	13.169.711.606	99,55	(59.129.652)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.376.022.939	12.439.827.606	100,52	63.804.667
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	385.000.000	330.069.000	85,73	(54.931.000)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	160.971.071	138.315.000	85,93	(22.656.071)
Retribusi Pelayanan Pasar	286.847.248	261.500.000	91,16	(25.347.248)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	20.000.000	0,00	0,00	(20.000.000)
Retribusi Jasa Usaha	508.000.000	657.873.371	129,50	149.873.371
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	260.000.000	437.011.271	168,08	177.011.271
Retribusi Tempat Pelelangan	100.000.000	51.811.000	51,81	(48.189.000)
Retribusi Rumah Potong Hewan	15.000.000	21.957.000	146,38	6.957.000

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	125.000.000	137.514.600,00	110,01	12.514.600
Retribusi Penyeberangan di Air	8.000.000	9.579.500,00	119,74	1.579.500
Retribusi Perizinan Tertentu	80.000.000	76.316.000	95,40	(3.684.000)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	60.000.000	59.316.000	98,86	(684.000)
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	15.000.000	12.000.000	80,00	(3.000.000)
Retribusi Izin Usaha Perikanan	5.000.000	5.000.000	100,00	0
Hasil Retribusi Daerah	13.816.841.258	13.903.900.977	100,63	87.059.719

Berdasarkan tabel diatas retribusi daerah yang tidak mencapai target yaitu pada Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp.13.228.841.258,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.169.711.606,- atau setara 99,55% serta Retribusi Perizinan Tertentu dengan target sebesar Rp.80.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.76.316.000- atau setara 95,40%. Sementara yang mencapai target adalah Retribusi Jasa Usaha dengan realisasi sebesar Rp.657.873.371,- atau 129,50% dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp.508.000.000,-

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk: (1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, (2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan (3) memperoleh laba dan/atau keuntungan. Pendirian BUMD juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, serta menjadi penopang pelaku ekonomi daerah. Target dan realisais hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.13

Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkanKabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2023

	idddii Tullull 202		
Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.231.364.872	4.231.364.872	100
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal padaBUMD (Lembaga Keuangan)	4.206.364.872	4.206.364.872	100
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	25.000.000	25.000.000	100
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.231.364.872		100

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024 (Sesudah audit BPK RI)

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada TA 2023, Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.16.663.596.127, dengan realisasi sebesar Rp.5.797.089.237,70 atau setara 34,79%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 1.14

Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang SahKabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

Uraian	Target	Realisasi	%	Tambah/(kurang)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	(Rp) 100.000.000	(Rp) 337.200.800	337,20	237.200.800
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0	294.703.600,00		294.703.600
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0	6.812.000,00		6.812.000
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	52.000.000	0,00	0,00	-52.000.000
Hasil Penjualan Aset Lainnya	48.000.000	35.685.200,00	74,34	-12.314.800
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000	24.986.000	24,99	-75.014.000
Hasil Sewa BMD	70.000.000	16.598.000	23,71	-53.402.000
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	30.000.000	8.388.000	27,96	-21.612.000
Jasa Giro	1.024.500.000	1.383.372.931,76	135,03	358.872.932
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000	1.265.304.608	126,53	265.304.608
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	10.000.000	39.582.422	907,09	29.582.422
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	2.500.000	5.178.663	395,55	2.678.663
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	12.000.000	16.900.860	145,59	4.900.860
Pendapatan Bunga	500.000	105.999.434	21199,89	105.499.434
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000	105.999.434	21199,89	105.499.434
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000	1.366.927.685,39	21,49	(133.072.315)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.500.000.000	1.366.927.685,39	21,49	(133.072.315)
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	80.000.000	820.598.213,68	91,13	740.598.214
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	80.000.000	820.598.213,68	91,13	740.598.214
Pendapatan Denda Pajak Daerah	100.000	17.406.452,30	17406,45	17.306.452
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	100.000	0,00	0,00	(100.000)
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	62.533	62.533	62.533

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tambah/(kurang)
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0	17.343.919,30	7.343.919,30	17.343.919,30
Pendapatan dari Pengembalian	1.739.965.056	1.873.261.001,33	107,66	133.295.945
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	70.000.000	121.858.815,00	174,08	51.858.815
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	2.600.000	0,00	0,00	(2.600.000)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	41.143.537	40.000.000,00	97,22	(1.143.537)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	127.638.289	128.781.826,73	100,90	1.143.538
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	1.498.583.230	1.498.583.230,60	100,00	0,60
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0	84.037.129,00	0,00	
Pendapatan BLUD	12.118.531.071	10.637.879.130,00	87,78	(1.480.651.941)
Pendapatan BLUD	12.118.531.071	10.637.879.130,00	87,78	(1.480.651.941)
Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah	16.663.596.127	16.567.631.648,46	99,42	(95.964.478,54)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penerimaan terbesar adalah pada Pendapatan dari Pengembalian yakni sebesar Rp. 1.873.261.001,33 dari target yang ditetapkan Rp.1.739.965.056,- kemudian juga Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp. 1.366.927.685,39,- dari target yang ditetapkan dari pagu setelah perubahan yakni sebesar Rp. 1.500.000.000,- serta Jasa Giro sebesar Rp.1.383.372.931,76 melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.024.500.000.

b. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.815.007.805.657,- dengan realisasi capaian sebesar 96,10% atau sebesar Rp.783.226.137.466,- dari target yang telah ditetapkan, yang terdiri dari Pendapatan Transfer Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Antar Daerah. Target, realisasidan kontribusi masing- masing rincian di sajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.15
Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Pendapatan Transfer Kabupaten Banggai Kepulauan

	Tahun Anggaran 2023						
Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi terhadap Dana Transfer Pusat (%)			
Dana Perimbangan	671.005.167.569	635.301.295.771,00	94,68	84,21			
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	72.172.064.569	44.156.169.532,00	61,18	5,59			
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	457.166.599.000	459.375.692.731,00	100,48	61,92			
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	57.589.342.000	55.071.492.302,00	95,63	7,42			
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	84.077.162.000	76.697.941.206,00	91,22	8,92			
Dana Insentif Daerah (DID)	5.734.069.000	5.734.069.000,00	100,00	0,77			
DID	5.734.069.000	5.734.069.000,00	100,00	0,77			
Dana Desa	107.511.753.000	111.415.896.000,00	103,63	15,02			
Dana Desa	107.511.753.000	111.415.896.000,00	103,63	14,38			
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	784.250.989.569	752.451.260.771	95,95	100			

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024 (Sesudah audit BPK RI)

Rincian penerimaan diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2023, realisasi penerimaan terbesar yaitu pada Dana Alokasi Umum yaitu sebesar Rp.459.375.692.731,- atau 61,92% dari total Pendapatan Transfer.

Berikut rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2023

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp.44.156.169.532,- atau 61,18% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.72.172.064.569,- berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Berikut rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH):

Tabel 1.16
Target dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tambah/(kurang)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.824.580.000	3.422.353.048	121,16	597.773.048
DBH PPh Pasal 21	4.833.869.081	3.972.883.793	82,19	(860.985.288)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	141.934.646	76.143.642	53,65	(65.791.004)
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	17.786.302	18.855.557	106,01	1.069.255
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	2.190.572.000	2.415.893.676	110,29	225.321.676
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	9.348.191.975	8.663.990.292	92,68	(684.201.683)
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	48.828.002.396	21.399.889.243	43,83	(27.428.113.153)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	97.927.169	85.206.070	87,01	(12.721.099)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.889.201.000	4.100.954.211	105,44	211.753.211
Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	72.172.064.569	44.156.169.532	61,18	26.191.751.800

2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp.459.375.692.731,- atau 100,48% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.457.166.599.000,-

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tambah/ (kurang)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	457.166.599.000	459.375.692.731	100,48	2.209.093.731
Dana Transfer Umum- DAU	457.166.599.000	459.375.692.731	100,48	2.209.093.731

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024 (Sesudah audit BPK RI)

3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp.55.071.492.302,- atau 95,63% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.57.589.342.000,-. Untuk rincian realisasi capaian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1.17

Target dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023

Kabupaten ba	Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023						
Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tambah/ (Kurang)			
DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD	2.016.759.000	2.015.618.169	99,94	(1.140.831)			
DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD	8.644.815.000	8.573.940.918	99,18	(70.874.082)			
DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP	9.776.429.000	9.019.937.545	92,26	(756.491.455)			
DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	0			
DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0			
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	0			
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	0			
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	224.654.000	199.900.000,00	88,98	(24.754.000)			
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	0			
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler- Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	0			
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah- Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	0			
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.350.000.000	2.225.538.941	94,70	(124.461.059)			
DAK Fisik-Bidang Jalan- Reguler-Jalan	29.573.775.000	0,00	0,00	29.573.775.000)			
DAK Fisik-Bidang Jalan- Penugasan-Jalan	0	28.395.681.000	0,00	28.395.681.000			
DAK Fisik-Bidang Air Minum- Reguler	0	0,00	0,00	0			
DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Reguler	0	0,00	0,00				
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0	0,00	0,00				
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	5.002.910.000	4.640.875.729,00	92,76				
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	57.589.342.000	55.071.492.302	95,63	(2.517.849.698)			

4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi sebesar Rp.76.697.941.206,- atau 91,22% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.84.077.162.000,-. Untuk rincian realisasi capaian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.18

Target dan Realisasi Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tambah/ (Kurang)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	19.849.740.000	19.803.561.613	96,53	(46.178.387)
DAK Non Fisik-TPG PNSD	32.610.991.000	30.479.136.637	93,46	(2.131.854.363)
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.210.750.000	1.705.879.919	77,16	(504.870.081)
DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.087.632.000	1.087.632.000	100	0
DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.822.400.000	2.830.791.000	99,77	(8.391.000)
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.043.820.000	2.007.863.760	93,46	(35.956.240)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	18.493.588.000	13.980.384.277	77,16	(4.513.203.723)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.965.241.000	3.373.802.000	100	(591.439.000)
DAK Non Fisik-PK2UKM	0	0,00	100,30	0
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	480.000.000	477.100.000	98,24	(2.900.000)
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	438.800.000	75,60	438.800.000
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	513.000.000	512.990.000	85,08	(10.000)
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik	84.077.162.000	76.697.941.206	91,22	(7.379.220.794)

- 5. Dana Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi sebesar Rp. 5.734.069.000,- atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 5.734.069.000,-
- 6. Dana Desa terealisasi sebesar Rp.111.415.896.000,- atau 103,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.107.511.753.000,-

c. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari pendapatan hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2023 alokasi anggaran untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ditargetkan sebesar Rp.3.977.222.848,- dengan realisasi sebesar Rp.3.296.611.624,- atau 82,89%.

Tabel 1.19
Target, Realisasi dan Kontribusi Lain- lain Pendapatan Daerah yang SahKabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi terhadap Lain-lainpendapatan daerah yang sah(%)
Lain-lain Pendapatan	1.091.440.000	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	2.885.782.848	3.296.611.624	114,24	114,24
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah	3.977.222.848	3.296.611.624	81,41	112,24

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024 (Sesudah audit BPK RI)



Belanja Daerah diformulasikan untuk membiayai 4 (empat) jenis belanja daerah yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.936.937.268.812,- dengan realisasi sebesar Rp.849.032.765.461,21,- atau 90,62% dari target yang telah ditetapkan.



Gambar 1.6 Belanja Operasi Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2023



Gambar 1.7 Belanja Modal Kab, Banggai Kepulauan Tahun 2023



Gambar 1.8 Belanja Tak Terduga Kab, Banggai Kepulauan Tahun 2023



Gambar 1.9 Belanja Transfer Kab. Banggai Kepulauan 2023

Tabel target dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.20
Target dan Realisasi Belanja Kab. Banggai KepulauanTahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi	624.319.448.894	547.076.049.093,21	87,63
Belanja Modal	151.052.856.292	137.246.465.854	90,86
Belanja Tak Terduga	1.191.363.962	1.105.880.000	92,82
Belanja Transfer	160.373.599.664	163.604.370.514	102,01
Jumlah Belanja Daerah	936.937.268.812	849.032.765.461,21	90,62

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024 (Sesudah audit BPK RI)

Secara terperinci, anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. REALISASI BELANJA OPERASI

Pada Belanja Operasi tahun anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp.624.319.448.894 sedangkan realisasi Belanja Operasi pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2023 sebesar Rp.547.076.049.093,21 atau 87,63% dari target yang telah ditetapkan. Berikut adalah rincian target dan realisasi Belanja Operasi pada APBD Tahun anggaran 2023 yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
Belanja Pegawai	373.972.907.406	332.586.846.754	88,93
Belanja Barang dan Jasa	213.350.782.625	191.836.809.175,21	89,92
Belanja Hibah	33.016.621.863	18.792.120.164	56,92
Belanja Bantuan Sosial	3.979.137.000	3.860.273.000	97,01
Jumlah Belanja Operasi	624.319.448.894	547.076.049.093,21	87,63

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024 (Sesudah audit BPK RI)

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.373.972.907.406,- yang terdiri dari honorarium PNS dan Non PNS, Uang Lembur, honorarium tim pengawasan dan belanja pegawai dana bos dengan realisasi anggaran sebesar Rp.332.586.846.754,- atau 88,93%. Rincian target dan realisasi belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

 ${\it Tabel~1.22} \\ {\it Target~dan~Realisasi~Belanja~Pegawai~Kabupaten~Banggai~kepulauan} \\$ **Tahun 2023**

	Uraian	Target	Realisasi	%	Tambah/ (kurang)
Be	lanja Gaji dan Tunjangan ASN	258.545.680.156	224.551.214.187	86,85	(33.994.465.969)
-	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.356.087.124	14.998.850.131	86,42	(2.357.236.993)
-	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.901.750.000	6.620.195.000	95,92	(281.555.000)
-	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.085.674.000	10.804.575.000	76,71	(3.281.099.000)
-	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.014.830.000	1.912.656.782	94,93	(102.173.218)
-	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.558.822.180	9.858.607.020	85,29	(1.700.215.160)
-	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	492.262.452	473.243.088	96,14	(19.019.364)
-	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.142.000	2.485.227	17,57	(11.656.773)
-	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.750.934.574	10.432.726.096	97,04	(318.208.478)
-	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	362.000.000	346.697.820,00	95,77	(15.302.180)
-	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.055.000.000	1.040.090.486	98,59	(14.909.514)
Be	lanja Tambahan Penghasilan ASN	41.474.600.785	40.410.424.301	97,43	(1.064.176.484)
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	40.814.600.785	39.750.424.301	97,39	(1.064.176.484)
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	660.000.000	660.000.000	100	0
	mbahan Penghasilan berdasarkan	56.984.430.361	51.167.219.143	89,79	(5.817.211.218)
Pe	rtimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Insentif bagi ASN atas	25.5			
-	Pemungutan Pajak Daerah Belanja bagi ASN atas Insentif	276.246.143	236.426.125	85,59	(39.820.018)
-	Pemungutan Retribusi Daerah	405.671.000	271.697.191	66,97	(133.973.809)
-	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	32.921.696.663	30.122.903.535	91,50	(2.798.793.128)
-	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.103.233.800	1.079.266.800	97,83	(23.967.000)
-	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.435.750.000	1.597.500.000	65,59	(838.250.000)
-	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	12.663.142.755	10.755.975.492	84,94	(3.935.596.823)
-	Belanja Honorarium	6.472.380.000	6.422.940.000	99,24	(49.440.000)
-	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	706.310.000	680.510.000,00	96,35	(25.800.000)
Be	lanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.371.100.804	9.068.011.173	96,77	(303.089.631)
-	Belanja Uang Representasi DPRD	560.445.000	555.240.000	99,07	(5.205.000)
-	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	55.983.600	49.944.300	89,21	(6.039.300)
-	Belanja Tunjangan Beras DPRD	63.948.000	58.660.200	91,73	(5.287.800)
-	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000	47.659.500	84,87	(8.494.500)
-	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Belanja Tunjangan Alat	814.233.000	805.098.000	98,88	(9.135.000)
-	Kelengkapan DPRD Belanja Tunjangan Komunikasi	89.706.000	89.066.250,00	99,29	(639.750)
-	Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.890.000.000 472.500.000	1.871.100.000 472.500.000	99	(18.900.000)
\vdash	Belanja Pembebanan PPh kepada				
-	Pimpinan dan Anggota DPRD	2.500.000	315.000	12,60	(2.185.000)
-	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	16.500	13.043	79,05	(3.457)
-	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.179.814.704	1.964.714.880	90,13	(215.099.824)
-	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.185.800.000	3.153.700.000	98,99	(32.100.000)
	lanja Gaji dan Tunjangan H/WKDH	55.036.800	45.360.000	82,42	(9.676.800)
-	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0	0,00	0,00	0
-	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0	0,00	0,00	0
-	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.920.000	45.360.000	85,71	(7.560.000)
	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0	0,00	0,00	0
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0	0,00	0,00	0
-	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0	0,00	0,00	0
-	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2.116.800	0,00	0,00	(2.116.800)

-	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Belanja Iuran Jaminan Kematian	0	0,00	0,00	0
-	KDH/WKDH	0	0,00	0,00	0
	elanja Penerimaan Lainnya mpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.880.000	410.880.000	100	0
-	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000	110.880.000	100	0
-	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000	300.000.000	100	0
Be	lanja Pegawai BOS	5.026.358.500	4.951.020.500	98,50	(75.338.000)
-	Belanja Pegawai BOS	5.026.358.500	4.951.020.500	98,50	(75.338.000)
В	elanja Pegawai BLUD	2.104.820.000	1.982.717.450	94,20	(122.102.550)
-	Belanja Pegawai BLUD	2.104.820.000	1.982.717.450	94,20	(122.102.550)
	Jumlah Belanja Pegawai	373.972.907.406	332.586.846.754	88,93	(41.386.060.652)

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Alokasi anggaran belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp.213.350.782.625,- dengan realisasi sebesar Rp. 191.836.809.175,21,- atau 89,92%. Rincian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.23

Target dan Realisasi Belanja Barang dan JasaKabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2023

	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tambah/ (kurang) (Rp)
Bela	inja Barang	44.981.314.876	40.068.149.237	89,08	(4.913.165.639)
-	Belanja Barang Pakai Habis	44.981.314.876	40.068.149.237	89,08	(4.913.165.639)
Bela	anja Jasa	85.700.784.491	79.476.937.340	92,74	(6.223.847.151)
-	Belanja Jasa Kantor	61.742.966.219	57.260.549.642	92,74	(4.482.416.577)
-	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.142.413.800	15.603.543.024	96,66	(538.870.776)
-	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.502.207.572	1.482.383.500	98,68	(19.824.072)
-	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.238.000.000	1.094.515.000	88,41	(143.485.000)
-	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	20.000.000	20.000.000	100	0
-	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.531.318.400	2.530.890.000	71,67	(1.000.428.400)
-	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	130.000.000	130.000.000	100	0
-	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.258.318.500	1.219.496.174	96,91	(38.822.326)
-	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	121.560.000	121.560.000	100	0
Bela	inja Pemeliharaan	5.406.980.050	5.373.784.269	99,39	(33.195.781)
	Belanja Pemeliharaan Tanah	150.000.000	149.944.000	99,96	(56.000)
-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.538.349.050	1.521.955.269	98,93	(16.393.781)
-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	599.981.000	599.085.000	99,85	(896.000)
-	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.089.850.000	3.074.000.000	99,49	(15.850.000)
-	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	28.800.000	28.800.000	100	0
Bela	nja Perjalanan Dinas	53.825.608.149	47.069.701.592	87,45	(6.755.906.557)
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.825.608.149	47.069.701.592	87,45	(6.755.906.557)

Dib	nnja Uang dan/atau Jasa untuk erikan kepada Pihak iga/Pihak Lain/Masyarakat	459.230.000	451.819.500	98,39	(7.410.500)
-	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	440.950.000	433.550.000	98,32	(7.400.000)
-	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.280.000	18.269.500	99,94	(10.500)
Bela	anja Barang dan Jasa BOS	12.851.909.020	12.659.283.819,21	98,50	(192.625.200,79)
-	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.851.909.020	12.659.283.819,21	98,50	(192.625.200,79)
-	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.124.956.039	6.737.133.418	66,54	(3.387.822.621)
Jui	mlah Belanja Barang dan Jasa	213.350.782.625	191.836.809.175,21	89,92	(21.513.973.449,79)

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah ditargetkan sebesar Rp.33.016.621.863,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.792.120.164,- atau 56,92% yang diperuntukan kepada :

- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.18.516.837.600,- dan realisasi sebesar Rp. 5.191.291.000,- atau 28,04%
- 2. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dialokasikan sebesar Rp.12.725.113.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.896.157.901,- atau 93,49%.
- 3. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dialokasikan sebesar Rp.1.234.285.330,- dan realisasi sebesar Rp.1.234.285.330,- atau 100%.
- 4. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dialokasikan sebesar Rp70.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.0,-
- 5. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebesar Rp.470.385.933,- dan realisasai sebesar Rp.470.385.933,- atau 100%.

Rincian belanja Hibah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.24

Target dan Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2023

Uraian	Target	Realisasi	%	Tambah/ (kurang)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	18.516.837.600	5.191.291.000	28,04	13.325.546.600
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12.725.113.000	11.896.157.901	93,49	(828.955.099)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.234.285.330	1.234.285.330	100	0
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	70.000.000	0,00	0,00	(70.000.000)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	470.385.933	470.385.933	100	0
Jumlah Belanja Hibah	Rp.33.016.621.863	Rp.18.792.120.164	56,92	(14.224.501.699)

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024 (Sesudah audit BPK RI)

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp.3.979.137.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.860.273.00,- atau 97,01% yang diperuntukan :

- 1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dialokasikan sebesar Rp. 939.480.000,-dan realisasi sebesar Rp.910.420.000,- atau 96,91%
- 2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga dialokasikan sebesar Rp.2.446.082.000,-dan realisasi sebesar Rp.2.356.578.000,- atau 96,31%.
- 3. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dialokasikan sebesar Rp.544.575.000,- dan realisasi sebesar Rp.544.575.000,- atau 100%.

Rincian Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.25

Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tambah/Kura ng Rp
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	939.480.000	910.420.000	96,91	(29.060.000)
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.446.082.000	2.356.578.000	96,34	(89.504.000)
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	544.575.000	544.575.000	100	0
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	3.979.137.000	3.860.273.000	97,01	(118.864.000)

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024 (Sesudah audit BPK RI)

Dari Alokasi dan Realisasi Belanja Operasi Kab. Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 diatas dapat diuraikan Rincian Alokasi dan Realisasi Belanja Operasi per Perangkat Daerah seperti pada Tabel berikut:

Tabel 1.26

Target dan Realisasi Belanja Operasi per Perangkat Daerah Kabupaten Banggai

Kepulauan Tahun 2023

	Perangkat Daerah	Target	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	174.484.039.372	165.660.571.605	95
2	Dinas Kesehatan	132.254.020.837	118.198.646.083	89
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	17.395.633.530	15.770.299.553	91
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	4.761.816.533	4.443.437.213	93
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.173.196.707	7.901.772.510	37
6	Satuan Polisi Pamong Praja	8.190.754.387	7.925.654.738	97
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.199.217.792	3.073.083.020	96
8	Dinas Sosial	6.527.489.415	6.397.016.864	98
9	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.664.682.540	2.598.472.214	98
10	Dinas Ketahanan Pangan	3.762.661.742	3.691.578.026	98
11	Dinas Lingkungan Hidup	4.452.825.769	4.362.230.312	98
12	Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil	3.621.380.497	3.502.015.231	97
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.357.180.525	4.866.477.260	91

	Perangkat Daerah	Target	Realisasi	%
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak, Pengendalian Penduduk Dan KB	9.318.136.860	8.715.086.196	94
15	Dinas Perhubungan	6.588.538.255	6.402.436.044	97
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	4.109.246.820	4.034.276.496	98
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi DanUsaha Kecil Dan Menengah	4.961.488.390	4.780.015.147	96
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.694.614.824	3.644.749.698	99
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	3.478.348.573	3.183.202.469	92
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.283.813.156	3.198.028.659	97
21	Dinas Perikanan	11.182.468.108	10.119.773.032	90
22	Dinas Pariwisata	2.687.242.541	2.537.368.320	94
23	Dinas Pertanian	10.616.243.944	10.076.805.974	95
24	Inspektorat	8.672.561.163	8.584.322.117	99
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah danPenelitian Pengembangan	8.282.147.946	7.819.605.577	94
26	Badan Pengelolaan dan Aset Daerah	21.581.642.794	20.209.512.218	94
27	Badan Pendapatan Daerah	5.081.084.165	4.736.210.157	93
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SumberDaya Manusia	6.616.698.064	6.463.505.302	98
29	Sekretariat Daerah	68.574.522.708	40.143.983.240	59
30	Sekretariat DPRD	26.504.408.945	23.593.452.278	89
31	Kecamatan Bulagi selatan	2.750.186.782	2.709.285.092	99
32	Kecamatan Bulagi	3.486.151.164	3.431.013.056	98
33	Kecamatan Liang	2.602.343.698	2.564.200.128	99
34	Kecamatan Tinangkung	2.752.402.951	2.663.930.838	97
35	Kecamatan Buko	2.285.283.510	2.161.571.051	95
36	Kecamatan Tinangkung Selatan	1.751.744.120	1.680.484.770	96
37	Kecamatan Totikum	2.402.308.570	2.338.898.019	97
38	Kecamatan Totikum Selatan	2.069.656.783	2.026.153.347	98
39	Kecamatan Peling Tengah	2.370.272.374	2.320.567.628	98
40	Kecamatan Bulagi Utara	2.706.741.868	2.663.769.951	98
41	Kecamatan Buko Selatan	1.729.354.389	1.657.206.142	96
42	Kecamatan Tinangkung Utara	1.932.587.213	1.886.483.499	98
43	Kecamatan Totikum	2.402.308.570	2.338.898.019	97
	TOTAL BELANJA OPERASI	624.319.448.894	547.076.049.093,21	87,63

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024 (Sesudah audit BPK RI)

2. REALISASI BELANJA MODAL

Belanja Modal tahun anggaran 2023 dialokasikan Rp.151.052.856.292,- sedangkan realisasi Belanja Modal pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2023 sebesar Rp.137.246.465.854,- atau 90,86% dari target yang telah ditetapkan. Berikut adalah rincian target dan realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun anggaran 2023 yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.27
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Tanah	4.551.020.000	3.418.849.908	75,12
Belanja Modal Tanah Persil	632.639.000	583.761.000	92,27
Belanja Modal Lapangan	3.918.381.000	2.835.088.908	72,35
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.992.755.382	17.125.860.281	95,18
Belanja Modal Alat Besar	360.000.000	357.538.000	99,32
Belanja Modal Alat Angkutan	394.494.920	379.650.000	96,24
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.005.000	7.005.000	100
Belanja Modal Alat Pertanian	26.250.000	26.203.000	99,82
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.307.427.364	7.119.883.409	97,43
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	801.548.200	793.754.095	99,03
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.401.013.500	1.103.769.500	78,78
Belanja Modal Alat Laboratorium	16.659.500	16.659.300	100
Belanja Modal Komputer	6.888.543.505	6.791.739.815	98,59
Belanja Modal Eksplorasi	13.000.000	13.000.000	100
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	7.150.000	7.146.000	99,94
Belanja Modal Rambu Rambu	150.000.000	149.980.000	99,99
Belanja Modal Peralatan Olahraga	240.700.000	240.650.000	99,98
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	378.963.393	118.882.162	31,37
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.998.534.422	53.319.770.065	91,93
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	54.197.984.422	49.736.602.065	91,77
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.800.550.000	3.583.168.000	94,28
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.197.876.600	2.860.406.800	89,45
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.197.876.600	2.860.406.800	89,45
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	67.176.212.100	60.393.603.200	89,90
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	47.589.268.100	45.440.961.600	95,49
Belanja Modal Bangunan Air	16.751.814.000	12.432.028.600	74,21
Belanja Modal Instalasi	2.556.290.000	2.243.421.000	87,76
Belanja Modal Jaringan	278.840.000	277.192.000	99,41
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	136.457.788	127.975.600	93,78
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	109.623.188	101.141.000	92,26
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	26.834.600	26.834.600	100
Jumlah Belanja Modal	151.052.856.292	137.246.465.854	90,86

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024 (Sesudah audit BPK RI)

- a. Belanja Modal Tanah Tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.4.551.020.000,-dengan realisasi sebesar Rp.3.418.849.908,- atau 75,12%.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp.17.992.755.382,- dan realisasi sebesar Rp. 17.125.860.281,- atau 95,18%
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp.57.998.534.422,- dengan realisasi sebesar Rp. 53.319.770.065,- atau 91,93%
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp.67.176.212.100,- dengan realisasi sebesar Rp.60.393.603.200,- atau 89,90%
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp.136.457.788,- dengan realisasi sebesar Rp. 127.975.600,- atau 93,78%

3. REALISASI BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja tidak terduga merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk keperluan penanganan bencana alam dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan. Anggaran Belanja tidak terduga tahun anggaran 2023 di alokasikan sebesar Rp.1.191.363.962,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.105.880.000,- atau 92,82% merupakan penggunaan dana untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan sosial safety net/jaring pengaman sosial.

Tabel 1.28

Target dan Realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Banggai Kepulauan

Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
Belanja Tidak Terduga	1.191.363.962	1.105.880.000,00	92,82
Jumlah Belanja Tidak Terduga	1.191.363.962	1.105.880.000,00	92,82

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024 (Sesudah audit BPK RI)

4. REALISASI BELANJA TRANSFER

Belanja Transfer tahun anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp.160.373.599.664,- sedangkan realisasi Belanja pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2023 sebesar Rp.163.604.370.514,- atau 102,01% dari target yang telah ditetapkan. Adapun peruntukannya adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Bagi Hasil Tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.3.160.953.364,-dengan realisasi sebesar Rp.2.487.581.214,- atau 78,70% yang diperuntukan :
 - Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa yang dialokasikan sebesar Rp.661.849.284,- dengan realisasi sebesar Rp.628.573.289,- atau 94,97%
 - Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa yang dialokasikan sebesar Rp.2.499.104.080,- dengan realisasi sebesar Rp.1.859.007.925,- atau 74,39%
- b. Belanja Bantuan Keuangan pada tahun anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp.157.212.646.300,- dan realisasi sebesar Rp.161.116.789.300,- atau 102,48% yang diperuntukan guna Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang dialokasikan sebesar Rp.157.212.646.300,dengan realisasi sebesar Rp.161.116.789.300,- atau 102,48%.

Berikut adalah rincian target dan realisasi Belanja Transfer pada APBD Tahun anggaran 2023 yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.29 Target dan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Banggai Kepulauan **Tahun 2023**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
Belanja Bagi Hasil	3.160.953.364	2.487.581.214	78,70
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	661.849.284	628.573.289	94,97
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.499.104.080	1.859.007.925	74,39
Belanja Bantuan Keuangan	157.212.646.300	161.116.789.300	102,48
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	157.212.646.300	161.116.789.300	102,48
Jumlah Belanja Transfer	160.373.599.664	163.604.370.514	102,01

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024 (Sesudah audit BPK RI)

Bab 2

Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tema pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 yaitu "Meningkatkan Daya Saing Kabupaten Banggai Kepulauan Melalui Penyediaan Infrastruktur Daerah Yang Memadai". Tema tersebut masih relevan dengan kondisi tahun 2023 dan pada perubahan APBD tidak mengalami perubahan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, melalui penekanan fokus pembangunan pada prioritas pembangunan daerah dan program prioritas yang telah ditetapkan. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (tiga) arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 yang pada perubahan APBD tidak mengalami perubahan yaitu:

- 1. Peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (public service quality);
- 2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan; dan
- 3. Peningkatan infrastruktur daerah dalam rangka peningkatan daya saing.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2023, dirumuskan 4 (empat) agenda prioritas pembangunan daerah di tahun 2023 yang pada perubahan APBD tidak mengalami perubahan yaitu:

- 1. Tersedianya sarana dan prasarana Pelabuhan Salakan dan penataan kawasan ibukota;
- 2. Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3. Peingkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta optimalisasi percepatan penurunan stunting; dan
- 4. Optimalisasi pelayanan publik dan sektor pendukung ekonomi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Adapun isu strategis Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami perubahan pada perubahan APBD tahun 2023.

- 1 Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh perkotaan.
- 2 Belum optimalnya Pelabuhan Salakan
- 3 Belum optimalnya penanganan infrastruktur jalan
- 4 Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan airbersih
- 5 Belum memadainya penataan Kota Salakansebagai ibukota Banggai Kepulauan
- 6 Masih rendahnya produksi sektor perikanan danpertanian untuk mendukung industri kecil dan menengah (IKM)
- 7 Masih rendahnya minat investasi sektor Pariwisata
- 8 Belum akuratnya data base kemiskinan/kependudukan/data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial);

- 9 Belum maksimalnya operasional Unit Transfusi Darah (UTD)
- 10 Masih tingginya angka stunting di Banggai Kepulauan
- 11 Belum optimalnya pelayanan publik sektor perijinan/nonperijinan dan administrasi Kependudukan

2.1 Perubahan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaan. Kemandirian APBD berkaitan erat dengan pendapatan daerah, karena semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat. Secara umum pendapatan daerah dipengaruhi oleh investasi pemerintah untuk mendukung sarana dan prasarana jasa pelayanan kepada masyarakat, terutama jasa layanan yang menghasilkan retribusi daerah. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dan penyesuaian berdasarkan evaluasi atas realisasi semester 1 (satu) serta analisis keadaan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- Penyesuaian terhadap asumsi pendapatan daerah sebagaimana telah ditampung dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap:
 - Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
 Pertama (JKN-FKTP) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023;
 - Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 untuk Gerakan Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (GERCEP GASKAN BERDAYA) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 900.1.3/276/BPKAD-G.ST/2023.
 - Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) JKN-FKTP tahun anggaran 2022 berdasarkan hasil audit BPK.
- 2. Penyesuaian target Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Trikora salakan dan puskesmas berdasarkan realisasi januari juni tahun anggaran 2023.
- 3. Realokasi target retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Trikora salakan dan puskesmas menjadi Pendapatan BLUD, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- 4. Penyesuaian target Pendapatan JKN-FKTP berdasarkan realisasi januari juni tahun anggaran 2023.
- 5. Realokasi target Pendapatan JKN-FKTP pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah menjadi Pendapatan BLUD, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- 6. Dana bagi hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023.
- 7. Dana Bagi Hasil pajak daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor :

- 900.1.14.3/23/BAPENDA.G-ST/2023 tentang Target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 8. Alokasi kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 900.1.14.3/81/BAPENDA.G-ST/2023 tentang Alokasi kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 9. Penyesuaian terhadap komponen penerimaan pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berdasarkan realisasi yang ada.
- 10. Penyesuaian penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari asumsi kurang salur Dana Bagi Hasil.
- 11. Tambahan Dana Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023.
- 12. Tambahan Dana Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023

Akibat dari beberapa faktor diatas, semua komponen Pendapatan Daerah mengalami dampak yang signifikan karena harus menyesuaikan perkembangan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan dan mengikuti perubahan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat.

Dasar Hukum Perubahan Pendapatan Kab. Banggai Kepulauan Daerah pada Tahun 2023:

- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025;

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Rancangan Perubahan KUA Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 1);
- 18. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 10);
- 19. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 16);
- 20. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);
- 21. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 4);
- 22. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 9);
- 23. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 25);

Berdasarkan analisis terhadap realisasi APBD TA 2022, proyeksi RKPD Tahun 2023, Penetapan APBD TA 2023 serta realisasi prognosis semester I TA 2023, maka di proyeksikan Perubahan Pendapatan Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2023 sebesar Rp.860.045.753.599,- (Delapan ratus enam puluh milyar empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) meningkat 2,007% atau

Rp.43.660.412.474,- (Empat puluh tiga milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) dari target sebelumnya Rp.816.385.341.125 (Delapan ratus enam belas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Rincian perubahan pendapatan daerah tersaji pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun Anggaran 2023

	Anggaran		
Uraian	Murni	Perubahan	Tambah/ (Kurang)
PENDAPATAN	816.385.341.125	860.045.753.599	43.660.412.474
PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.419.533.649	41.060.725.094	1.641.191.445
Pendapatan Pajak Daerah	6.618.492.847	6.348.922.837	(269.570.010)
Pajak Hotel	123.470.492	123.470.492	0
Pajak Restoran	930.207.511	930.207.511	0
Pajak Hiburan	507.500	1.500.000	992.500
Pajak Reklame	100.000.000	40.000.000	(60.000.000)
Pajak Penerangan Jalan	3.000.000.000	2.800.000.000	(200.000.000)
Pajak Air Tanah	1.545.755	1.000.000	(545.755)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.102.744.834	1.102.744.834	0
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dn Perkotaan (PBBP2)	1.215.016.755	1.300.000.000	84.983.245
Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	145.000.000	50.000.000	(95.000.000)
Hasil Retribusi Daerah	24.991.040.802	13.816.841.258	(11.174.199.544)
Retribusi Jasa Umum	24.107.665.534	13.228.841.258	(10.878.824.276)
Retribusi Jasa Usaha	683.123.053	508.000.000	(175.123.053)
Retribusi Perizinan Tertentu	200.252.215	80.000.000	(120.252.215)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.200.000.000	4.231.364.872	1.031.364.872
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.200.000.000	4.231.364.872	1.031.364.872
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.610.000.000	16.663.596.127	12.053.596.127
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000	100.000.000	0
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	100.000.000	100.000.000
Penerimaan Jasa Giro	2.010.000.000	1.024.500.000	(985.500.000)
Pendapatan Bunga	0	500.000	500.000

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.500.000.000	1.500.000.000	(1.000.000.000)
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	80.000.000	80.000.000
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0	100.000	100.000
Pendapatan Dari Pengembalian	0	1.739.965.056	1.739.965.056
Pendapatan BLUD	0	12.118.531.071	12.118.531.07
PENDAPATAN TRANSFER	771.306.476.492	815.007.805.657	43.701.329.165
Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat	746.187.190.000	784.250.989.569	38.063.799.569
Dana Perimbangan	638.675.437.000	671.005.167.569	32.329.730.569
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	39.842.334.000	72.172.064.569	32.329.730.569
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	457.166.599.000	457.166.599.000	(
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	57.589.342.000	57.589.342.000	(
Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	84.077.162.000	84.077.162.000	(
Dana Insentif Daerah (DID)	0	5.734.069.000	5.734.069.000
Dana Insentif Daerah	0	5.734.069.000	5.734.069.000
Dana Desa	107.511.753.000	107.511.753.000	(
Dana Desa	107.511.753.000	107.511.753.000	(
Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.119.286.492	30.756.816.088	5.637.529.596
Pendapatan Bagi Hasil	25.119.286.492	30.756.816.088	5.637.529.596
LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.659.330.984	3.977.222.848	1.682.108.136
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	5.659.330.984	3.977.222.848	1.682.108.130
	1		

Sumber : BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024

Perubahan terhadap Proyeksi Pendapatan Daerah tersebut berasal dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni sebesar Rp. 41.060.725.094 (Empat puluh satu milyar enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah) meningkat Rp.1.641.191.445 (Satu milyar enam ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dari target sebelumnya yakni sebesar Rp.39.419.533.649 (Tiga puluh sembilan milyar empat ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dan Peningkatan Pendapatan Transfer sebesar Rp.43.701.329.165 (Empat puluh tiga milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah) dari semula Rp.771.306.476.492 (Tujuh ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi Rp.815.007.805.657 (Delapan ratus lima belas milyar tujuh juta delapan ratus lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) tetapi menurun pada sektor Lain lain

Pendapatan yang sah yaitu sebesar Rp.3.977.222.848 (Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) menurun sebesar Rp.1.682.108.136 (Satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dari target sebelumnya Rp.5.659.330.984 (Lima milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

Target PAD menurun 4,16% karena mengalami perubahan pada sektor Pendapatan Pajak Daerah yaitu berkurang sebesar Rp.269.570.010 (Dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu sepuluh rupiah) dari target sebelumnya Rp.6.348.922.837 (Enam milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi Rp.6.618.492.847 (enam milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah)

Pada sektor Hasil Retribusi Daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp.11.174.199.544,- (Sebelas milyar seratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yakni sebesar Rp.13.816.841.258,- (Tiga belas milyar delapan ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dari target yang ditetapkan sebesar Rp.24.991.040.802,- (Dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat puluh ribu delapan ratus dua rupiah)

Pendapatan Transfer mengalami peningkatan karena mengalami perubahan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar naik 5,10% atau Rp.38.063.799.569 (Tiga puluh delapan milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dari target sebelumnya Rp.746.187.190.000,- (Tujuh ratus empat puluh enam milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi Rp.784.250.989.569,- (Tujuh ratus delapan puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh) dan pada Pendapatan Transfer antar Daerah naik 22,44% atau Rp.5.637.529.596,- (Lima milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dari Target sebesar Rp.25.119.286.492,- (Dua puluh lima milyar seratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi Rp.30.756.816.088,- (Tiga puluh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu delapan puluh delapan rupiah).

Disisi lain, Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan 29,72% yakni sebesar Rp. 1.682.108.136,- (Satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dari target sebelumnya Rp.5.659.330.984,- (Lima milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) menjadi Rp.3.977.222.848,- (Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

2.2 Perubahan Pengelolaan Belanja Daerah

Perubahan belanja merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam mengupayakan target capaian prioritas anggaran daerah untuk mendanai urusan pemerintah yang terkait kebijakan anggaran APBD yang lebih fokus terhadap sasaran program kegiatan prioritas yang berorientasi produktif dan memiliki efektifitas belanja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta melaksanakan kebijakan pemerintah pusat ketentuan. Kebijakan terkait dengan perubahan Perencanaan Belanja daerah tahun anggaran 2023 antara lain:

- 1. Menampung kembali kebijakan belanja atas keadaan mendesak yang telah ditetapkan dalam perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, sebagai berikut :
 - a. Pengalihan anggaran kegiatan pasukan pengibar bendera pusaka (PASKIBRAKA) dari Dinas Pemuda dan Olahraga ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta penambahan anggaran pada Dinas Perhubungan untuk gaji dan tunjangan Calon Pegawai Negeri Sipil 2023 melalui sekolah kedinasan berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
 - b. Realokasi anggaran dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dengan penyesuaian pendapatan dan belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN-FKTP), penganggaran kembali sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) JKN-FKTP tahun anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 900.1.3/276/BPKAD-G.ST/2023 tentang Rincian dan Besaran bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 untuk Gerakan Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (GERCEP GASKAN BERDAYA) berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023
- 2. Menampung kembali kebijakan belanja atas kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) antara lain :
 - a. SiLPA Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik sampai dengan Tahun 2022;
 - b. SiLPA dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Negeri Tahun 2022;
 - c. Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) dan kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran 2023 (luncuran);
 - d. Utang jasa pelayanan kesehatan sampai dengan Tahun 2022;
 - e. SiLPA Dana Insentif Daerah tahun 2022;
 - f. SiLPA Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2022.
 - g. Penyesuaian belanja Gaji dan Tunjangan berdasarkan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2023;

- h. Penyesuaian belanja tambahan penghasilan ASN berdasarkan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- i. Penyesuaian belanja dalam rangka Pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada:
 - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Trikora Salakan berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 299 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Trikora Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - Rumah Sakit Pratama Bilabanggai berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 300 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Bilabanggai di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 301 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- j. Penyesuaian belanja program jaminan kesehatan untuk mencapai kepesertaan Universal Health Coverage (UHC);
- k. Penyesuaian belanja Dana bagi hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023.
- Penyesuaian belanja Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi serta Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun 2023;
- m. Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan pemilu bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum, TNI dan Polri;
- n. Penyesuaian belanja berdasarkan hasil evaluasi laporan realisasi anggaran semester pertama tahun anggaran 2022, yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- o. Pengalokasian anggaran penanganan Stunting, Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten, belanja jasa tenaga kontrak daerah bulan November dan Desember 2023, belanja jasa dokter internship, seleksi penerimaan calon ASN serta Penyesuaian belanja terhadap pemenuhan target capaian kinerja untuk mendukung prioritas daerah yang dialokasikan pada Perubahan APBD.

Sehubungan dengan hal itu maka pengalokasian anggaran yang tidak menjadi prioritas hendaknya dilakukan penyesuaian agar pemerintah daerah dapat dengan sigap menyusun perubahan anggaran sesuai dengan kinerja dari setiap perangkat daerah. Perubahan belanja merupakan kebijakan pemerintah daerah agar lebih fokus terhadap sasaran program kegiatan prioritas yang berorientasi produktif dan memiliki efektifitas belanja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta melaksanakan kebijakan pemerintah pusat ketentuan

Tabel 2.2
Rincian Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun Anggaran 2023

	Anggaran APBD 2023		
Uraian	Murni	Perubahan	Tambah/ (kurang)
BELANJA OPERASI	580.529.462.881	624.319.448.894	43.789.986.013
Belanja Pegawai	376.309.348.525	373.972.907.406	(2.354.107.119)
Belanja Barang dan Jasa	174.954.961.093	213.350.782.625	38.395.821.532
Belanja Subsidi	300.000.000	0	(300.000.000)
Belanja Hibah	23.896.155.263	33.016.621.863	9.120.466.600
Belanja Bantuan Sosial	5.068.698.000	3.979.137.000	(1.089.561.000)
BELANJA MODAL	118.168.497.925	151.052.856.292	32.906.568.867
Belanja Modal Tanah	4.317.381.000	4.551.020.000	233.639.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.647.573.394	17.992.755.382	6.345.181.988
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.706.789.031	57.998.534.422	15.291.745.391
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	150.000.000	3.197.876.600	3.047.876.600
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.240.795.000	67.176.212.100	7.935.417.100
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	105.959.500	136.457.788	30.498.288
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.059.201.867	1.191.363.962	(1.867.837.905)
BELANJA TRANSFER	160.373.599.664	160.373.599.664	0
Belanja Bagi Hasil	3.160.953.364	3.160.953.364	0
Belanja Bantuan Keuangan	157.212.646.300	157.212.646.300	0
TOTAL BELANJA	862.130.762.337	936.937.268.812	74.806.506.475

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024

Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD perubahan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.76.891.515.213 (Tujuh puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga belas rupiah) atau setara dengan 8,92% dari Rp.861.980.762.337 (Delapan ratus enam puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) menjadi Rp.936.937.268.812 (Sembilan ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah)

Belanja Operasi naik sebesar Rp.43.789.986.013 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga belas rupiah) atau meningkat 7,53% dari target sebelumnya yaitu Rp.580.529.462.881(lima ratus delapan puluh milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) menjadi Rp.624.319.448.894 (Enam ratus dua puluh empat milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pada Belanja Modal peningkatan sebesar 28% atau Rp.33.056.568.867 (Tiga puluh tiga milyar lima puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dari target sebesar Rp. 118.018.497.925 (Seratus delapan belas milyar delapan belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) menjadi Rp. 151.052.856.292 (Seratus lima puluh satu milyar tujuh puluh lima juta enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

Selanjutnya pada Belanja Tak Terduga dari target yang telah ditetapkan yakni Rp.3.059.201.867 (Tiga milyar lima puluh sembilan juta dua ratus satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) menurun 56% atau menjadi Rp.1.191.363.962 (Satu milyar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

Pada Belanja Transfer dari target yang ditetapkan sebesar Rp.160.373.599.664 (Seratus enam puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari target.

2.3. Perubahan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, sisa penghematan belanja, sisa belanja DAK serta akibat lainnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diasumsikan sebesar Rp. 80.251.515.213,49 bertambah sebesar Rp.31.296.094.001,49 atau naik 63,93% dari proyeksi awal pada APBD Induk sebesar Rp.48.955.421.212,00. Penyesuaian tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pembiayaan juga dipengaruhi oleh Hasil Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2022. Mempertimbangkan hal tersebut, kebijakan pembiayaan daerah pada perubahan APBD tahun 2023 adalah:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.31.296.094.001 (*Tiga puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh empat ribu satu rupiah*) atau meningkat 63,92% dari Rp.48.955.421.212 (*Empat puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah*) menjadi Rp.80.251.515.213 (*Delapan puluh milyar dua ratus lima puluh satu juta*

lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga belas rupiah). Penerimaan Pembiayaan Daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) ini telah menyesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp.3.360.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang direncanakan penggunaannya pada Penyertaan Modal (Investasi) Daerah kepada PT. Bank Sulawesi Tengah sebesar Rp.2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dimana penyertaan modal tersebut tidak mengalami perubahan dari target awal yang ditetapkan dalam APBD TA. 2023.

Tabel 2.3
Rincian Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

Uraian	Anggaran APBD 2023		Tambah/ (kurang)
	Murni	Perubahan	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	48.955.421.212	80.251.515.213	31.296.094.001
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunAnggaran Sebelumnya	48.955.421.212	80.251.515.213	31.296.094.001
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.360.000.000	3.360.000.000	0
Penyertaan Modal Daerah	3.360.000.000	3.360.000.000	0
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.360.000.000	3.360.000.000	0
PEMBIAYAAN NETTO	45.595.421.212	76.891.515.213	31.296.094.001

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024

Bab 3

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian urusan Pemerintahan Daerah ini diuraikan dalam pasa 12 ayat (1), (2), dan (3) serta pasal 219 ayat (1). Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan 26 urusan, yaitu: 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pilihan, dan 6 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Rincian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Pelaksana

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1.01	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
1.02	Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.02	Resenatan	RSUD Trikora Salakan
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04	Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umumserta perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamog Praja
	r	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	Sosial	Dinas Sosial
II	URUSAN WAJIB NON PELAYANANDASAR	
2.01	Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.03	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
2.04	Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.05	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2.08	Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.10	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Z. 1 Z.	Administrasi Kependudukan danpencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungananak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.15	Perhubungan	Dinas Perhubungan
2.16	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
2.17	Koperasi, Usaha kecil dan menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2.18	Penanaman Modal	Dinas penanaman Modal dan PTSP
2.19	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.23	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Perangkat Daerah
III	URUSAN PILIHAN	
3.08	Transmigrasi	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3.25	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
3.26	Pariwisata	Dinas Pariwisata
3.27	Pertanian	Dinas Pertanian
3.30	IPARASASAN	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3.31	Permonsirian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
IV	URUSAN PENUNJANG	
4.01	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
4.02	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
5.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian pengembangan
E 02	17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah
5.03	Kepegawaian	Badan kepegawaian dan pengembanganSumber Daya Manusia
5.05	Penelitian dan pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Penelitian pengembangan
6.01	Inspektorat	Inspektorat
7.01	Administrasi Pemerintahan	12 Kecamatan

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1.1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Pendidikan pada Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar adalah Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan Non Formal/kesetaraan sehingga mencapai dari target yang ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran Program ini pada APBD perubahan sebesar Rp.79.084.157.978,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.72.341.475.056,- setara dengan 91,47%

- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp.48.711.742.432,- melalui Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.6.091.187.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.870.772.185,- atau setara dengan 96,38%. Output kegiatan ini adalah 8 Ruang Kelas Baru yang Bertambah
- 2. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Alokasi anggaran sebesar Rp.2.196.532.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.183.863.200,- atau setara dengan 99,42%. Output kegiatan ini adalah 7 Ruang Guru /Kepala Sekolah yang telah dibangun

- 3. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Alokasi anggaran Rp.553.746.400,- dengan realisasi sebesar Rp.537.764.000,- atau 97,11%. Output Sub Kegiatan ini adalah 7 ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun.
- 4. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah. Alokasi anggaran Rp.952.306.069,- dengan realisasi sebesar Rp.755.455.450,- atau 79,33%. Output Sub Kegiatan ini adalah 5 ruang Perpustakaan Sekolah Yang telah dibangun
- 5. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah. Alokasi Anggaran Rp.5.183.220.050,- dengan realisasi sebesar Rp.4.931.459.442,- atau 95,14%. Output Sub Kegiatan ini adalah 12 unit Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun.
- 6. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah /Guru/Penjaga Sekolah. Alokasi anggaran Rp.1.055.000.000,- dengan realisasi Rp.1.054.548.000,- atau setara 99,96%. Output Sub kegiatan ini adalah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah dibangun.
- 7. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas. Alokasi anggaran Rp.9.706.856.500,- dengan realisasi Rp.8.679.509.554,-. Atau 89,42%. Output Sub Kegiatan ini adalah 19 Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang /Berat.
- 8. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru Kepala Sekolah /TU. Alokasi anggaran Rp.267.224.600,- dengan realisasi Rp.267.169.000,- atau 99,98%. Output Sub Kegiatan ini adalah 1 Ruang Guru /Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi.
- 9. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah. Alokasi anggaran Rp.1.179.948.400,- dengan realisasi Rp.920.773.500,- atau setara 78,04%. Output Sub Kegiatan ini adalah 5 ruang Perpustakaan yang telah Direhabilitasi Sedang/ Berat.
- 10. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Alokasi anggaran Rp.220.000.000,- dengan realisasi Rp.218.582.000,- atau setara 99,36%. Output Sub Kegiatan ini adalah 1 unit Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah Direhabilitasi.
- 11. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah. Alokasi anggaran Rp.1.600.000.000,- dengan realisasi Rp.1.595.142.000,- atau setara 99,70%. Output Sub Kegiatan ini adalah 4 unit Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat.
- 12. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah. Alokasi anggaran Rp.2.865.495.350,- dengan realisasi Rp.2.829.270.000,- atau setara 98,74%. Output Sub Kegiatan ini adalah 41 Paket Mebel Sekolah yang tersedia.
- 13. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa. Alokasi anggaran Rp.1.191.818.300,- dengan realisasi Rp.1.185.218.300,- atau setara 99,45%. Output Sub Kegiatan ini adalah 10 Paket Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 14. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik. Alokasi anggaran Rp.75.000.000,- dengan realisasi Rp.62.651.000,- atau 83,53%. Output Sub Kegiatan ini adalah terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

- 15. Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar. Alokasi anggaran Rp.51.050.000,- dengan realisasi Rp.45.900.000,- atau setara 89,91%. Output Sub Kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan evaluasi satuan pendidikan yang dilaksanakan
- 16. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa. Alokasi anggaran Rp.161.000.000,- dengan realisasi Rp.152.750.000,- atau setara 94,88%. Output Sub Kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan pembinaan bakat yang dilaksanakan.
- 17. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar. Alokasi anggaran Rp.13.397.343.413 dengan realisasi Rp.12.857.327.135,- atau setara 95,97%. Output Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS.
- 18. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar. Alokasi anggaran Rp.1.923.063.350 dengan realisasi Rp.1.906.613.750,- atau setara 99,14%. Output Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun.

- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp.21.267.216.715,- melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.6.091.187.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.870.772.185,- atau setara dengan 96,38%. Output kegiatan ini adalah 8 Ruang Kelas Baru yang Bertambah.
- 2. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU. Alokasi anggaran Rp.1.560.128.300,- dengan realisasi Rp.1.538.281.246,- atau setara 98,60%. Output Sub Kegiatan ini adalah Jumlah ruang yang dibangun.
- 3. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah. Alokasi anggaran Rp.1.959.534.550,- dengan realisasi Rp.1.684.571.750,- atau setara 85,97%. Output Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun.
- 4. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah. Alokasi anggaran Rp.474.221.900,- dengan realisasi Rp.403.426.083,- atau setara 85,07%. Output Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah yang dibangun.
- 5. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.5.188.643.050,- dan realisasi sebesar Rp.4.824.748.506,- atau setara 92,99%. Output kegiatan ini adalah 17 paket Ruang Laboratorium yang telah dibangun.
- 6. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah. Alokasi anggaran Rp.1.250.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.211.408.900,- setara dengan 96,91%. Output Kegiatan ini adalah 3 paket Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun.
- 7. Sub Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah. Alokasi anggaran Rp.514.691.200,- dengan realisasi Rp.278.086.000,- atau setara 54,03%. Output Sub kegiatan ini adalah 6 paket Ruang Guru Sekolah yang telah direhabilitasi Sedang/Berat.

- 8. Sub Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah. Alokasi anggaran Rp.491.986.000,- dengan realisasi Rp.310.183.000,- atau 68,93%. Output Sub kegiatan adalah 6 paket Ruang Guru Sekolah yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat.
- 9. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang /Laboratorium. Alokasi anggaran Rp.300.000.000,-dengan realisasi Rp. 299.878.000,- atau setara 99,96%. Output Sub kegiatan ini adalah 2 ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi Sedang/ Berat.
- 10. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Serba Guna /Aula. Alokasi anggaran Rp.150.000.000,- dengan realisasi Rp.148.383.000,- atau setara 99,12%. Output Sub kegiatan ini adalah 3 paket Ruang Serba Guna /Aula yang direhabilitas sedang/Berat.
- 11. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat /Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah. Alokasi anggaran Rp.150.000.000,- dengan realisasi Rp.149.896.000,- atau setara 99,93%. Output Sub kegiatan ini adalah 6 paket Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi Sedang/Berat.
- 12. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah. Alokasi anggaran Rp.211.498.250,- dengan realisasi Rp.28.490.000,- atau setara 13,47%. Output Sub kegiatan ini adalah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang telah direhabilitasi Sedang/Berat..
- 13. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah. Alokasi anggaran Rp.1.406.622.740,-dengan realisasi Rp.1.363.500.000,- atau setara 96,93%. Output Sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Mebel Sekolah yang tersedia.
- 14. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik. Alokasi anggaran Rp.32.970.000,- dengan realisasi Rp.23.360.000,- atau 70,85%. Output Sub Kegiatan ini adalah terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik.
- 15. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa. Alokasi anggaran Rp.345.744.000,- dengan realisasi Rp.277.336.040,- atau setara 80,21%. Output Sub Kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan pembinaan bakat yang dilaksanakan
- 16. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah. Alokasi anggaran Rp.53.088.000,- dengan realisasi Rp.0,- atau setara 0%. Output Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah yang dilaksanakan.
- 17. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama. Alokasi anggaran Rp.7.120.074.725,- dengan realisasi Rp.6.661.022.891 atau 93,55%. Output Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS

- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.321.628.831,- dengan realisasi Rp.4.700.114.124,- atau 74,35% dilaksanakan melalui Sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Pembangunan Gedung /Ruang Kelas /Ruang Guru PAUD dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.465.977.631,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.465.009.600,- atau setara dengan 99,79%. Output kegiatan ini adalah 7 paket Gedung /Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang telah dibangun.

- 2. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah PAUD dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.1.239.382.369,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.218.462.369,- atau setara dengan 98,31%. Output kegiatan ini adalah 11 paket Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD.
- 3. Sub Kegiatan Rehabilitas Sedang/ Berat Gedung / Ruang Kelas /Ruang Guru PAUD dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.308.031.700,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.304.998.700,- atau setara dengan 99,02%. Output kegiatan ini adalah 6 paket Gedung/RuangKelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi.
- 4. Sub Kegiatan Rehabilitas Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.313.407.300,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.311.244.500,- atau setara dengan 99,31%. Output kegiatan ini adalah 1 unit Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah direhabilitasi.
- 5. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD. Alokasi anggaran sebesar Rp.28.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.21.438.000,- atau setara dengan 76,56%. Output kegiatan ini adalah Jumlah tersedianya alata rumah tangga PAUD.
- 6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (DAU) dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.369.667.631,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.166.397.631,- atau setara dengan 45,01%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar.
- 7. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.42.500.000,- atau setara dengan 70,83%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Pada PAUD.
- 8. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD. Alokasi anggaran sebesar Rp.314.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.124.125.324,- atau setara dengan Rp.39,53%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD yang dilaksanakan.
- 9. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana SOP PAUD dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.3.223.162.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.045.938.000,- atau setara dengan 63,48,%. Output kegiatan ini adalah Jumlah PAUD yang Mengelola BOP.

b. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Capaian indikator kinerja Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar sehingga mencapai dari target yang ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran Program ini sebesar Rp.5.085.541.160,- yang dilaksanakan melalui :

- Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 5.085.541.160,- dengan realisasi sebesar Rp.4.991.338.760,- atau setara 98,15% melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (DAU) dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.4.663.405.860,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.634.628.460,- atau setara dengan 99,38%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar ,PAUD,Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
- 2. Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (DAU) dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.422.135.300,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.356.710.300,- atau setara dengan 84,50%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Penataan Pendistrbusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Alokasi anggaran Program Pembinaan Perpustakaan pada APBD murni adalah sebesar Rp.441.250.000,- dan pada perubahan menjadi Rp.586.666.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 570.882.000,- setara dengan 97.31% dan dilaksanakan melalui kegiatan:

- Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota.

Alokasi anggaran kegiatan ini pada APBD murni sebesar Rp.170.750.000,- dan APBD Perubahan menjadi Rp.Rp.324.166.000,- dengan realisasi sebesar Rp.316.934.000,- atau setara 97.77%. Output pada kegiatan ini adalah Peningkatan Layanan Perpustakaan.

- 1. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan layanan Perpustakaan Elektronik dengan alokasi anggaran Rp.5.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.750.000,- atau setara dengan 100 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah Layanan perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Managemen layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM: Information Tecnology Service Managemen)
- 2. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan Dasar diseluruh wilayah kab/kota sesuai dengan standar Nasional perpustakaan dengan alokasi anggaran Rp.3.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.800.000,- atau setara dengan 100 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan.
- 3. Sub Kegiatan Pembinaan perpustakaan khusus ditingkat kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp.25.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.22.900.000,- atau setara dengan 91,60 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah Perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/kota dalam mewujudkan standar Nasional Perpustakaan.

- 4. Sub Kegiatan Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp.53.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.181.000,- atau setara dengan 92,45 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi.
- 5. Sub Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, dengan alokasi anggaran Rp.236.416.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.235.303.000,- atau setara dengan 99.53 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah Bahan Perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan.

- Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,

Alokasi anggaran kegiatan ini pada APBD murni sebesar Rp.270.500.000,- dan APBD Perubahan menjadi Rp.262.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.253.948.000,- atau setara 96.74%. Output pada kegiatan ini adalah Cakupan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

 Sub Kegiatan Pengembangan Literasi berbasis inklusi Sosial, dengan alokasi anggaran Rp.262.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.252.880.000,- atau setara dengan 96.34 %. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan Literasi dan Transpormasi layanan Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial

Permasalahan dan Solusi Urusan Perpustakaan

1. Permasalahan

- a. Terdapat Sub Kegiatan yang termuat dalam Renstra tidak dapat dilaksanakan karena Adanya Efisiensi Anggaran Pemerintah yang diprioritaskan pada Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur dan Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Belum adanya Tenaga Fungsional Pustakawan yang memiliki sertifikat Pustakawan.

2. Solusi

- a. Pada saat penyusunan Renstra sudah harus mengefisiensi anggaran sesuai skala prioritas Pembangunan diatas.
- b. Perlu adanya Diklat Funsional Pustakawan.

b. Program Pengelolaan Arsip

Alokasi anggaran program ini pada APBD Murni sebesar Rp.200.000.000,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.197.824.000,- atau setara dengan 98, 91 %, dan dilaksanakan melalui kegiatan Sebagai berikut :

- Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota

Alokasi anggaran program ini Rp.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.197.824.000,- atau setara dengan 98.91 %. Output Pada Kegiatan Adalah Jumlah Simpul Jaringan iInformasi Kearsipan dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dan realisasi Anggaran Rp.197.824.000,- atau setara 98.91 %. Output Kegiatan ini adalah Terlaksananya Perbup Kearsipan,Diklat Kearsipan, Bimtek dan Pembinaan sadar tertib Arsip.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

- Kurangnya Peralatan dan perangkat lunak yang diperlukan untuk pengelolaa Arsip / aplikasi SRIKANDI;
- 2. Kurangnya SDM Kearsipan (Funsional Arsiparis) pada Lembaga Kearsipan Daerah;

b. Solusi

- 1. Perlu adanya pengadaan Peralatan dan perangkat lunak untuk pengelolaa Arsip / aplikasi SRIKANDI;
- 2. Perlu adanya Diklat Fungsional Arsiparis.

2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

Urusan Kesehatan pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh 2 (dua) instansi yaitu:

- 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
- 2) RSUD Trikora Salakan

Pencapaian indikator kinerja pelayanan daerah terhadap penyelenggaran urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan urusan kesehatan tahun 2023 adalah sebagai berikut : BOR 102,22%, BTO 37,48 Kali, TOI 3,11, ALOS 3,14 Hari, dimana Jumlah Ketersediaan Tempat Tidur di Tahun 2022 adalah 101 Tempat Tidur. RSUD Trikora Salakan telah terakreditasi dengan Sertifikat Akreditas lulus tingkat Perdana dan terakreditasi 100%. Dimana untuk Ketersdiaan Data Sarana mencapai 62,39%, Data Prasarana 60,47%, Data Alat Kesehatan 60,47% dan Kumulasi Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan adalah 61,43% dan semuanya belum mencapai target 100% di Tahun 2023 sesuai standar.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Dinas Kesehatan

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Capaian indikator program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan target tahun 2023 100%. Alokasi anggaran Program ini pada APBD sebesar Rp.60.416.564.829,- dengan realisasi Rp.52.198.366.444,- setara 86,40%.

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.24.459.855.865,- dengan realisasi Rp.19.055.453.917,- atau 77,91% melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.622.424.357-, dan realisasi sebesar Rp.622.197.857,- setara dengan 99,96%. Output kegiatan ini adalah Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya.
- 2. Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas dengan alokasi anggaran Rp.765.372.815-, dan realisasi Rp. 698.512.000,- setara dengan 91,26%. Output kegiatan ini adalah Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana.
- 3. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.649.084.000-, dan realisasi Rp.236.714.000,- setara dengan 36,47%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan.
- 4. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.753.440.000-, dan realisasi sebesar Rp.747.801.560,- setara dengan 99,25%. Output kegiatan ini adalah Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya.
- 5. Sub Kegiatan Pengadaaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.4.070.115.000,- dan realisasi Rp.3.065.085.715,- setara dengan 75,31%. Output kegiatan ini adalah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
- 6. Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.303.247.865,- dan realisasi sebesar Rp.1.136.165.565,- setara dengan 87,18%. Output kegiatan ini adalah Pengadaan Sarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 7. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.608.212.200,- dan realisasi sebesar Rp.349.645.500,- setara 57,49%. Output kegiatan ini adalah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 8. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.168.083.311,- dan realisasi sebesar Rp.8.805.728.207,- setara dengan 72,37%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya obat dan vaksin.
- 9. Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.458.154.667,- dan realisasi sebesar Rp.3.333.040.863,- setara dengan 96,38%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya bahan habis pakai.
- 10. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran Rp.24.950.000,-dan realisasi Rp.24.950.000,- setara 100%. Output kegiatan ini adalah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan

- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.35.819.644.240,- dengan realisasi sebesar Rp.33.142.912.527,- atau 92,17% melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan alokasi anggaran sebesar Rp.247.357.100-, dan realisasi sebesar Rp.170.467.100,- setara dengan 68,92%. Output kegiatan ini adalah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.
- 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan alokasi anggaran sebesar Rp.67.756.000-, dan realisasi sebesar Rp.24.137.500,- setara dengan 35,62%. Output kegiatan ini adalah Kesehatan Bayi Baru Lahir.
- 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp.191.269.600,- dan realisasi sebesar Rp.0,- setara dengan 0%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita.
- 4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut dengan alokasi anggaran sebesar Rp.188.244.500,- dan realisasi sebesar Rp.187.944.500,- setara dengan 99,84%. Output kegiatan ini adalah Kesehatan pada Usia Lanjut.
- 5. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.0,- setara dengan 0%. Output kegiatan ini adalah Kesehatan pada Usia Lanjut.
- 6. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.362.550.000,- dan realisasi sebesar Rp.314.575.000,- setara dengan 86,77%. Output kegiatan ini adalah Pelayanan Kesehatan Gizi.
- 7. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.341.770.030,- dan realisasi sebesar Rp.336.372.555,- setara dengan 98,42%. Output kegiatan ini adalah Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
- 8. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.575.794.200,- dan realisasi sebesar Rp.526.959.200,- setara dengan 91,52%. Output kegiatan ini adalah kegiatan Promosi Kesehatan.
- 9. Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.126.850.000,- dan realisasi sebesar Rp.124.966.000,- setara dengan 98,51%. Output kegiatan ini adalah Pengelolaan Surveilans.
- 10. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.028.750.000,- dan realisasi sebesar Rp.916.867.850,- setara dengan 89,12%. Output kegiatan ini adalah jaminan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular.
- 11. Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.242.053.400,- dan realisasi sebesar Rp.16.131.380.840,- setara dengan 93,56%. Output kegiatan ini adalah jaminan Peserta JAMKESMAS.

- 12. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.795.315.994,- dan realisasi sebesar Rp.12.820.259.330,- setara dengan 92,93%. Output kegiatan ini adalah Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas.
- 13. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.070.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.070.000.000,- setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Penyediaan Tenaga Operator.
- 14. Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.639.344.650- dan realisasi sebesar Rp.514.329.162,- setara dengan 80,45%. Output kegiatan ini adalah jumlah Akreditasi Fasilitas Kesehatan.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Capaian indikator program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah Cakupan kualitas Sumber Manusia Kesehatan dengan target tahun 2023 100%. Alokasi anggaran Program ini pada APBD sebesar Rp.21.826.565.755,- dengan realisasi Rp.19.148.563.191,- setara 87,73%

- Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.826.565.755,- dan realisasi sebesar Rp.19.148.563.191,- setara dengan 87,73%.

b. RSUD Trikora Salakan

Pencapaian indikator kinerja pelayanan daerah terhadap penyelenggaran urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan urusan kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut: BOR 24,72 %, BTO 30,81 Kali, TOI 8,92 Kali, ALOS 3,94 Hari, dimana Jumlah Ketersediaan Tempat Tidur di Tahun 2023 adalah 101 Tempat Tidur. RSUD Trikora Salakan telah terakreditasi dengan Sertifikat Akreditas lulus tingkat PARIPURNA dan terakreditasi 100%. Dimana untuk Ketersdiaan Data Sarana mencapai 65,01 %, Data Prasarana 60,47 %, Data Alat Kesehatan 58,71 % dan Kumulasi Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan adalah 62,21 % dan semuanya belum mencapai target 100% di Tahun 2023 sesuai standar.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Alokasi anggaran pada program ini adalah Rp.6.970.941.240,- dengan realisasi sebesar Rp.6.894.733.411,- atau setara dengan 98,91 %

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.6.729.719.860,- dan realisasi Rp.6.729.482.860,- atau setara 99,99 % melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya Rp.309.274.357,- dengan realisasi Rp.309.037.357,- atau setara dengan 99,92%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksanya pembangunan di rumah sakit.
- b. Pengadaan sarana fasilitas pealayanan kesehatan Rp.150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.74.219.701,- atau setara dengan 49,48%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Aplikasi Penggunanan SIMRS di Rumah Sakit.
- c. Pengadaan obat, vaksin Rp.5.805.593.387,- dengan realisasi sebesar Rp.5.805.402.357,- atau setara dengan 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya obat dan BMHP di rumah sakit.
- d. Pengadaan bahan habis pakai Rp.439.902.116,- dengan realisasi sebesar Rp.439.902.116,- atau setara dengan 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan oksigen dan makan minum pasien di rumah sakit.
- e. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Rp.24.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp.24.950.000 atau setara dengan 100%.

- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu Rp.241.221.380 melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- **1.** Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Rp.200.847.630,- dengan realisasi sebesar Rp.200.847.630,- atau setara dengan 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengolahan dan pengangkutan limbah B3 rumah sakit.
- **2.** Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota Rp.40.373.750,-dengan realisasi sebesara Rp.40.373.750,- atau setara dengan 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan akreditasi rumah sakit.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Alokasi anggaran pada program ini adalah Rp.13.309.049.755,- dengan realisasi sebesar Rp.12.033.918.474,- atau setara dengan 90.42 %.

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar Rp.13. 309.049.755,- dengan realisasi sebesar Rp.12.033.918.474,- atau setara dengan 90,42%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa untuk kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.

a. Permasalahan

- 1. Ketersedian sarana dan prasarana di rumah sakit belum memadai.
- 2. Ketersedian alat kesehatan dan alat penunjang lainnya masi kurang.
- 3. Ketersediaan untuk Pengadaan Obat dan BMHP belum tersedia sepenuhnya karena keterbatasan anggaran.
- 4. Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan perlu di tingkatkan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kesehatan.
- 5. Ketersedian Mobiler masi kurang dan harus di adakan karena sebagai salah satu penunjang proses pelayanan

b. Solusi

Untuk tercapainya pelayanan yang ada di rumah sakit maka program dan kegiatan yang ada di rumah sakit perlu penambahan anggaran yang sesuai standar, karena anggaran yang tersedia belum mencukupi kebutuhan yang ada di rumah sakit

3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pencapaian indikator kinerja utama daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Proporsi Panjang Jalan Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik sebesar 37,10% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 36,12%;
- b. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi sebesar 96,18% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 83,12%;
- c. Persentase Penduduk Berakses Air Minum sebesar 89,39% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 87,27%;
- d. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik sebesar 76,11% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 100%;

Indikator kinerja daerah tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Penyelenggaraan Jalan

Capaian pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan adalah Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi. Alokasi anggaran pada APBD murni adalah sebesar Rp.44.827.478.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.50.332.303.600,- dengan realisasi sebesar Rp.47.979.089.884,- atau setara dengan 95,32%.

- Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan,

- dengan alokasi anggaran sebesar Rp.970.492.500,- dan realisasi Rp.959.533.300,- atau setara 98,87%.
- 2. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan. Alokasi Anggaran Rp.380.000.000,-Realisasi sebesar Rp.377.474.000,- atau setara 99,34.
- 3. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan. Alokasi anggaran Rp. 39.413.708.100,- dengan realisasi Rp.37.375.436.484,00,- atau setara 94,83%.
- 4. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan. Alokasi Anggaran Rp. 3.909.400.000,- dengan realisasi Rp.3.710.111.000,00,- atau setara 94,90%.
- 5. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan. Alokasi Anggaran Rp. 2.200.000.000,- dengan realisasi Rp.2.169.976.000,00,- atau setara dengan 98,64%
- 6. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan. Alokasi anggaran Rp. 2.258.703.000,-dengan realisasi Rp.2.225.043.000,00,- atau setara 98,51%
- 7. Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan. Alokasi anggaran Rp. 1.200.000.000, dengan realisasi Rp.1.161.516.100,00,- atau setara dengan 96,79%.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Capaian pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah adalah Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi. Alokasi anggaran Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota pada APBD murni (Tidak Ada) dan pada APBD perubahan sebesar Rp. 203.725.500,- dengan realisasi Rp.184.365.500,00,- dan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman alokasi anggaran Rp. 203.725.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.184.365.500,00,- atau setara 90,50%.

c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Capaian pelaksanaan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi. Alokasi anggaran pada APBD murni adalah sebesar Rp.5.867.300.000, dan pada APBD perubahan menjadi Rp. 10.892.401.930, dengan realisasi sebesar Rp.6.076.569.570,00, atau setara dengan 55,79%.

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan yaitu:
 - 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.787.656.430,- dan realisasi Rp.1.246.816.890,00,- atau setara 69,75%.
 - 2. Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan.

- Alokasi Anggaran Rp. 519.500.000,- dengan realisasi Rp. 489.086.000,00,- atau setara 94,15%.
- 3. Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Alokasi Anggaran Rp. 8.585.245.500,- dengan realisasi Rp.4.340.666.680,00,- atau setara dengan 50,56%.

d. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Cakupan indikator kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yaitu terwujudnya pembangunan irigasi yang berkualitas. Alokasi anggaran untuk program ini pada pada APBD perubahan menjadi Rp.3.869.037.000,- dengan realisasi sebesar Rp.825.223.611 atau setara dengan 98,87%.

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah
 Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.3.203.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.170.296.245,- atau setara 98,89% melalui sub kegiatan :

- 1. Pembangunan Breakwater. Alokasi anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 278.350.000,- atau setara 99,41%
- 2. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.501.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.481.686.245,- atau setara 98,69%
- 3. Normalisasi/Restorasi Sungai. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.421.600.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 1.410.260.000,- atau setara 99,20%.
- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan. Alokasi anggaran Rp. 666.037.000,- dengan realisasi sebesar Rp.654.927.366,- atau setara 98,33%.

Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Permasalahan

Permasalahan dalam pencapaian indicator kinerja pada tahun 2023 ada 2 (dua) indikator kinerja yang tidak memenuhi target kinerja antara lain :

- a. Proporsi Panjang Jalan Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Permasalahannya adalah antara lain :
 - Terdapat penambahan ruas jalan kabupaten berdasarkan SK Jalan Kabupaten dari

- total panjang awal 896,47 KM menjadi 951,735 KM
- Kapasitas Jalan kabupaten masih kurang dan kondisi jalan kabupaten juga kurang baik.
- b. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Permasalahannya adalah antara lain:
 - Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tidak dilaksanakan keseluruhan 12 daerah irigasi

b. Solusi

- 1. Peningkatan jalan kabupaten
- 2. Mengoptimalkan kondisi jaringan irigasi yang ada
- 3. Mengusulkan kembali operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di seluruh Daerah Irigas (D.I) di Tahun 2023
- 4. Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan Koordinasi baik ditingkat daerah maupun pusat untuk penyediaan anggaran guna mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Penataan Ruang.

4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pencapaian indikator kinerja utama daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagaiberikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

a. Program Pengembangan Perumahan

Capaian indikator Program Pengembangan Perumahan yaitu Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota Biaya. Alokasi anggaran pada Program ini yaitu Rp. 281.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 261.116.000,- atau setara dengan 92,76%.

- Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Kegiatan dilaksanakan dengan Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.281.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 261.116.000,- atau setara dengan 92,76%. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota.

b. Program Kawasan Pemukiman

Capaian indikator program Program Kawasan Pemukiman pada Kegiatan Penataan Dan Peningkatan kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha yaitu Tercapainya Jumlah Penyadaran Publik Tentang Pencegahan Tumbu dan Berkembangnya Pemukiman kumuh. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 834.081.615,-dengan realisasi sebesar Rp.794.565.522,- atau setara 89,97%

- Kegiatan Penataan Dan Peningkatan kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebesar Rp.576.025.000,- dengan realisasi sebesar Rp.569.133.000,- atau setara dengan 98,80%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Biaya Survei dan Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman kumuh.
- 2. Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan bidang PKP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 258.056.615,- dengan realisasi sebesar Rp.222.282.647,- atau setara dengan 86,14%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Biaya Penyusunan Rencana Pencegahan Perumahan Kumuh.

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.069.875,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.149.875,- atau setara dengan 6,42%. Output kegiatan ini adalah Tercapainya Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Capaian indikator Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum yaitu Jumlah Biaya Penyedian Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian. Alokasi anggaran pada Program ini yaitu Rp.3.788.650.000,-dengan realisasi sebesarRp.3.497.091.200,- atau setara dengan 92,30%.

- Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Penyedian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.788.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.497.091.200,- atau setara dengan 92,30%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Biaya Penyedian Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian.

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Masih terdapatnya kawasan permukiman kumuh.

b. Solusi

Meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui penataan dan pembangunan kualitas permukiman kumuh dengan cara penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan dan permukiman kumuh setelah ditetapkan SK kawasan kumuh kemudian dilakukan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh serta pencegahan perumahan dan permukiman kumuh melalui penyuluhan kualitas lingkungan sehat perumahan dan permukiman.

5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh 3 (tiga) instansi yaitu:

- 1. Badan Kesatuan Bangsa dan politik
- 2. Satuan Polisi Pamong Praja
- 3. Badan penanggulangan Bencana Daerah
- 4. Dinas Sosial

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tahun 2023 adalah sebagai berikut: cakupan petugas perlindungan masyarakat sebanyak 1239 orang dari targetyang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 1239; presentase penegakan Perda sebesar 33,33% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%; Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) 100% kegiatan dengan target yang ditetapkan sebesar 3 kegiatan; Indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui program kegiatan sebagai berikut:

Indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui program kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa

Capaian indikator Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yaitu Terpenuhinya Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Pemantapan Ideologi bangsa. Alokasi anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yaitu Terpenuhinya Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Pemantapan Ideologi bangsa pada APBD murni adalah sebesar Rp.120.000.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.636.890.450,- dengan realisasi Rp.636.207.950,- atau setara 99,89%.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan APBD murni sebesar Rp.120.000.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.636.890.450,- dengan realisasi sebesar Rp.636.207.950,- atau setara 99,89%. Output sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional dan Pemantapan Ideologi serta terlaksananya paskibraka.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Capaian indikator kinerja program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Politik, dan Partai Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan yaitu cakupan Peningkatan Pelayanan Administrasi di Bidang Politik. Alokasi anggaran program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan pada APBD murni adalah sebesar Rp.871.347.933- dan pada APBDP sebesar Rp.17.071.347.433,- dengan realisasi Rp.3.916.874.433,- atau setara 22,94%.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan situasi politik.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik adalah APBD murni sebesar Rp.871.347.933,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.17.071.347.433,- dengan realisasi sebesar Rp.3.916.874.433,- atau setara 22,95%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, KPU, Bawaslu, TNI dan Polri.

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Capaian indikator kinerja program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah Meningkatnya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Alokasi anggaran program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya pada APBD murni adalah sebesar Rp.100.000.000,- dan pada APBD Perubahan sebesar Rp.134.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp.133.940.000,- atau setara 99,33%.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Alokasi anggaran pada APBD murni sebesar Rp.100.000.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.134.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp.133.940.000,- atau setara 98,33%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB) serta Pemantauan Penyakit Masyarakat dan Penyimpangan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Capaian indikator kinerja Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial adalah Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Alokasi anggaran program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial pada APBD murni adalah sebesar Rp.270.893.825,- dan pada APBDP sebesar Rp.290.843.825,- dengan realisasi Rp.280.583.825,- atau setara 96,47%.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Alokasi anggaran pada APBD murni sebesar Rp.270.893.825,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.290.843.825,- dengan realisasi sebesar Rp.280.583.825,- atau setara 96,47%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Pemantauan Orang Asing, Lembaga Asing, Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan keamanan wilayah serta Terlaksananya Rapat Forkopimda

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa realisasi anggarannya sangat baik yaitu 99,89%. Namun dengan anggaran yang ada masih ada kegiatan-kegiatan yang tidak maksimal dilaksanakan khususnya pada pelaksanaan kegiatan paskibraka seperti makan minum kegiatan, honorarium dan perlengkapan paskibraka.

- 2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan situasi politik realisasi anggarannya sangat kurang yaitu 22,95%. Hal ini disebabkan karena belanja Hibah bantuan Keuangan ke KPU, TNI dan Polri tidak dapat dicairkan tahun ini karena belum lengkapnya dokumen administrasi pencairan dana hibah tersebut.
- 3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya realisasi anggarannya sangat baik yaitu 98,58%. Namun dengan anggaran yang ada masih ada kegiatan-kegiatan yang tidak maksimal dilaksanakan khususnya pada pelaksanaan kegiatan FKUB dan Narkoba.
- 4. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial realisasi anggarannya sangat baik yaitu 96,47%. Namun dengan anggaran yang ada masih ada kegiatan-kegiatan yang tidak maksimal dilaksanakan khususnya pada pelaksanaan Rapat Forkopimda dan Pemantauan ATHG.

b. Solusi

Kiranya dapat ditambahkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kedepannya.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tahun 2023 adalah sebagai berikut : Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sejumlah 12 bulan atau 80% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 selama 12 bulan; Cakupan Penegakan Perda sejumlah 8 Perda atau setara 33,33% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sejumlah 24 Perda; Cakupan petugas Linmas sejumlah 1.239 personil atau 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sejumlah 1.239 personil;

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Capaian indikator kinerja Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yaitu cakupan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan capaian pada tahun 2023 yaitu 84,09% yakni tidak mencapai target yang telah ditentukan. Alokasi anggaran untuk program ini pada APBD sebesar Rp.737.400.00,00- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.1.068.078.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.029.861.354,- atau setara dengan 96,42 %.

- Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah dengan alokasi anggaran Rp.423.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.415.260.000,- atau setara 97,96%. Output kegiatan ini adalah Terciptanya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- 2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia Rp.402.360.000,- dengan realisasi sebesar Rp.291.565.000,- atau setara dengan 72,46%. Output kegiatan Terlaksananya Bimbingan Teknis Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS).

- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota dengan alokasi anggaran Rp.241.818.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.226.134.800,- atau setara dengan 93,51% dan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Output Terlaksananya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

Capaian indikator kinerja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran pada Kegiatan Pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Bencana Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota yaitu Cakupan Penanganan Bahan Berbahaya dan Bencana Kebakaran dengan capaian pada tahun 2023 yaitu 84,11% yakni tidak mencapai target yang telah ditentukan. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.103.200.000,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.62.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp.52.520.000,- atau setara dengan 84,11%.

- Kegiatan Pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Bencana Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Sub kegiatan Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kebupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp.62.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp.52.520.000,- atau setara dengan 84,11%. Output Tersedianya Peta Rawan Kebakaran.

a. Permasalahan

- 1. Penanganan pelanggaran Perda dan Perkada perlu ditingkatkan
- 2. Usulan kebutuhan Diklat Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) sudah terpenuhi di tahun 2023, diharapkan dapat meningkatkan penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada belum maksimal.
- 3. Alokasi Kegiatan patroli pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum belum maksimal sehingga diharapkan kedepannya akan lebih baik.
- 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3).
- 5. Minimnya jumlah anggota yang memiliki SDM (belum mengikuti diklat) sehingga kurang maksimalnya pelaksanaan opersional dan penertiban.

- 6. Perlu ditingkatkan koordinasi dan dukungan serta rencana terpadu penegakan Perda dengan Dinas/Instansi terkait.
- 7. Belum tersedianya Sub Program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM dan Sub Program Kegiatan Penegakan Non Yustisial dan Yustisial terhadap pelaku Pelangaran Perda, sehingga berdampak pada pemenuhan HAM.
- 8. Perlu ditingkatkan komitmen dan koordinasi dalam penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sebagaimana jadwal (Action Plan)
- 9. Perlu adanya penambahan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran atau mobil Pemadam Kebakaran.
- 10. Waktu tanggap (Respon Time) perlu ditingkatkan.

b. Solusi

Dalam penanganan urusan Tibum Tranmas, pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana, harapan kedepannya pemerintah daerah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk urusan Tibum Tranmas dan Pemadam Kebakaran yang menjadi urusan Dasar Pemerintah Daerah, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Program Penanggulangan Bencana

Cakupan indikator Program Penanggulangan Bencana pada Program Penanggulangan Bencana yaitu cakupan penyelenggaraan program penanggulangan bencana dengan capaian 100% target capaian pada tahun 2023. Alokasi anggaran program ini adalah sebesar Rp.2.344.800.000.00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.300.361.813,- atau setara dengan 98,10%.

- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 2.094.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.063.841.813,- melalui sub kegiatan sebagai berikut:

- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana alokasi anggaran sebesar Rp.1.105.200.000.00,- dan realisasi sebesar Rp.1.101.800.000,- atau setara 99,69%
- 2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Alokasi anggaran sebesar Rp.421.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.419.818.000,- atau setara dengan 99,72%. Output kegiatan ini adalah Jumlah yang mengikuti pelatihan yang direncanakan.
- 3. Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.78.728.813,- atausetara 98,41%. Output kegiatan ini adalah dukungan fasilitas penanggulangan bencana.
- 4. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.488.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.463.495.000,- atau setara 94,86%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Secara Menyuluh Kapasitas Tim Reaksi Cepat.

- Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.236.520.000.000,- atau 94,61% melalui sub kegiatan :

- 1. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 37.100.000,- atau setara 74,20%
- 2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran Rp.200.000.000,- dengan realisasi Rp.199.420.000,- atau 99,71%.

6. BIDANG URUSAN SOSIAL

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan pemerintahan bidang sosial tahun 2023 sebagai berikut :

- Cakupan Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT Desa Tilani) yang mendapatkan Bansos Uang Tunai Bidang Kesehatan (Pembangunan Jamban Keluarga) sejumlah 12 KK atau 100% dari target yang ditetapkan sejumlah 12 KK;
- 2. Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang memperoleh Peningkatan Kapasitasnya sejumlah 1 Lembaga atau 100% dari target yang ditetapkan sejumlah 1 Lembaga;
- 3. Cakupan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial yang mendapatkan Jaminan Hidup dan Kebutuhan Dasarnya sejumlah 25 orang atau 100% dari target yang ditetapkan sejumlah 25 orang;
- Cakupan Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial yang mendapatkan Bimbingan Sosial sejumlah 25 Orang atau 100% dari target yang ditetapkan sejumlah 25 Orang;
- 5. Cakupan Penyandang Sosial di Luar panti yang mendapatkan jaminan Hidup dan Kebutuhan Dasarnya sejumlah 100 Orang atau 100 % dari target yang ditetapkan sejumlah 100 Orang;
- 6. Cakupan Penyandang Disabilitas di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Bimbingan Fisik mental, Spiritual dan Sosial sejumlah 25 Orang atau setara 100% dari target yang ditetapkan sejumlah 25 Orang;
- 7. Cakupan Penyandang Disabilitas di Luar panti yang mendapatkan Bantuan Sosial Alat Bantu sejumlah 5 Orang atau setara 100% dari target yang ditetapkan sejumlah 5 Orang;
- 8. Cakupan Penyandang Disabilitas dan Anak PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Uang Tunai sejumlah 66 Orang atau setara 86,84% dari target yang ditetapkan 76 Orang;
- 9. Cakupan Penyandang Disabilitas di Luar panti yang mendapatkan Bantuan Sosial Biaya Transportasi Pelatihan sejumlah 2 Orang atau setara 100% dari target yang ditetapkan sejumlah 2 Orang;
- 10. Cakupan Keluarga PMKS di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Bimbingan Sosial sejumlah 120 Orang atau setara 100% dari target sejumlah 120 Orang;

- 11. Cakupan PMKS/Pasien yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesehatan /Penggantian Biaya Donor Darah sejumlah 61 Orang atau setara 100% dari target sejumlah 61 Orang;
- 12. Cakupan PMKS /Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mendapatkan Bantuan Transportasi rawat jalan sejumlah 10 Orang atau setara 100% dari target sejumlah
- 13. Cakupan Lansia Non Potensial yang memperoleh Bansos Uang Tunai sejumlah 421 Orang atau setara 96% dari target sejumlah 438 Orang;
- 14. Cakupan Keluarga yang Memperoleh Bansos Santunan Kematian sejumlah 200 KK atau setara 100% dari target sejumlah 200 KK;
- 15. Cakupan Masyarakat Miskin dan PMKS Lainnya yang Memperoleh Bantuan Sosial Uang Tunai untuk Pengembangan Usaha/Ekonomi sejumlah 349 KK atau setara 98,59% dari target yang ditetapkan sejumlah 354 KK.
- 16. Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Layanan Pengaduan Bencana sejumlah 134 Orang atau setara 100% dari target yang ditetapkan sejumlah 134 Orang.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Dinas Sosial

a. Program Pemberdayaan Sosial

Capaian indikator pada Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian 100% atau sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran untuk program ini pada APBD murni adalah sebesar Rp.30.000.000,-dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.230.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.229.600.000,- atau setara dengan 99,83%.

- Kegiatan Pemberdayaan Sosial Kumunitas Adat Terpencil (KAT)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- atau setara 100%.

- Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota alokasi anggaran sebesar Rp.29.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,- atau setara dengan 98,67%. Output kegiatan ini adalah Terpenuhinya SDM bagi PSKS (Karang Taruna) serta monitoring dan evaluasi

b. Program Rehabilitasi Sosial

Capaian indikator kinerja program Rehabilitasi Sosial pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandang Pengemis Di Luar Panti Sosial yaitu cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan capaian 99,58%. atau sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran untuk program ini pada APBD murni adalah sebesar Rp.339.963950,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.779.963.950,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.776.680.950- atau setara 99,58%.

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
 Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandang Pengemis di Luar Panti Sosial
 Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan. Alokasi anggaran sebesar Rp.235.772.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.235.737.500,- atau setara 99,98%. Terpenuhinya kebutuhan dasar makanan bagi penyandang disabilitas serta anak terlantar yang tertangani.
 - 2. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang. Alokasi anggaran sebesar Rp.104.191.450,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.104.191.450,- atau setara 100%. Terpenuhinya kebutuhan dasar sandang bagi penyandang disabilitas serta anak terlantar yang tertangani.
 - 3. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat. Alokasi anggaran Rp.150.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.148.640.000,- atau setara dengan 99,09%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPSA

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dengan alokasi anggaran Rp.50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- atau setara 100%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat keluarga PMKS.
- Sub Kegiatan Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dengan alokasi anggaran Rp.240.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.238.112.000,- atau setara 99,21%. Output kegiatan ini adalah dapat tertanganinya jaminan kesehatan dasar masyarakat PMKS.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Capaian indikator kinerja program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yaitu cakupan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian 98,34% atau sesuai target yang telah

ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.1.841.725.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.2.900.725.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.852.713.984,- atau setara dengan 98,34%

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.918.725.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.899.793.984,- atau setara dengan 97,94%. Output sub kegiatan ini adalah dapat tertaganinya masyarakat miskin dalam DTKS di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.982.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.952.920.000,- atau setara dengan 98,53%. Output sub kegiatan ini adalah Terbantunya Masyarakat yang berduka, Masyarakat yang Mengalami Masalah Kesehatan dan PMKS Lainnya dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat .

d. Program Penanganan Bencana

Capaian indikator kinerja program Program Penanganan Bencana pada Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/ Kota yaitu cakupan penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/ Kota dengan capaian 96,14%. atau sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.50.652.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.64.652.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.62.162.000,- atau setara dengan 96,14%.

- Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/ Kota Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Penyediaan Makanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.652.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.62.162.000,- atau setara dengan 96,14% Output sub kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan korban bencana alam.

Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial

- a. Permasalahan
 - 1. Indikator kinerja daerah untuk urusan sosial belum maksimal tercapai dikarenakan keterbatasan anggaran APBD yang dialokasikan.
- b. Solusi
 - 1. Mengalokasikan dan mengfokuskan anggaran untuk pencapaianindikator kinerja sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

3.1.2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. BIDANG URUSAN TENAGA KERJA

Pencapaian indikator kinerja daerah untuk urusan ketenagakerjaan tahun 2023 sebagai berikut;

- Cakupan proses perluasan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi berjumlah 16 atau 100% dari target yang di tetapkan berjumlah 16 orang;
- Cakupan tenaga kerja yang diberdayakan melalui perluasan kesempatan kerja berjumlah 80 atau 100% dari target yang ditetapkan berjumlah 80 orang;
- Cakupan pelaksanaan jaminan social berjumlah 1.600 atau 100% dari target yang ditetapkan berjumlah 1600 orang.
- Indikator kinerja tersebut dapat dicapai melalui pelaksaan program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Capaian Indikator kinerja program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dilaksanakan melalui kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dengan sub kegiatan proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klister kompetensi yang cakupanannya berjumlah 16 orang atau 100% dari target yang ditetapkan berjumlah 16 orang dengan Alokasi Anggaran berjumlah Rp.180.000.000 realisasinya sebesar Rp.179.000.000 atau 99,94 % pada Tahun 2023.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Capaian Program penempatan tenaga kerja dilakukan melalui kegiatan pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan perluasan kesempatan kerja yang cakupannya 80 orang atau 100 % dari target yang ditetapkan 80 orang dengan alokasi anggaran berjumlah Rp.200.000.000 realisasinya sebesar Rp.200.000.000 atau 100 %.

c. Program Hubungan Industrial

Program Hubungan Industrial melalui kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan pengemabangan pelaksanaan jaminan social tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja yang cakupannya 1.600 orang atau 100% dari target yang ditetapkan 1.600 orang dengan alokasi anggaran Rp.256.300.600, realisasinya Rp. 239.321.380 atau 93,38 %.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

- Terbatasnya ketersediaan instruktur
- Terbatasnya jumlah pencari kerja yang mendapat kesempatan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja.

- Terbatasnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja pengangguran.
- Alokasi anggaran pembayaran JJK dan JKM ditahun 2023 untuk 1.600 orang dibayarkan selama 10 bulan dari 1 Tahun Anggaran, sehinggan pemerintah daerah terhutang selama 2 Bulan.
- Belum memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan seebagai bentuk jaminan perlindungan social bagi Masyarakat miskin

b. Solusi

- Menambah jumlah kuota peserta pelatihan
- Perlunya Penambahan Instruktur dengan menyediakan alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan pelatihan instruktur.
- Menciptakan lapangan kerja baru melalui program kegiatan bidang ketenagakerjaan antara lain padat karya, kewirausahaan, dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
- Meningkatkan kemitraan dengan Lembaga-lembaga swasta
- Ditahun 2024 perlunya dialokasikan anggaran pembayaran sisa hutang/tagihan selama 2 bulan di tahun 2023
- Perlunya mengalokasikan anggaran untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Masyarakat miskin.
- Perlunya meningkatkan partisipasi Masyarakat dengan melakukan sosialisasi.

2. BIDANG URUSAN PANGAN

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan pangan tahun 2023. Cakupan Cadangan Pangan Daerah berjumlah 4.600 ton atau 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sejumlah 4.600 ton; Cakupan Pekarangan secara terpadu menuju keragaman dan kebutuhan pangan keluarga dengan capaian presentase 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 100%; Cakupan data SKPG Data FSVA, Kartu Akses Pangan (KAP_RT) dengan capaian presentase sebesar 100% dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 100%. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Dinas Ketahanan Pangan

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Capaian indikator kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri dari 2 kegiatan pendukung; Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pelaksanaan Percepatan Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi. Program ini alokasikan anggaran melalui APBD II sebesar Rp.1.170.656.000,- dengan realisasi total anggaran program sebesar Rp.1.167.636.000,- atau setara dengan 99,74%.

- Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota, dengan alokasi Rp.1.050.656.000,- realisasi sebesar Rp.1.047.796.000,- atau setara dengan 99,73%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Pasokan yang direncanakan,, yaitu sebanyak 10 Ton Cadangan Pangan Pemerintah yang disediakan.

- Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dengan alokasi anggaran Rp.120.000.000,- realisasi sebesar Rp.119.840.000,- atau setara dengan 99,87%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Pangan Lokal yang Dipromosikan dan Jumlah Kelompok Penerima Manfaat Pekarangan. Yaitu sebanyak 13 Kegiatan/Kelompok.

Permasalahan dan Solusi Urusan Pangan

a. Permasalahan

- 1. Ketergantungan pada bahan pangan pokok beras menyebabkan menurunya minat konsumsi bahan pangan lokal dikalangan masyarakat.
- 2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi yang aman bagi keluarga.

b. Solusi

- B. Melaksanakan promosi dan menciptakan menu-menu konsumsi yang menarik dan berkualitas berbahan baku pangan lokal.
- C. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi yang aman bagi keluarga.

3. BIDANG URUSAN PERTANAHAN

Pencapaian Indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2023 adalah Cakupan Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh target berjumlah 12 unit Rumah atau 100% dari target pada DPA Murni yang ditetapkan pada Tahun 2023, setelah terkena E Marking pada DPPA perubahan telah berubah menjadi 0 rumah atau 0%; Cakupan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian sejumlah 1 Kegiatan atau 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sejumlah 1 Kegiatan; Cakupan Penatagunaan tanah berjumlah 1 kegiatan atau 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sejumlah 1 kegiatan atau 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sejumlah 1 kegiatan.

Indikator kinerja yang dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

a. Program Penyelesaian Sengketa tanah Garapan

Capaian indikator kinerja Program Penyelesaian Sengketa tanah Garapan yaitu presentase luas tanah bersertifikat dengan capaian 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran pada program ini sebesar Rp.152.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.150.754.800,- atau setara dengan 98,86%.

- Kegiatan Penyelesaian Sengketa tanah garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.152.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.150.754.800,- atau setara dengan 98,86%. Output Kegiatan Ini adalah Tercapainya Jumlah sertifikat kepemilikan tanah aset daerah.

b. Program Penatagunaan Tanah

Capaian indikator kinerja Program Penata Gunaan Tanah yaitu presentase Luas Tanah dengan capaian 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran pada program ini sebesar Rp.230.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.229.998.400- atau setara dengan 99,99%.

- Kegiatan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan tanah, dengan Alokasi anggaran pada program ini sebesar Rp.230.00.000,- dan realisasi sebesar Rp.229.998.400,- atau setara dengan 99,99%. Output Kegiatan Ini adalah Tercapainya jumlah pengadaan Tanah Yang di rencanakan.

Permasalahan dan Solusi Urusan Pertanahan

- a. Permasalahan
 - 1. Masih kurangnya ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- b. Solusi
 - 1. Meningkatkan inventarisasi dan layanan ganti rugi tanah untuk pembangunan.

4. BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan lingkungan hidup tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Hasil pengukuran indeks kualitas air tahun 2023 sebesar 70,00 dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 68.50;
- 2. Hasil pengukuran indeks kualitas udara tahun 2023 sebesar 93,15 dari target yang telah ditetapkan tahun 2023 sebesar 94,50;

- 3. Hasil pengukuran indeks kualitas lahan tahun 2023 sebesar 45,67 dari target yang telah ditetapkan tahun 2023 sebesar 68,50;
- 4. Persentase Sampah yang terkelola tahun 2023 sebesar 27,78 % dari target yang telah ditetapkan tahun 2023 sebesar 40,00%
- 5. Peningkatan persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2023 sebesar 93,10% dari target yang telah ditetapkan tahun 2023 sebesar 35,00%;
- 6. Terselenggaranya KLHS untuk K / R / P tingkat kabupaten tahun 2023 sebesar 1 Dokumen dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 1 dokumen.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui 3 (Tiga) program.

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Dinas Lingkungan Hidup

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 95,18% atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada APBD murni sebesar Rp.2.485.107.175,-dan pada APBD perubahan menjadi Rp.2.525.000.409,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.437.898.812,-,- atau setara dengan 96,55%.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan Alokasi anggaran pada APBD murni sebesar Rp.1.253.364.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.1.205.147.234,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.171.407.795,- atau setara dengan 97,20%. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya gaji dan tunj. ASN.
- 2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan Alokasi anggaran pada APBD murni sebesar Rp.599.362.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.564.172.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.528.867.128,- atau setara dengan 93,74%. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Alokasi anggaran pada APBD murni sebesar Rp.55.048.900,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.55.048.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.54.199.400,- atau setara dengan 98,46%. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disedikan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan Alokasi anggaran pada APBD murni sebesar Rp.39.977.600,- dan pada APBD perubahan menjadi

- Rp.39.977.600,- dengan realisasi Rp.39.977.600,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya paket bahan logistik kantor yang disediakan.
- 3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan Alokasi anggaran pada APBD murni sebesar Rp.10.000.000,- dan pada APBDP menjadi Rp.10.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.
- 4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan, dengan Alokasi anggaran pada APBD murni Rp.12.000.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.12.000.000,- dengan realisasi Rp.12.000.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah tercapainya dokumen bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan.
- 5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan Alokasi anggaran pada APBD murni sebesar Rp.100.000.000,- dan pada APBDP menjadi Rp.197.540.000,- dengan realisasi sebesar Rp.185.686.714,- atau setara 94,00%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi kegiatan bagian tata pemerintahan.

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan Alokasi anggaran pada APBD murni sebesar Rp.3.996.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.3.996.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.996.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa surat menyurat.
- 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan Alokasi anggaran pada APBD murni sebesar Rp.38.567.675,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.23.567.675,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.22.142.675,- atau setara dengan 93,95%. Output kegiatan ini adalah tercapainya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
- 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan Alokasi anggaran pada APBD murni sebesar Rp.318.080.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.358.840.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.357.940.000,- atau setara dengan 99,75%. Output kegiatan ini adalah meningkatnya kesejahteraan aparatur.

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan, dengan Alokasi anggaran pada APBD murni sebesar Rp.13.551.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.13.551.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.551.000,- atau setara dengan 100,00%. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan Alokasi anggaran pada APBD murni sebesar Rp.38.160.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.38.160.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.35.130.500,- atau setara dengan 92,06%. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional lapangan.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan Alokasi anggaran pada APBD murni sebesar Rp.3.000.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.3.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya pemeliharaan peralatan mesin.

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja Program Perencanaan Lingkungan Hidup melalui kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yaitu Cakupan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan capaian 98,74%. Alokasi anggaran Program Perencanaan Lingkungan Hidup pada APBD murni sebesar Rp.0,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.325.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.320.919.000,- atau setara dengan 98,74%.

- Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RP.JPD/RP.JMD, dengan Alokasi anggaran pada APBD murni sebesar Rp.0,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.325.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.320.919.000,- atau setara dengan 98,74%. Output kegiatan ini tersedianya dokumen klhs Rp.jpd kabupaten/kota yang disusun.

c. Program Pengelolaan Persampahan

Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Persampahan yaitu Cakupan Program Pengelolaan Persampahan dengan capaian 98,64% atau mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran untuk untuk mendukung program ini pada APBD murni sebesar Rp.1.641.874.860,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.1.641.874.860,- dengan realisasi sebesar Rp.1.641.612.500,- atau setara dengan 99,98%.

- Kegiatan Pengelolaan Sampah.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran untuk untuk mendukung program ini pada APBD murni sebesar Rp.1.641.874.860,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.1.641.874.860,- dengan realisasi sebesar Rp.1.641.612.500,- atau setara dengan

99,98%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir sampah di tpa/tpst/spa kabupaten/kota.

Permasalahan dan Solusi Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan

- 1. IKLH Kab. Banggai Kepulauan tidak mencapai target pada tahun 2023 terutama pada Indeks Kualitas Lahan (IKL) dikarenakan lajunya pembukaan lahan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
- 2. Laboratorium Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan belum ter akreditasi.
- 3. Pengelolaan sampah belum maksimal dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana seperti personul, tong sampah, mobil/truck pengangkut dan pengolahan sampah di TPA masih system open damping, serta bank- bank sampah yang telah dibentuk belum berjalan dengan baik.
- 4. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelayanan persampahan belum mencapai target yang diterapkan.

Solusi

- 1. Untuk meningkatkan nilai IKLH Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibentuk Forum Pengelolaan Karst Kabupaten Banggai Kepulauan yang melibatkan berbagai instansi terkait, dan diharapkan instansi teknis terkait dapat meningkatkan intervensinya guna peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 2. Perlunya peningkatan kualitas SDM pengelola laboratorium lingkungan serta sarana dan prasarana penunjang sesuai standar, apabila sudah ter akreditasi pengujian sampel tidak perlu lagi ke luar daerah sehingga dapat menghemat biaya serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui jasa pelayanan laboratorium lingkungan.
- 3. Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah perlu di tambah guna mendukung pengelolaan sampah yang lebih optimal serta memberikan sosialisasi, pelatihan kepada masyarakat dalam pengolahan sampah.
- 4. Menambah sarana dan prasarana serta personil persampahan guna menambah jangkauan serta jumlah pelanggan pelayanan persampahan.

5. BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 yaitu: Cakupan Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 100%; Cakupan Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Anak sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 100%. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

a. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.100.000.000, dan padaAPBD perubahan menjadi Rp.100.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- atau setara dengan 100%.

- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran Rp.100.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender kewenangan kabupaten/kota.

b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.0, dan padaAPBD perubahan menjadi Rp.1.000.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.672.140.000,- atau setara dengan 1 Kegiatan.

Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Kelaurga Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran Rp.1.000.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.672.140.000- atau setara dengan 67,21%. Output kegiatan ini adalah Menurunnya Angka Stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan.

c. Program Perlindungan Perempuan

Alokasi anggaran program dan Kegiatan ini pada APBD murni sebesar Rp.106.625.000, dan pada APBD perubahan menjadi Rp.106.625.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.103.215.000,- atau setara dengan 96.80%.

- Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota Alokasi anggaran Rp.46.075.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.45.325.000,- atau setara dengan 98.37%. Output kegiatan ini adalah Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan.

- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran Rp.60.550.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.57.890.000,- atau setara dengan 95.61%. Output kegiatan ini adalah Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan.

c. Program Perlindungan Khusus Anak

Alokasi anggaran program dan Kegiatan ini pada APBD murni sebesar Rp.332.175,000 dan padaAPBD perubahan menjadi Rp.332.175.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.295.718.856.000,- atau setara dengan 89.03%.

- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran Rp.63.625.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.42.225.000,- atau setara dengan 66.37%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran Rp.193.954.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.185.085.800.000,- atau setara dengan 95.43%. Output kegiatan ini adalah Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Anak.

- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran Rp.74.596.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.68.408.056,- atau setara dengan 91.71%. Output kegiatan ini adalah Alat Tulis Kantor dan Penggandaan

c. Program Pemenuhan Hak Anak

Alokasi anggaran program dan Kegiatan ini pada APBD murni sebesar Rp.0 dan pada APBD perubahan menjadi Rp.90.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.90.000.000,- atau setara dengan 100%.

- Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran Rp.60.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 59.700.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

- Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran Rp.30.000.000,-dengan realisasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Meningkatnya Nilai Indikator Kabupaten Layak Anak.

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1. Pelayanan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak belum maksimal dikarenakan tidak ada Petugas Terlatih.
- 2. Layanan Rehabilitasi Sosial belum maksimal karena tidak ada Petugas khusus Rehabilitasi Sosial

b. Solusi

- Memberikan anggaran untuk Pelatihan khusus pelayanan pada pengaduan serta penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak agar mendapatkan Petugas Terlatih.
- 2. Memberikan Anggaran untuk Pelatihan Petugas khusus Rehabilitasi Sosial untuk Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

6. BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan komunikasi dan informatika yaitu cakupan layanan telekomunikasi dengan rasio capaian 0,21 dari target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 0,42 atau telah melebihi dari target yang ditetapkan pada RPJMD. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.2.374.87.400,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.2.424.872.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.422.359.371,- atau setara dengan 99,90%

- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan alokasi anggaran Rp.2.424.872.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.422.359.371,- atau setara dengan 99,90%. Output Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang direncanakan.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

- 1. Layanan Bandwitch Internet Dedicated 400 MBpS dianggarkan sebesar Rp.1.260.606.498,. Dengan kecepatan internet 400 MBpS tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan akses internet yang dibuthkan oleh perangkat daerah.
- 2. Sekitar 20% Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan belum terlayani jaringan telekomunikasi.

b. Solusi

- 1. Untuk bisa melayani semua OPD terhadap layanan Bandwicth Internet Dedicated membutuhkan penambahan Bandwitch dan perangkat agar memaksimalkan akses layanan internet.
- 2. Perlunya Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal ini Dinas Kominfo berupaya berkoordinasi dengan pihak Kementerian Telekomunikasi dan Informatika RI untuk bisa difasilitasi infrastruktur telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi.

7. BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATAAN SIPIL

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Program Pendaftaran Penduduk

Capaian indikator kinerja Program Pendaftaran Penduduk pada Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yaitu cakupan penataan administrasi kependudukan dengan capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.550.000.000,- serta pada APBD Perubahan (Tambahan SiLPA DAK Non Fisik) menjadi Rp.581.571.159,- dan realisasi sebesar Rp.576.571.000,- atau setara 99,14%.

- Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.581.571.159,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.576.571.000,- atau setara dengan 99,14%. Output kegiatan ini adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan.

b. Program Pencatatan Sipil

Capaian indikator kinerja Program Pencatatan Sipil pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yaitu Laporan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil dengan capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.0,- pada APBD Perubahan menjadi Rp.45.448.000,- dan realisasi sebesar Rp.44.561.120,- atau setara 98,05%.

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan
Sipil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.448.000,- dan realisasi anggaran
sebesar Rp.44.561.120,- atau setara dengan 98,05%. Output kegiatan ini adalah

Permasalahan dan Solusi Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Permasalahan

- 1. Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai apalagi dalam hal jaringan komunikasi sehingga perlu pengadaan sarana dan prasarana yang lebih representatif.
- 2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan

b. Solusi

- 1. Pemenuhan sarana yang memadai serta Prasarana dalam hal Rehabilitasi dan revitalisasi bangunan kantor agar lebih representatif untuk menampung arsip- arsip dokumen kependudukan yang terus bertambah setiap tahun.
- 2. Perlu dilakukannya Sosialisasi serta Bimbingan kepada Aparat serta Masyarakat akan pemahaman tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan

8. BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil.

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2023 adalah terselenggaranya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar Rp.2.274.639.600,-dengan realisasi sebesar Rp.1.894.875.245,- melalui program Administrasi Pemerintahaan Desa, kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Sub kegiatan pada Kegiatan ini meliputi Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Capaian indikator kinerja program Program Administrasi Pemerintahan Desa yaitu cakupan pembinaan dan pengawasan Administrasi Desa. Alokasi anggaran program ini pada APBD perubahan menjadi Rp.2.274.639.600,- dengan realisasi sebesar Rp.1.894.875.245,- atau 83,30%.

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Alokasi Anggaran Rp.1.725.600.000,- terealisasi sebesar Rp.1.476.458.044,- atau sebesar 85,56%.
- 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahaan. Alokasi Rp.420.895.600,- terealisasi sebesar Rp.326.792.300,- atau sebesar 77,64%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan Lomba Desa.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa. Alokasi Anggaran Rp.77.694.500,- terealisasi Rp.48.534.500,- atau sebesar 62,47%. Output kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa.
- 4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Alokasi Alokasi Anggaran Rp.50.449.500,- terealisasi sebesar Rp.43.090.401,- atau sebesar 85,41%. Output Kegiatan ini adalah Terlaksananya Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa.

b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Capaian indikator kinerja program Program Administrasi Pemerintahan Desa yaitu cakupan Jumlah Lembaga Masyarakat yang diberdayakan. Alokasi anggaran program ini pada APBD Tahun 2023 Rp.669.999.840,- dengan realisasi sebesar Rp.624.785.464,- atau 93,25%.

 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat, hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Alokasi anggaran program ini pada APBD Tahun 2023 Rp.669.999.840,- dengan realisasi sebesar Rp.624.785.464,- atau 93,25%. Output Kegiatan ini adalah Terlaksananya Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa. Jumlah Lembaga Masyarakat yang diberdayakan

9. BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2023 adalah laju pertumbuhan penduduk 0,94% dengan target 0,40; presentase penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 65.09% dengan target 75%; presentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontasepsi 10,33% dengan target 100%; cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 92.69% dengan target 100%; Total fertilitas rate (TFR) 2,65% dengan target 1,60%; Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB 95,1% dengan target 100%; Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB 91,7% dengan target 97%; Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) 8,8% dengan target 80%. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & KB

a. Program Pengendalian Penduduk

Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.222.600.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.222.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.222.600.000,- atau setara dengan 100%.

- Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran kegiatan ini pada APBD murni sebesar Rp.222.600.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.222.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.222.600.000,- atau setara dengan 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan.

- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga dengan alokasi anggaran Rp.64.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.64.200.000 atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya laporan data kependudukan.
- Pencatatan dan pengumpulan data Keluarga dengan alokasi anggaran Rp.86.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.86.400.000 atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya laporan data kependudukan
- 3. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan alokasi anggaran Rp.72.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.72.000.000 atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.2.086.641.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.2.086.641.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.066.772.000,- atau setara dengan 99.48%.

- Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Infomasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.1.043.800.000.00,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.1.043.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.043.800.000,- atau setara dengan 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan.

- Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan alokasi anggaran Rp.80.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.80.000.000 atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan yang direncanakan.
- 2. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan elektronik beserta Media Luar Ruang dengan alokasi anggaran Rp.150.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.149.785.000 atau setara dengan 99,86%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Media Luar Ruang yang direncanakan
- 3. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), Mini Loka Karya (Minilok) dengan alokasi anggaran Rp.156.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.156.000.000 atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan yang direncanakan
- 4. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dengan alokasi anggaran Rp.577.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.566.146.000 atau setara dengan 97.98%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan yang direncanakan.
- 5. Pengendalian Program KKBPK dengan alokasi anggaran Rp.80.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.72.000.000.000 atau setara dengan 90%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan yang direncanakan.

- Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Layanan KB (PKB/PLKB)

Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.554.000.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.554.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.553.590.000,- atau setara dengan 99.93%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:

 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan program KKBPK dilini lapangan oleh PKB/PLKB dengan alokasi anggaran Rp.216.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.216.000.000 atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas sumber daya dan potensi yang dimiliki tenaga penyuluh KB /Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB).

- 2. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dengan alokasi anggaran Rp.50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.50.000.000 atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).
- 3. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan alokasi anggaran Rp.288.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.287.590.000 atau setara dengan 99.86%. Output kegiatan ini adalah Penyediaan Layanan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
- Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.247.341.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.247.341.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.243.991.000,- atau setara dengan 98.65%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:

- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan alokasi anggaran Rp.30.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.28.200.000 atau setara dengan 15 Faskes. Output kegiatan ini adalah Ketersediaannya Alat dan Obat Kontrasepsi.
- 2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan alokasi anggaran Rp.197.841.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.197.091.000 atau setara dengan 1 kegiatan. Output kegiatan ini adalah Jumlah Metode Kontrasepsi yang direncanakan.
- 3. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan alokasi anggaran Rp.18.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.900.000 atau setara dengan 1 Kegiatan. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Program yang direncanakan.
- Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Alokasi anggaran Kegiatan ini pada APBD murni sebesar Rp.241.500.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.241.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.241.500.000,- atau setara dengan 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:

- Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB dengan alokasi anggaran Rp.9.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.000.000 atau setara dengan 15 kampung KB. Output kegiatan ini adalah meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan di kampung KB.
- 2. Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB dengan alokasi anggaran Rp.232.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.232.500.000 atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Program yang direncanakan.

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.1.267.200.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.1.337.285.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.270.229.000,- atau setara dengan 94,99%.

- Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Alokasi anggaran program ini pada APBD Rp.1.287.285.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.234.479.000,- atau setara dengan 95.90%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:

- Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan alokasi anggaran Rp.907.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.864.214.000 atau setara dengan 95.26%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Biaya Operasional yang direncanakan.
- 2. Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS) dengan alokasi anggaran Rp.360.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.352.050.000 atau setara dengan 1 Kegiatan. Output kegiatan ini adalah Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 3. Promosi dan Sosialisasi Kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (menjadi Orang tua hebat, generasi berencana, Kelanjutusahaan serta pengelolaan keuangan keluarga) dengan alokasi anggaran Rp.20.085.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.215.000 atau setara dengan 1 Kegiatan. Output kegiatan ini adalah Jumlah promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, Kelanjutusahaan serta pengelolaan keuangan keluarga)

- Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Kelauarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Alokasi anggaran kegiatan ini pada APBD murni sebesar Rp.0,- dan pada APBD Rp.50.000.000,perubahan menjadi dengan realisasi anggaran sebesar Rp.42.208.212,- atau setara dengan 84.42%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan alokasi anggaran Rp.50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.42.208.212 atau setara dengan 84.42%. Output kegiatan ini adalah jumlah organisasi mengikuti peningkatan Kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

Permasalahan dan Solusi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

a. Permasalahan

1. Pengumpulan Data masih belum Maksimal khususnya di Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di kecamatan.

b. Solusi

1. Mengoptimalkan Kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kecamatan.

10. BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan tahun 2023 adalah Cakupan prasarana transportasi yang lengkap serta dapat menunjang keselamatan transportasi sebesar 100% dari dari target yang ditetapkan pada tahun 2023; Cakupan Ketersediaan angkutan umum yang aman selamat dan nyaman sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023; Cakupan tingkat disiplin masyarakat dalam berlalu lintas 100% dari Target yang ditetapkan Tahun 2023; Cakupan ketersediaan pelabuhan laut sebesar 100% sesuai target Pada Tahun 2023. Cakupan jumlah orang yang melalui pelabuhan/dermaga sebesar 100% sesuai target Pada Tahun 2023. Cakupan jumlah orang yang melalui pelabuhan/dermaga sebesar 100% sesuai target Pada Tahun 2023. Cakupan jumlah barang yang melalui pelabuhan/dermaga sebesar 100% sesuai target Pada Tahun 2023. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Dinas Perhubungan

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Capaian indikator kinerja program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota adalah cakupan pelayanan perlengkapan jalan dengan capaian 94,32% atau sesuai target yang telah ditentukan. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.2.809.921.200,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.3.635.683.751,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.Rp.3.429.083.425,- atau setara dengan 94,32%

- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dua Sub kegiatan yakni pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/kota dan Rehabiliatsi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dengan alokasi anggaran kegiatan ini pada APBD murni sebesar Rp.2.809.921.200,-dan pada APBD perubahan menjadi Rp.3.635.683.751,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.Rp.3.429.083.425 atau setara dengan 94,32%.

- Sub Kegiatan pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/kota
 Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada APBD perubahan yakni sebesar Rp.1.925.889.651,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.725.547.651,- atau setara 89,60%. Output sub kegiatan ini adalah Tersedia LPJU Tenaga Surya Dalam Kota.
- 2. Sub Kegiatan Rehabiliatsi dan pemeliharaan perlengkapan jalan Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada APBD perubahan yakni sebesar Rp.1.709.794.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.703.535.774,- atau setara 99,63%. Output sub kegiatan ini adalah Tersedianya Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Capaian indikator kinerja program Program Pengelolaan Pelayaran pada Kegiatan Tersedianya Transportasi Perairan adalah cakupan Penyediaan Transportasi Perairan dengan capaian 100% atau sesuai target yang telah ditentukan. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.2.275.999.950,- dan pada APBD perubahan sebesar Rp.1.460.958.301,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.413.469.031,- atau setara dengan 96,75%-

- Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan Pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyebrangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Pada Lintas Penyebrangan Antar Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran pada APBD murni sebesar Rp.379.999.950 dan pada APBD perubahan

sebesar Rp.7.350.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.350.000,- atau setara 100,00%. Output kegiatan ini adalah tersedianya Laporan Pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyebrangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Pada Lintas Penyebrangan Antar Daerah Kabupaten/Kota.

- Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dua Sub kegiatan yakni Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan lokal dan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan alokasi anggaran kegiatan ini pada APBD murni sebesar Rp.1.896.000.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.1.453.608.301,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.Rp.1.406.119.031 atau setara dengan 96,73%.

- 1. Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan lokal.
 - Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada APBD perubahan yakni sebesar Rp.1.245.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.197.710.730,- atau setara 96,19%. Output sub kegiatan ini adalah Tersedianya Pemeliharaan Pelabuhan/Dermaga Pengumpan Lokal.
- 2. Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada APBD perubahan yakni sebesar Rp.208.408.301,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.208.408.301,- atau setara 100,00%. Output sub kegiatan ini adalah Tersedianya Pemeliharaan Pelabuhan Lokal.

Permasalahan dan Solusi Urusan Perhubungan

a. Permasalahan

- Belum meratanya ketersediaan lampu penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 2. Belum terpenuhinya fasilitas keselamatan di ruas jalan Kabupaten Banggai Kepulauan
- 3. Menurunnya jumlah armada yang melayani trayek angkutan penyebrangan
- 4. Minimnya akses masyarakat terhadap pelayanan transportasi umum

b. Solusi

- Pengadaan sarana dan prasarana keselamatan transportasi perhubungan darat dan laut.
- 2. Meningkatkan daya tarik penyedia jasa angkutan dengen mempermudah akses masyarakat memperoleh jasa angkutan
- 3. Menambah trayek angkutan demi meningkatkan jumlah penumpang jasa angkutan.

11. BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan Kebudayaan tahun 2023 adalah capaian Kegiatan, sebanyak 3 Kegiatan dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sejumlah 2 kegiatan;

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Capaian indikator kinerja Program Pengembangan Bahasa dan Sastra yaitu Terlaksananya Persentase Sekolah yang efektif mengembangkan Bahasa dan Sastra Melalui Kurikulum Muatan Lokal sehingga mencapai dari target yang ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran Program ini sebesar Rp.150.000.000,- yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa Dan Sastra Yang Penuturannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten Kota dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten Kota.

b. Program Pengembangan Kebudayaan

Capaian indikator kinerja Program Pengembagan Kebudayaan yaitu Peningkatan Program Pengembagan Kebudayaan sehingga mencapai dari target yang ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran Program ini sebesar Rp.649.500.000,- yang dilaksanakan melalui Kegiatan:

- Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.587.000.000,- dan realisasi Rp.525.009.000,- atau setara 89,44% melalui Sub Kegiatan :

- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.37.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.37.000.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan.
- 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.550.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.488.009.000,- atau setara dengan 88,37%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan.

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Capaian indikator kinerja Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yaitu Peningkatan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sehingga mencapai dari target yang ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran Program ini sebesar Rp.2.041.700.000,- dengan realisasi Rp.1.193.549.000 atau setara 58,46 yang dilaksanakan melalui:

- Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Pendaftaran Objek di duga Cagar Budaya dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.159.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.122.999.000,- atau setara dengan 77,36%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Objek di duga Cagar Budaya yang Di Daftarkan.
- Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.1.882.700.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.070.550.000,- atau setara dengan 56,86%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Objek Cagar Budaya yang Di Tetapkan.

Permasalahan dan Solusi Urusan Kebudayaan

a. Permasalahan

- 1. Belum Adanya Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Banggai Kepulauan
- 2. Belum Terawatnya Budaya yang ada di Tengah Masyarakat.
- 3. Kurangnya Tenaga Ahli Ahli Cagar Budaya di Kabupaten Banggai Kepulauan

b. Solusi

- 1. Perlunya Penetapan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan
- 2. Perlu Revitalisasi dan Pemeliharaan Cagar Budaya.
- 3. Perlu diadakan Latihan Tenaga Ahli

12. BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan koperasi, usaha kecil dan menengah tahun 2023 adalah Cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi yaitu 120 Kegiatan dari target 40 Kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2023; dan Cakupan Peningkatan Wawasan Pengelola Koperasi yaitu 35 Kegiatan dari target 35 Kegiatan yang ditetapkan.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Alokasi anggaran program ini pada APBD perubahan Rp.50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.37.330.000,- atau setara dengan 74,66%.

 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan alokasi anggaran Rp.50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.37.330.000,- atau setara 74,66%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Data UKM yang akurat.

Permasalahan dan solusi Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Permasalahan
 - 1. Belum terciptanya iklim yag kondusif bagi usaha kecil dan menengah;
 - 2. Belum optimalnya sistem pendukung usaha bagi UMKM;
 - 3. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi.
- b. Solusi
 - 1. Peningkatan iklim usaha kecil menengah yang kondusif dan kualitas kelembagaan koperasi;
 - 2. Pengembangan sistem permodalan bagi koperasi dan UKM;
 - 3. Peningkatan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil danmenengah.

13. BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahanan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan bidang Penanaman Modal tahun 2023 adalah jumlah pelaku usaha Non UMKM sebanyak 6 pelaku usaha dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp.2.661..200.000,- dari target yang di tetapkan pada rakor penanaman modal provinsi Sulawesi tengah pada tahun 2023 yaitu Rp.5.000.000.000,- indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - a. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Capaian indikator kinerja Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target anggaran 100%, Alokasi anggaran tahun 2023 pada program ini sebesar Rp.480.000.000,- dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp.477.600.000 atau setara 99, 50 %

- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupten / Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran Rp.400.488.000,- dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp.398.288.000,- atau setara dengan 99,45%, Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan total alokasi anggaran Rp.79.512.000,- dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp.79.312.000,- atau setara dengan 99,75 %, Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pengawasan penanaman modal

b. Program Pelayanan Penanaman Modal

Capaian indikator kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target 100%, Alokasi anggaran tahun 2023 pada program ini sebesar Rp.103.950.700,- dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp.100.741.105 atau setara 96,91%.

- Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara TSP dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab / Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103.950.700,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.100.741.105,- atau setara dengan 96,91 %, Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI URUSAN PENANAMAN MODAL

a. Permasalahan

- 1. Belum adanya data rencana umum penanaman modal (RUPM) secara menyeluruh
- 2. Masi ada pelaku usaha baik UMKM dan non UMKM belum melakukan pelaporan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) online secara mandiri.
- 3. Ada beberapa kegiatan penyelenggaraan pameran promosi dan investasi yang tidak dapat di ikuti karena tidak tersedianya alokasi anggaran.

b. Solusi

- 1. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai dalam rangka penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM)
- 2. Perlu dilakukan bimtek dan sosialisasi tatacara pelaporan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) online kepada para pelaku usaha.
- 3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk keikutsertaan dalam pameran promosi dan investasi.

14. BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023 adalah capaian Kegiatan Pelaksanaan PASKIBRAKA, Rehabilitasi Tribun, peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan, Penyediaan sarana prasrana olahraga dan Pengembanan organisasi olahraga sebanyak 5 Kegiatan dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sejumlah 5 kegiatan;

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Dinas Pemuda dan Olahraga

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.1.202.160.600,- dan APBD perubahan menjadi Rp.455.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.379.100.000,- atau setara dengan 83,26%.

Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan:

- a. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota.dengan alokasi anggaran Rp.135.000.000,- dengan realisasi Rp.128.800.000,- atau setara dengan 95,41%. Out put sub kegiatan ini adalah tersediianya sarana prasarana kepemudaan berupa tribun desa.
- b. Kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan Pemuda dengan alokasi anggaran Rp.846.860.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya Pelatihan Paskibraka.

- Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub. kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp.320.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.250.300.000,- atau setara dengan 78,15%. Output kegiatan ini adalah hibah bantuan uang ke Organisasi Kepemudaan, yaitu KNPI, Pemuda Pancasila, dan Kwarcab Pramuka.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.670.000.000,- dan APBD perubahan menjadi Rp.600.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.500.000.000,- atau setara dengan 83,33%.

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan dengan alokasi anggaran Rp.600.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.500.000.000,- atau setara dengan 83,33%. Output kegiatan ini adalah bantuan hibah berupa uang kepada KONI dan pengadaan alat pendukung olahraga berupa bola voli, net voli, bola kaki.

Permasalahan dan Solusi Urusan Pemuda dan Olahraga

a. Permasalahan

- 1. Kurangnya dukungan Pemerintah terhadap urusan pemuda dan olahraga.
- 2. Adanya pemangkasan anggaran sehingga beberapa indikator kerja tidak tercapai.
- 3. Masih kurangnya pengembangan cabang olahraga melalui induk organisasi yaitu KONI.

b. Solusi

- 1. Adanya dukungan pemerintah Pusat dan Daerah berupa Pembinaan dan Pelatihan
- 2. Adanya dukungan pemerintah yang dibuktikan. dengan banyaknya kegiatan yang melibatkan pemuda dalam berwirausaha.
- 3. Adanya pembinaan dan pengembangan cabang olahraga berupa dukungan anggaran.
- 4. Adanya dukungan dari pemerintah Daerah untuk mendorong tercapainya peningkatan prestasi dan prestise Olahraga di Kabupaten Banggai Kepulauan

15. BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan pemerintahan bidang Perpustakaan tahun 2023 adalah Cakupan Layanan Perpustakaan Literasi, dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 adalah 77,01 % dengan capaian 78,20 %

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut::

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Alokasi anggaran Program Pembinaan Perpustakaan pada APBD murni adalah sebesar Rp.441.250.000,- dan pada perubahan menjadi Rp.586.666.000,- dengan realisasi sebesar Rp.570.482.000,- setara dengan 97.24 % dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota.

Alokasi anggaran kegiatan ini pada APBD murni sebesar Rp.170.750.000,- dan APBD Perubahan menjadi Rp.Rp.324.166.000,- dengan realisasi Rp.316.934.000,- atau setara 97.77%. Output pada kegiatan ini adalah Peningkatan Layanan Perpustakaan.

1. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan layanan Perpustakaan Elektronik dengan alokasi anggaran Rp.5.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.750.000,- atau setara dengan 100 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah Layanan perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Managemen layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Tecnology Service Managemen)

- 2. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan Dasar diseluruh wilayah kab/kota sesuai dengan standar Nasional perpustakaan dengan alokasi anggaran Rp.3.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.800.000,- atau setara dengan 100 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan.
- 3. Sub Kegiatan Pembinaan perpustakaan khusus ditingkat kabupaten/kota dengan anggaran Rp.25.000.000,dengan realisasi anggaran Rp.22.900.000,- atau setara dengan 91,60 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah Perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/kota dalam mewujudkan standar Nasional Perpustakaan.
- 4. Sub Kegiatan Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp.53.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.49.181.000,- atau setara dengan 92,45%. Output kegiatan ini adalah Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi.
- 5. Sub Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, dengan alokasi anggaran Rp.236.416.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.235.303.000,atau setara dengan 99.53 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah Bahan Perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan.

Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah/Kota.

Alokasi anggaran kegiatan ini pada APBD murni sebesar Rp.270.500.000,- dan APBD Perubahan menjadi Rp.262.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.252.880.000,- atau setara 96.34%. Output pada kegiatan ini adalah Cakupan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pengembangan Literasi berbasis inklusi Sosial, dengan alokasi anggaran Rp.262.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.252.880.000,- atau setara dengan 96.34 %. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan Literasi dan Transpormasi layanan Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial

Permasalahan dan Solusi Urusan Perpustakaan

Permasalahan

- 1. Terdapat Sub Kegiatan yang termuat dalam Renstra tidak dapat dilaksanakan karena Adanya Efisiensi Anggaran Pemerintah yang diprioritaskan pada Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur dan Penanggulangan Kemiskinan.
- 2. Belum adanya Tenaga Fungsional Pustakawan yang memiliki sertifikat Pustakawan.

Solusi

- 1. Pada saat penyusunan Renstra sudah harus mengefisiensi anggaran sesuai skala prioritas Pembangunan diatas.
- 2. Perlu adanya Diklat Funsional Pustakawan

16. BIDANG URUSAN KEARSIPAN

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk urusan pemerintahan bidang kearsipan tahun 2023 yaitu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan dan pengelolaan Arsip Daerah sebanyak 2 kegiatan yaitu:

- Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dengan target 20 % (10 OPD) yang ditetapkan pada tahun 2023 dengan capaian 12 % (6 OPD).
- Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan dengan target 1 kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2023 dengan capaian 300 % (3 Kegiatan).

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

a. Program Pengelolaan Arsip

Alokasi anggaran program ini pada APBD Murni sebesar Rp.200.000.000,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.197.824.000,atau setara dengan 98, 91 %, dan dilaksanakan melalui kegiatan Sebagai berikut :

Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota Alokasi anggaran program ini Rp.200.000.000,- dengan realisasi Rp.197.824.000,- atau setara dengan 98.91 %. Output Pada Kegiatan Adalah Jumlah Simpul Jaringan iInformasi Kearsipan dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota, Rp.200.000.000,- dan realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.197.824.000,- atau setara 98.91 %. Output Kegiatan ini adalah Terlaksananya Perbup Kearsipan, Diklat Kearsipan, Bimtek dan Pembinaan sadar tertib Arsip.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

- 1. Kurangnya Peralatan dan perangkat lunak yang diperlukan untuk pengelolaa Arsip/ aplikasi SRIKANDI;
- 2. Kurangnya SDM Kearsipan (Fungsional Arsiparis) pada Lembaga Kearsipan Daerah;

b. Solusi

- 1. Perlu adanya pengadaan Peralatan dan perangkat lunak untuk pengelolaa Arsip/ aplikasi SRIKANDI;
- 2. Perlu adanya Diklat Funsional Arsiparis.

3.1.3. URUSAN PILIHAN

1. BIDANG URUSAN TRANSMIGRASI

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan Ketransmigrasian yaitu cakupan wilayah pembangunan dan pengembangan transmigrasi dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 4 Indikator, kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Capaian indikator kinerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada cakupan pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran pada program ini sebesar Rp.34.840.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.34.840.00,- atau setara 100,00 %

- Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat dan Transmigran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.840.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.34.840.000,- atau setara 100,00 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah Kepala Keluarga yang di fasilitasi Sarana Air Bersih (SAB).

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

- 1. Belum Adanya Sarana Air Bersih (SAB)
- 2. Masi adanya Masyarakat yang Belum terlayani Penerangan/Listrik (PLN) di Lokasi Transmigrasi karena Jaringan TR dan tiang Listrik belum melewati rumah mereka (Blok C)
- 3. Sebagian Masyarakat Transmigrasi Belum Tinggal Menetap di Lokasi Transmigrasi
- 4. Jalan Masuk ke Lokasi Transmigrasi Berlubang-lubang

b. Solusi

- 1. Perlunya pengalokasian anggaran terhadap pembuatan sumur bor dilokasi transmigrasi agar tersedianya sarana air bersih bagi Warga Masyarakat Transmigrasi
- 2. Perlunya penambahan Jaringan TR dan Tiang Listrik sehingga semua Blok Perumahan mendapatkan Penerangan (PLN)
- 3. Perlunya di Lengkapi Fasilitas SARP.RAS Sehingga Masyarakat Transmigrasi Dapat Tinggal Menetap
- 4. Perlunya Pengaspalan Jalan

BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan kelautan dan perikanan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Cakupan Kelompok penerima bantuan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap sebanyak 31 kelompok atau 100% dari target yang ditetapkan Tahun 2022 sebanyak 31 kelompok;
- Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap sebanyak 1 sarana sesuai dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebanyak 1 sarana;
- Cakupan Peserta Pelatihan Budidaya Ikan dan Rumput Laut sejumlah 150 orang; atau 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sejumlah 150 orang;
- Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan sebanyak 1 Unit atau 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sejumlah 1 unit;

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Dinas Perikanan

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.6.865.307.400,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.2.614.582.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.297.993.620. atau setara 87,89%

Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dengan alokasi anggaran pada APBD Murni sebesar Rp.6.765.307.400,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.1.666.507.400 dan realisasi sebesar Rp.1.350.651.620,atau setara dengan 81,05%.
- 2. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan dengan alokasi anggaran Rp.100.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.99.700.000 atau setara dengan 99,70%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam yang tersedia.

Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dengan alokasi anggaran Rp.848.075.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.847.642.000 atau setara dengan 99,95%.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.3.701.000.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.3.867.672.600,-dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.397.692.771 atau setara dengan 87,85%.

Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1. Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan alokasi anggaran Rp.96.747.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.87.498.850,atau setara dengan 90,44%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Pelatihan Budidaya Ikan dan Rumput Laut yang direncanakan.
- 2. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.019.925.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.964.940.000,atau setara dengan 94,61%.

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran **APBD** Murni sebesar Rp.3.667.000.000,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.2.727.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.345.253.921,- atau setara dengan 85,25%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan yang direncanakan.
- 2. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.000.000,- denga realisasi anggaran sebesar Rp.24.000.000,- atau setara dengan 100%.

c. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.1.935.000.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.1.532.940.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.040.726.000 atau setara 67,89%.

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

- 3. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran APBD murni sebesar Rp.595.000.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.1.192.940.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.900.726.000,- atau setara dengan 75,50%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang direncanakan.
- 4. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran APBD murni sebesar Rp.1.340.000.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.340.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.140.000.000,- atau setara dengan 41,18%.

Permasalahan dan Solusi Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Permasalahan
 - 1. Kualitas sumber daya manusia sektor perikanan masih kurang;
 - 2. Kurangnya Sarana pendukung sektor perikanan;
- b. Solusi
 - 1. Peningkatan kapasitas aparatur dinas melalui diklat teknis;
 - 2. Penyediaan sarana perikanan yang memadai;

3. BIDANG URUSAN PARIWISATA

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan Pariwisata adalah : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara; Persentase Pemasaran produk Pariwisata didalam dan luar Negeri; capaian Persentase Peningkatan Kualitas sumber daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif didaerah Kab./Kota.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Dinas Pariwisata

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Alokasi anggaran untuk proram ini pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.412.474.000,- dan pada APBD Perubahan berubah menjadi Rp.12.474.400,dengan realisasi sebesar Rp.12.044.400,- atau setara dengan 96,55%.

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan e-marking sehingga dana tersebut diperuntukan untuk e-marking sejumlah Rp.400.000.000,- pada ABPD Perubahan sisa Anggaran sejumlah Rp.12.474.400 pada kegiatan tersebut dialihkan pada Sub.Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota dengan realisasi sejumlah Rp.12.044.400,- atau setara 96,55%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Outcame Jumlah Dokumen.

b. Program Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan **Ekonomi Tingkat**

Alokasi Anggaran Program ini pada APBD murni tidak tersedia anggaran setelah adanya emarking bidang Ekonomi kreatif mendapat anggaran (Perkada) sebesar Rp.458.999.637, dengan realisasi sebesar Rp.425.383.371,- atau setara dengan 92,47%.

Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

- a. Sub. Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.149.999.860,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.136.787.594,- atau setara dengan 91,19%. Output Kegiatan Ini adalah berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, outcaome jumlah SDM pariwisiata dan ekonomi Tingkat dasar yang dikembangkan Kompetensinya.
- b. Sub. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.97.426.000,- atau setara dengan 97,43%. Output Kegiatan Ini adalah Terlaksananya Kegiatan Monitoring dab Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, OutCome Jumlah Hasil rekomendasi monitoring dan evaluasi pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif Direncanakan.

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

a. Sub. Kegiatan Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif dengan alokasi anggaran sebesar Rp.209.999.777,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.191.169.777,- atau setara dengan 91,03%. Output Kegiatan Ini adalah terlaksananya Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Outcome Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif yang Direncanakan.

Permasalahan dan Solusi Urusan Pariwisata

a. Permasalahan

- 1. Masih rendahnya Kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Banggai Kepulauan
- 2. Lama Kujungan karena tidak tersedia Amenitas ditempat Wisata.
- 3. Kurangnya kesadaran Masyarakat tentang wisata.
- 4. SDM kepariwisataan belum optimal dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata yang dimiliki daerahnya

b. Solusi

- 1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana daya dukung destinasi pada tempat-tempat wisata favorit;
- 2. Pelatihan SDM pengelola Pokdarwis dan desa Wisata Lembaga pengawasan dan pengelola destinasi wisata.

4. BIDANG URUSAN PERTANIAN

indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan Pencapaian urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan pertanian tahun 2023 yaitu : Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dengan target 23,75.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Dinas Pertanian

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Capaian indikator kinerja program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yaitu cakupan Sarana pertanian dengan target 12 kecamatan. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.6.108.024.650,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.2.194.387.550,- dengan realisasi sebesar Rp.1.797.582.186,atau setara dengan 81,91%

- Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Kegiatan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pendampingan Penggunanaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi. Sub Kegiatan ini pada APBD murni sebesar Rp.1.204.999.650,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.366.547.550,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.287.348.451,- atau setara dengan 78,39 %. Output Sub Kegiatan ini adalah Tersediannya Alat dan Mesin Pertanian.

Kegiatan Pengelolaan Sumbar Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenagan Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran kegiatan ini pada APBD murni sebesar Rp.4.903.025.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.1.827.840.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.510.233.735,- atau setara dengan 82,62 %.

Output Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Benih/Bibit Kacang Tanah yang tersedia, Jumlah Komoditi Ubi Banggai yang tersedia, Jumlah Obat-Obatan Keswan yang tersedia, dan Jumlah Ternak Yang Mempunyai Genetik Unggul yang tersedia.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Capaian indikator kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasana Pertanian pada kegiatan Pengembangan Prasana Pertanian dan Pembangunan Prasarana Pertanian adalah cakupan Kegiatan Prasarana pertanian dengan target 12 Kecamatan. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.2.849.999.750,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.338.592.750,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.269.025.250,- atau setara dengan 79,45 %

- Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

Capaian indikator kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian adalah cakupan

- jumlah Prasarana pertanian dengan target 12 Kecamatan. Alokasi anggaran Kegiatan ini pada APBD murni sebesar Rp.2.849.999.750,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.338.592.750,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.269.025.250,- atau setara 79,45 % dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan:
- 1. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani. ALokasi anggaran pada APBD murni sebesar Rp.2.849.999.750,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.316.189.750,- dengan realisasi anggaran Rp.246.622.250,atau setara 77,99%. Output sub kegiatan ini adalah tersedianya jumlah pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani.
- 2. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan. Alokasi anggaran pada APBD perubahan Rp.22.403.000,- dengan realisasi Rp.22.403.000,- atau setara 100,00%. Output sub kegiatan ini adalah tersedianya rumah potong hewan.

c. Program Peyuluhan Pertanian

- Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- Capaian indikator kinerja Program Penyuluhan Pertanian pada Kegiatan Pelaksanaan Peyuluhan Pertanian adalah cakupan pemberdayaan penyuluh pertanian sebesar 100% dari target yang ditetapkan tahun 2023. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.566.499.900,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.773.168.475,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.768.901.334,- atau setara dengan 99,44 % dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan dan Desa. Alokasi anggaran pada APBD murni Rp.296.499.900,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.208.719.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.206.818.760,- atau setara dengan 99,08 %. Output Sub Kegiatan ini adalah jumlah peserta kegiatan yang tersedia.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian. Alokasi anggaran pada APBD murni Rp.270.000.000,-dan pada APBD perubahan menjadi Rp.288.114.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.285.748.000,- atau setara dengan 99,17 %. Output Sub kegiatan ini adalah jumlah peserta kegiatan yang tersedia.
- c. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelengaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran pada **APBD** perubahan Rp.276.334.575,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.276.334.574,- atau setara dengan 100,00 %. Output Sub kegiatan ini adalah jumlah kegiatan yang tersedia.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI URUSAN PERTANIAN **BIDANG PERKEBUNAN**

Permasalahan

Dalam melaksanakan kegiatan program bidang perkebunan lebih menekankan pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian khusunya tanaman perkebunan:

- 1. Rencana dan Kegiatan Bidang Perkebunan tidak disesuaiakan dengan kebutuhan dan target anggaran karena keterbatasan anggaran yang berdampak pada e-marking.
- 2. Penggaran lebih memprioritaskan pada hasil pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang tidak melihat kebutuhan petani dan bukan merupakan hasil desk.
- 3. Tidak sesuai sasaran penerima manfaat sehingga membatalkan pelaksanaan kegiatan pengadaan kopi dan kelapa pada tahun 2023 dengan jumlah anggaran Rp.226.950.00 (pengadaan Kelapa dan Kopi) dan Rp.24.360.000 (belanja Operasional)

<u>Solusi</u>

- 1. Pada perencanaan pelaksanaan kegiatan bidang perkebunan perlu memperhatikan produk unggulan daerah untuk dijadikan aikon dalam usaha peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan.
- 2. Menciptakan kawasan produk unggulan perkebunan dengan melihat kondisi lahan yang tersedia di masing-masing kecamatan.
- 3. Penyediaan sektor-sektor produksi, bibit unggul perkebunan, pupuk dan pestisida untuk mampu meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.
- 4. Memperluas dan mengembangkan produk unggulan perkebunan dan melakukan peremajaan bagi tanaman perkebunan yang sudah mengalami kerusakan dan kematian bagi tanaman yang sudah lama.
- 5. Mendukung pengembangan sektor industry gula aren dan minyak kelapa yang ada di desa lalong dengan melakukan program kegiatan perluasan area tanaman perkebunan.

BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

<u>Permasalahan</u>

- 1. Permasalahan dalam penyiapan prasarana dan sarana pertanian ada beberapa permasalahan baik internal maupun esternal, untuk permasalahan eksternal yaitu menyangkut iklim yang kadang kalah pelaksanaan kegiatan intensitas hujan yang terlalu tinggi begitu juga topografi lokasi yang berbukit, serta peralatan yang digunakan oleh pihak kontraktor yang sudah tidak layak digunakan.
- 2. Komitmen pihak ke-2 (Kontraktor) yang tidak ditepati yaitu menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani sehingga dana luncuran pembangunan jalan tersebut tidak dibayarkan yang mengakibatkan tidak tercapainya realisasi anggaran 2023.
- 3. Adanya pengusulan kelompok tani calon penerima hibah mesin potong rumput yang diusulkan lewat dana aspirasi yang kelompoknya belum teregistrasi pada SIMLUTAN sehingga dinas pertanian tidak dapat merealisasikan anggaran tersebut.

Solusi/saran

- 1. Perlunya perencanaan yang matang sehingga pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani ke depan tidak dilaksanakan di musim penghujan serta pelaksanaanya bukan dimedan
- 2. Dinas pertanian perlu mengevaluasi perusahaan pelaksanaan kegiatan agar kedepan tidak ada lagi pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan.
- 3. Perlunya pemahaman ke berbagai pihak tentang tata cara pemberian hibah kepada masyarakat baik hibah barang maupun hibah uang.

BIDANG URUSAN PERDAGANGAN

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- 1. Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 - a. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Alokasi anggaran program ini pada APBD perubahan Rp.1.309.886.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.308.380.000,- atau setara 99,89%

Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.309.886.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.308.380.000,- atau setara dengan 99,89%. Output Kegiatan ini adalah Terlaksananya Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus.

BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan perdagangan tahun 2023 adalah cakupan bidang kelompok pedagang/ usaha informal. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 - a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Capaian indikator kinerja program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yaitu cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran pada program ini sebesar Rp.224.786.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.199.609.348,- atau setara 88,80%

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Alokasi anggaran sebesar Rp.224.786.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.199.609.348,- atau setara 88,80%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Sosialisasi Teknis dan Pengawasan dalam rangka mendukung penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri.

3.1.4. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

1. BIDANG URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Urusan administrasi pemerintahan dilaksanakan oleh instansi:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian pengembangan
- d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- e. Badan Pendapatan Daerah
- f. Badan kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia
- g. Inspektorat Daerah
- h. 12 Kecamatan

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Capaian indikator kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yaitu meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran program ini sebesar Rp.4.113.722.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.069.264.263,- atau setara dengan 98,92%. Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan berikut:

Kegiatan Adminstrasi Tata Pemerintahan

Capaian indikator kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan adalah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Pemerintahan dengan Alokasi Anggaran Rp.240.603.500,- dan terealisasi sebesar Rp.236.010.745,-atau setara dengan 98,09%. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan. Alokasi Rp.25.300.000,- dengan realisasi Rp.24.814.000,- atau 98,08%. Output Sub kegiatan ini adalah Jumlah Kecamatan yang di nilai/kegiatan yang di rencanakan
- 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp.215.303.500,- terealisasi Rp.211.196.745,- atau setara dengan 98,09%. Output Sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pelantikan Wakil Bupati dan tersedianya dokumen LPPD.

Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Capaian indikator kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Kegiatan Pelaksanaan Protokol Dan komunikasi pimpinan adalah Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan dengan Alokasi Anggaran Rp.107.550.000,- dan terealisasi sebesar Rp.106.515.000,- atau setara dengan 99,04%. Kegiatan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan. Alokasi Anggaran Rp.107.550.000,- dengan realisasi Rp.106.515.000,-. Output Sub kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan yang direncanakan.

Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Capaian indikator kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan pada Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian adalah Terlaksananya Jumlah Pelaporan yang direncanakan dengan Alokasi Anggaran Rp.357.716.900,- dan terealisasi sebesar Rp.357.416.899,- atau setara dengan 99,92%. Kegiatan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. Alokasi Anggaran Rp.357.716.900,- dengan realisasi Rp.357.416.899,-. Atau setara dengan 99,92%. Output Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang direncanakan yang direncanakan.

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Capaian indikator kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum adalah Terlaksananya Jumlah Pelaporan yang direncanakan dengan Alokasi Anggaran Rp.1.230.650.300,- dan terealisasi sebesar Rp.1.211.284.700,- atau setara dengan 98,43%. Kegiatan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Sub Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah. Alokasi Anggaran Rp.Rp.479.315.500,- dengan realisasi Rp.475.202.500,-. Atau setara dengan 99,14%. Output Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang direncanakan.
- Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum. Alokasi Anggaran sebesar Rp.211.500.000,- realisasi Rp.199.800.000,- atau setara dengan 94,47%. Output Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang direncanakan.
- 3. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum. Alokasi Anggaran sebesar Rp.125.000,000,- realisasi Rp.124.150,000,atau setara dengan 99,32%. Output Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang direncanakan.

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan kesehteraan Rakyat

Capaian indikator kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan kesehteraan Rakyat adalah Terlaksananya Jumlah Kegiatan Kebijakan kesehteraan Rakyat dengan Alokasi Anggaran Rp.3.396.960.075,dan terealisasi sebesar Rp.3.362.920.893,- atau setara dengan 98.99%. Kegiatan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual. Alokasi Anggaran Rp.2.602.303.700,- dengan realisasi Rp.2.579.610.915,-. Atau setara dengan 98,12%. Output Sub kegiatan ini Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual.
- 2. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi , dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial. Alokasi Anggaran Rp.295.000.000,- dengan realisasi Rp.294.487.103,-. Atau setara dengan 99,82%. Output Sub kegiatan Jumlah Bantuan Sosial Masyarakat yang dilaksanakan.

3. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat. Alokasi Anggaran Rp.160.000.000,- dengan realisasi Rp.160.000.000,-. Atau setara dengan 100%. Output Sub kegiatan Jumlah Bantuan Kegiatan Sosial yaitu Rumah Ibadah.

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan kesehteraan Rakyat

Capaian indikator kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan kesehteraan Rakyat adalah Terlaksananya Jumlah Kegiatan Kebijakan kesehteraan Rakyat dengan Alokasi Anggaran Rp.3.396.960.075,dan terealisasi sebesar Rp.3.362.920.893,- atau setara dengan 98.99%. Kegiatan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual. Alokasi Anggaran Rp.2.602.303.700,- dengan realisasi Rp.2.579.610.915,-. Atau setara dengan 98,12%. Output Sub kegiatan ini Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual.
- 2. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi , dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial. Alokasi Anggaran Rp.295.000.000,- dengan realisasi Rp.294.487.103,-. Atau setara dengan 99,82%. Output Sub kegiatan Jumlah Bantuan Sosial Masyarakat yang dilaksanakan.
- 3. Sub Kegiatan Fasilitas P Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat. Alokasi Anggaran Rp.160.000.000,- dengan realisasi Rp.160.000.000,-. Atau setara dengan 100%. Output Sub kegiatan Jumlah Bantuan Kegiatan Sosial yaitu Rumah Ibadah

Kegiatan Penataan Organisasi

Capaian indikator kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Kegiatan Penataan Organisasi adalah Cukupan Data Organisasi dengan Alokasi Anggaran Rp.542.452.000,- dan terealisasi sebesar Rp.535.966.701.- atau setara dengan 99%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan analisis jabatan. Alokasi Anggaran Rp.225.000.000,- Dengan realisasi Rp.207.668.921,- Atau setara dengan 92%. Output Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan
- 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Alokasi Anggaran Rp.317.452.000,- Dengan realisasi Rp.333.002.000,-. Atau setara dengan 99%. Output Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Capaian indikator kinerja Program Program Perekonomian dan Pembangunan pada Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa adalah Cakupan Kualitas Administrasi Kantor Rp. 539.200.000,dengan Alokasi Anggaran dan terealisasi sebesar Rp.524.560.282,- atau setara dengan 97,28%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Alokasi Anggaran Rp.43.500.000,- dengan realisasi Rp. 40.171.560,-. Atau setara dengan 92,35%. Output Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- 2. Sub Kegiatan Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Alokasi Anggaran Rp.435.400.000,- dengan realisasi Rp. 424.328.722,-. Atau setara dengan 97,46%. Output Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pangadaan Secara Elektronik
- 3. Sub Kegiatan Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Alokasi Anggaran Rp. 60.300.000,- dengan realisasi Rp. 60.060.000,-. Atau setara dengan 99,60%. Output Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Capaian indikator kinerja Program Program Perekonomian dan Pembangunan pada Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan adalah Cakupan Kegiatan Administrasi Pembangunan dengan Alokasi Anggaran Rp.304.333.000,- dan terealisasi sebesar Rp.302.871.400,- atau setara dengan 100 %. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan program pembangunan. Alokasi Anggaran Rp.120.000.000,- dengan realisasi Rp.119.964.500,-. Atau setara dengan 100%. Output Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan administrasi pembangunan
- 2. Sub Kegiatan Pengendalian dan evaluasi program pembangunan. Alokasi Anggaran Rp.130.000.000,- dengan realisasi Rp. 130.000.000,-. Atau setara dengan 100%. Output Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya pengendalian dan evaluasi program pembangunan.
- 3. Sub Kegiatan Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. Alokasi Anggaran Rp.53.933.000.,- dengan realisasi Rp.52.506.900,-. Atau setara dengan 100%. Output Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan administrasi pembangunan.

2. BIDANG URUSAN SEKRETARIAT DPRD

a. Program Pelaksanan Tugas dan Fungsi DPRD

Capaian indikator kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan DPRD yaitu cakupan jumlah peraturan Daerah sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.6.628.035.100 dan APBD Perubahan menjadi sebesar Rp.9.672.245.600 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 7.002.013.809 Atau setara dengan 72.40%.

Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan DPRD

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahsan Program Pembentukan Peraturan Daerah alokasi anggaran sebesar Rp.150.667.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.92.005.500,- atau setara dengan 61%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Direncanakan.
- 2. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda dengan alokasi anggaran sebesar Rp.208.747.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.42.420.900,- atau setara dengan 25%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Direncanakan.

b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

Capaian indikator kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yaitu cakupan Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni Rp.169.440.100 dan pada APBD perubahan sebesar Rp.226.080.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.152.000.atau setara dengan 5% dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS alokasi anggaran sebesar Rp.62.053.800,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.37.200.000,- atau setara dengan 60%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang direncanakan.
- 2. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS alokasi anggaran sebesar Rp.116.134.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.33.412.000,- atau setara dengan 29%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Direncanakan.
- 3. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD dengan alokasi anggaran Sebesar Rp. 47.910.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.152.000,- atau setara dengan 25%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang direncanakan.

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Capaian indikator kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada Kegiatan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan yaitu cakupan Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni Rp.1.372.010.000 dan pada APBD perubahan sebesar Rp.650.660.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.604.225.000- atau setara dengan 93% dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum sebesar Rp.95.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar alokasi anggaran Rp.93.120.000,- atau setara dengan 98%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Direncanakan.

- 2. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur alokasi anggaran sebesar Rp.220.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.189.540.000,- atau setara dengan 86%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang direncanakan.
- 3. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang kesejahtraan Rakyat alokasi anggaran sebesar Rp.81.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.66.595.000,- atau setara dengan 81%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Direncanakan.
- 4. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian alokasi anggaran sebesar Rp.125.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.81.750.000,- atau setara dengan 65%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Direncanakan.
- 5. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidng Sumber daya alam alokasi anggaran sebesar Rp.125.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.92.400.000,- atau setara dengan 74%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Direncanakan.
- 6. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan keterangan pertanggungjawaban kepal daerah alokasi anggaran sebesar Rp.3.860.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0, atau setara dengan 0%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Direncanakan.

d. Peningkatan kapasitas DPRD

Capaian indikator kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yaitu cakupan Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni Rp.1.934.368.000 dan pada APBD perubahan sebesar Rp.2.896.969.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.866.066.171- atau setara dengan 64% dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD alokasi anggaran sebesar Rp.2.534.719.000,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.535.066.171,- atau setara dengan 61%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Direncanakan.
- 2. Sub Kegiatan Penyedian Kelompok Pakar dan Tim Ahli alokasi anggaran sebesar Rp.180.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- atau setara dengan 83%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Direncanakan.
- 3. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Alokasi Anggaran sebesar Rp.144.000.000. dengan realisasi Anggaran Sebesar Rp.138.000.000 atau setara dengan 69%. Output kegiatan ini adalah jumlah Dokumen yang direncanakan.
- 4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Alokasi Anggaran sebesar Rp.38.250000. dengan realisasi Anggaran Sebesar Rp.34.577.480 atau setara dengan 90%. Output kegiatan ini adalah jumlah Dokumen yang direncanakan.

e. Kegiatan Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Mayarakat

Capaian indikator kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada Kegiatan Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yaitu cakupan Dokumen Kegiatan Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni Rp.1.020.883.100,- dan pada APBD perubahan sebesar Rp.1.977.058.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.420.972.000.- atau setara dengan 72% dan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan

- 1. Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah alokasi anggaran sebesar Rp.259.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.225.575.000 ,- atau setara dengan 87%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Direncanakan.
- 2 Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD alokasi anggaran sebesar Rp.16.468.800 ,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.360.000 ,- atau setara dengan 81%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Direncanakan.
- 3 Sub Kegiatan Pelaksanan Reses alokasi anggaran sebesar Rp.1.701.389.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.182.037.000,- atau setara dengan 69%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Direncanakan.

f. Pelaksanan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Capaian indikator kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yaitu cakupan Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni Rp.53.353.000 dan pada APBD perubahan sebesar Rp.89.629.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.62.680.100- atau setara dengan 70% dan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD alokasi anggaran sebesar Rp.89.629.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.62.680.100- atau setara dengan 70%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Direncanakan.

g. Pembahasan Kerja Sama Daerah

Capaian indikator kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada Pembahasan Kerja Sama Daerah yaitu cakupan Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni Rp.284.116.500,dan pada APBD perubahan sebesar Rp.116.293.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.59.400.000.atau setara dengan 51%.

h. Kegiatan Fasilitasi tugas DPRD

Capaian indikator kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada Kegiatan Fasilitasi tugas DPRD yaitu cakupan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni Rp.1.318.674.600,dan pada APBD perubahan sebesar Rp.3.355.140.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.843.078.138.- atau setara dengan 85% dan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan

- a.Sub Kegiatan koordinasi dan Konsultasi Pelaksanan Tugas DPRD alokasi anggaran sebesar Rp.3.336.522.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.841.029.538,- atau setara dengan 85%. Output kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan yang direncanakan.
- b. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD alokasi anggaran sebesar Rp. 18.618.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.048.600,- atau setara dengan 11%. Output kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan yang direncanakan.

3. BIDANG URUSAN PERENCANAAN

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaran urusan pemerintahan Kabupaten Banggai kepulauan untuk urusan fungsi penunjang perencanaan tahun 2023 sebagai berikut: tersedianya dokumen RKPD dan P-RKPD yang ditetapkan dengan perkada pada tahun 2023, Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Badan Penelitian Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Capaian indikator kinerja Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2023 yaitu 100% atau mencapai target yang telah ditentukan. Alokasi anggaran program ini pada APBD Rp.1.182.278.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.076.791.668,- atau setara dengan 91,08%.

- Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.158.298.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.154.986.980,- atau setara dengan 97,91%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.327.417.000,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.307.286.872,- atau 93,85%. Output kegiatan ini adalah Terpenuhinya Laporan Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya

- 3. Pelaksanaan Konsultasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar 59.450.000,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.56.894.840,- atau setara dengan 95,70%. Output kegiatan iniadalah Terlaksananya kegiatan konsultasi publik.
- 4. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.67.817.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.53.456.840,- atau setara dengan 78,83%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan forum perangkat daerah
- 5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.110.638.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.102.818.900,- atau setara dengan 92,93%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.
- 6. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.260.000,- atau setara dengan 93,64%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Pelaksanaan Musrenbang Tkt Kecamatan.
- 7. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp.236.757.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.665.636,- atau setara dengan 86,87%. Output kegiatan ini adalah Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian indikator kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada pada Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian pada tahun 2023 yaitu 100% atau mencapai target yang telah ditentukan. Alokasi anggaran kegiatan ini pada APBD Rp.50.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.41.169.600,- atau setara dengan 81,69% dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.41.169.600,- atau setara dengan 81,69% Output kegiatan ini adalah tersedianya laporan hasil analisis data dan informasi pembangunan daerah

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Alokasi anggaran program ini pada APBD Rp.152.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.136.252.000,- atau setara dengan 89,64%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.Rp.152.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.136.252.000,- atau setara dengan 89,64%. Output kegiatan ini adalah Terpenuhinya dokumen monitoring program dan kegiatan perangkat daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian indikator kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah cakupan dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan capaian pada tahun 2023 yaitu 100% atau mencapai target yang telah ditentukan. Alokasi anggaran program ini pada APBD Rp.818.951.883,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.759.596.799,- atau setara dengan 92,75%.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan(RP.JPD, RP.JMD dan RKPD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.878.403,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.81.575.500,- atau setara dengan 95,00%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Jumlah kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.
- 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan alokasi anggaran sebesar 23.705.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.22.402.000,- atau setara dengan 94,50%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang di asistensi.
- 3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RP.JPD, RP.JMD dan RKPD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.875.980,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.38.707.403,- atau setara dengan 88,22%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- 4. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.930.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.776.000,- atau setara dengan 88,29%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembanguna Manusia yang di asistensi.
- 5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.312.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.53.691.000,- atau setara dengan 87,57%. Output kegiatan ini adalah Tercapainya Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Capaian indikator kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) adalah cakupan umlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan capaian pada tahun 2023 yaitu 100% atau mencapai target yang telah ditentukan. Alokasi anggaran program ini pada APBD Rp.818.951.883,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.759.596.799,- atau setara dengan 92,75%. dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RP.JPD, RP.JMD dan RKPD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.124.100.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.123.609.364,- atau setara dengan 99,60%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.46.258.000,- atau setara dengan 92,52%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang diasistensi.
- 3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.157.150.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.142.032.352,- atau setara dengan 90,38%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya laporan koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan:

- 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur(RP.JPD, RP.JMD dan RKPD) dengan alokasi anggaran sebesar 34.920.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.34.251.780,- atau setara dengan 98,09%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
- 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.78.340.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.76.431.400,- atau setara dengan 97,56%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang di asistensi.

- 3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.890.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.58.357.000,- atau setara dengan 95,84%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya laporan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- 4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RP.JPD, RP.JMD dan RKPD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.050.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.42.815.000,- atau setara dengan 91.00%. Output kegiatan iniadalah Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.
- 5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.690.000,- atau setara dengan 63,27%. Output kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang di asistensi.

4. BIDANG URUSAN KEUANGAN

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan pemerintahan Penunjang Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut: Opini BPK Terhadap LKPD, target Opini WTP untuk LKPD 2023; Cakupan Dokumen KUA dan PPAS yang tersedia sejumlah 2 dokumen dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebsnyak 2 dokumen; Cakupan Dokumen RKA OPD/Perubahan RKA OPD sebanyak 54 Dokumen dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebanyak 54 dokumen; Cakupan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan realisasi 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 yakni 100%; Cakupan Dana Bagi Hasil Pajak dengan realisasi 79% dari target yang ditetapkan selama 1 tahun...

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian indikator kinerja Program Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan yaitu cakupan Dokumen Rencana Anggaran Daerah dengan target pada tahun 2023 sebesar 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.165.026.917.031,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.164.035.931.126,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.162.991.233.044,- atau setara dengan 99%.

- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan alokasi anggaran. Alokasi anggaran sebesar Rp.51.128.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.49.598.500,- atau setara dengan 97%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang tersedia.
- 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Alokasi anggaran sebesar Rp.41.126.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.40.391.500,- atau setara dengan 98%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
- 3. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD. Alokasi anggaran sebesar Rp.45.630.000, - dengan realisasi anggaran sebesar Rp.32.935.000, - atau setara dengan 72%.Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA OPD.
- 4. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD. Alokasi anggaran sebesar Rp.14.945.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.14.945.000, atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA OPD.
- 5. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD. Alokasi anggaran sebesar Rp.28.210.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.26.405.000,- atau setara dengan 94%.Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA OPD.
- 6. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD. Alokasi anggaran sebesar Rp.14.945.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.14.745.000,atau setara dengan 99%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA OPD.
- 7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Alokasi anggaran sebesar Rp.373.395.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.318.784.360,- atau setara dengan 85%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
- 8. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. Alokasi anggaran sebesar Rp.286.005.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.272.680.150,- atau setara dengan 95%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD.

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Capaian indikator kinerja Program Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yaitu Cakupan Jumlah Pegawai Penatausahaan Pembiayaan Daerah dengan target pada tahun 2023 sebesar 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.530.562.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.747.972.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.704.189.400,atau setara dengan 94% dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp.200.746.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.187.894.000,- atau setara dengan 94%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai yang mengikuti Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
- 2. Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp.259.420.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.246.647.600,- atau setara dengan 95%.Output kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah.
- 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Alokasi anggaran sebesar Rp.177.766.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.165.717.800,- atau setara dengan 93%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP.
- 4. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait. Alokasi anggaran sebesar Rp.110.040.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.103.930.000,- atau setara dengan 94%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai yang mengikuti Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D.

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Capaian indikator kinerja Program Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yaitu Cakupan Laporan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Pembiayaan dengan target pada tahun 2023 sebesar 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.503.930.500.,dan pada APBD perubahan menjadi Rp.828.194.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.710.451.620,- atau setara dengan 86% dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban. Alokasi anggaran sebesar Rp.144.827.300,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.112.676.900,- atau setara dengan 78%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan.
- 2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran Alokasi anggaran sebesar Rp.107.245.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.94.226.200,- atau setara dengan 88%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
- 3. Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp.367.380.000,- dengan realisasi

- anggaran sebesar Rp.319.271.020,- atau setara dengan 87%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA.
- 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran. Alokasi anggaran sebesar Rp.137.337.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.114.784.400,- atau setara dengan 84%.Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota.
- 5. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran sebesar Rp.71.404.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.69.493.100,atau setara dengan 97%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Pembinaan Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota.

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian indikator kinerja Program Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Cakupan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan target pada tahun 2023 sebesar 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.163.432.801.531,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.161.604.379.626,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.160.806.107.514,- atau setara dengan 100% dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan. Alokasi anggaran sebesar Rp.157.212.646.300,dengan realisasi anggaran Rp.157.212.646.300,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Terealisasi Penyaluran Bantuan Keuangan.
- 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Alokasi anggaran sebesar Rp.1.230.779.962,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.105.880.000,- atau setara dengan 90%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
- 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.3.160.953.364,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.487.581.214,- atau setara dengan 79%.Output kegiatan ini adalah Tersedianya Dana Bagi Hasil Pajak.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Capaian indikator kinerja Program Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan yaitu cakupan Dokumen Rencana Anggaran Daerah dengan target pada tahun 2023 sebesar 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.680.550.999,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.847.050.999,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.803.903.976,- atau setara dengan 95%.

Kegiatan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga. Alokasi anggaran sebesar Rp.70.607.000,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.70.607.000,- atau 100%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga yang di Buat.
- 2. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp.44.054.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.44.054.500,atau setara dengan 100%. Output adalah Jumlah Daftar Kebutuhan Barang dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang.
- 3. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp.71.544.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.70.704.000,- atau setara dengan 99%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang di hasilkan dari penatausahaan barang milik daerah.
- 4. Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Alokasi anggaran Rp.252.349.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.227.036.127,- atau setara dengan 90%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Labelisasi.
- 5. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp.135.393.249,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.134.116.849,- atau setara dengan 99%. Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen yang dihasilkan dari penilaian barang milik daerah.
- 6. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp.31.450.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.29.950.000,- atau setara dengan 95%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penghapusan / Pelelangan Aset.
- 7. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp.241.652.950,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.227.435.500,- atau setara dengan 94%.Output kegiatan ini adalah jumlah penyusunan laporan BMD yang dihasilkan.

2. Badan Pendapatan Daerah

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan pemerintahan Penunjang Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut: Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan realisasi 4,67% dari target yang ditetapkan selama 1 tahun;

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 100% dari target pada tahun 2023 sebesar 93,35%. Alokasi anggaran program ini pada APBD sebesar Rp.554.765.075,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.512.918.540,- atau setara dengan 92,46%.

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.341.960.675,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.301.222.740,- atau setara dengan 88.09%. Output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen PBB dan BPHTB.
- 2. Sub Kegiatan Pendapatan dan Pendaftaran Obyek pajak Daerah, dengan alokasi anggaran Rp.212.804.400,- dengan realisasi sebesar Rp.211.695.800,- atau 99,48%. Output kegiatan ini adalah tersedianya data objek dan subjek PBB-P2 yang akurat.

5. BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan kepegawaian tahun 2023 adalah indeks profesionalitas ASN yang ditargetkan pada kategori 61-70, untuk capaian tahun 2023 memakai capaian indeks profesionalitas ASN tahun 2022 yaitu 48,21 dengan kategori Sangat Rendah dikarenakan data indeks profesionalitas ASN belum bisa diakses (aplikasi masih dalam perbaikan/perbaharui). Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Program Kepegawaian Daerah

- Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Bagi Calon PNS Daerah
 - Capaian indikator kinerja Program Kepegawaian Daerah pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Bagi Calon PNS Daerah yaitu cakupan pembinaan dan pengembangan aparatur dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.230.000.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.743.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.697.298.877,- atau setara dengan 94% dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN. Alokasi Anggaran Rp.566.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.522.620.877,- atau setara dengan 92%. Output kegiatan ini adalah dok. pengadaan, pemberhentian & informasi kepegawaian.
 - 2. Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN. Alokasi Anggaran Rp.97.000.000,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.94.678.000,- atau setara dengan 98%. Output kegiatan ini adalah Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi.
 - Sistem Informasi Kepegawaian. Pengelolaan Alokasi Anggaran Rp.80.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.80.000.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian.

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Capaian indikator kinerja Program Kepegawaian Daerah pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yaitu cakupan pembinaan dan pengembangan aparatur dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.250.000.000,- dan pada APBDP menjadi Rp.250.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.244.686.506,- atau setara dengan 98% dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN. Alokasi Anggaran Rp.250.000.000,- dengan realisasi Rp.244.686.506,- atau 98%. Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN.

Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Capaian indikator kinerja Program Kepegawaian Daerah pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yaitu cakupan Kegiatan Kompetensi dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.1.529.164.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.1.909.664.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.863.671.124,- atau setara dengan 98 % dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat. Alokasi Anggaran Rp.1.909.664.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.863.671.124,- atau setara dengan 98%. Output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat.

Permasalahan dan Solusi Urusan Kepegawaian

i.Permasalahan

Anggaran kegiatan - kegiatan untuk peningkatan profesionalitas ASN seperti pemberian bantuan tugas belajar, diklat/bimtek dan seminar serta uji kompetensi dll sangat kurang sehingga indeks profesionalitas ASN untuk di Kabupaten Banggai Kepulauan sangat rendah.

ii.Solusi

Koordinasi, kerjasama serta perhatian dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mengenai kegiatan-kegiatan untuk peningkatan profesionalitas ASN perlu lebih di tingkatkan.

6. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Capaian indikator kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan cakupan pengembangan penelitian dan pengembangan sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD sebesar Rp.1.134.154.000,- dengan realisasi Rp.948.932.557,- atau setara 83,67%.

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan:

- 1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa, dengan alokasi anggaran Rp.100.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- atausetara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- 2. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan alokasi anggaran Rp.120.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.120.000.000,setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Capaian indikator kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yaitu Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD Rp.420.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.406.817.362,- atau setara dengan 96,9% dan dilaksanakan melalui Sub Penelitian dan Pengembangan Pariwisata, dengan alokasi anggaran Rp.420.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.406.817.362,00,- atau setara dengan 96,9%. Output kegiatan ini adalah Tercapainya Jumlah kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Capaian indikator kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yaitu Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD Rp.554.154.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.542.115.195,- atau setara dengan 97,8% dan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :

- 1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, dengan alokasi anggaran Rp.100.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- atau 100%. Output kegiatan ini adalah Tercapainya Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif.
- 2. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif dengan alokasi anggaran Rp.454.154.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.442.115.195,- atau setara dengan 97,35%. Output kegiatan ini adalah Tercapainya Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif.

7. BIDANG URUSAN INSPEKTORAT

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaran urusan pemerintahan fungsi penunjang Pengawasan untuk Inspektorat Tahun 2023 adalah sebagai berikut: Cakupan LHP yang dihasilkan dan penyelesaian TLHP BPK dan APIP berjumlah 10 Dokumen dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sejumlah 10 Dokumen; Cakupan Dokumen keuangan yang dievaluasi berjumlah 41 dokumen dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sejumlah dokumen; Cakupan LHP yang dihasilkan berjumlah 16 laporan dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 yakni 16 Dokumen; Indikator tersebut dicapai melalui program- program berikut:

1. Inspektorat

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan adalah terlaksananya pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan, alokasi anggaran program ini pada murni sebesar Rp.2.283.835.000,pada APBD dan perubahan menjadi Rp.3.141.251.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.3.140.639.990,- atau setara dengan 99,98 %.

- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan Alokasi Anggaran Rp.423.196.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.423.196.000,- atau 100%. Output Jumlah LHP yang dihasilkan.
- 2. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan alokasi Anggaran Rp.891.953.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.891.499.680,- atau setara dengan 99,95%. Output Jumlah Dokumen yang dievaluasi
- 3. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja dengan alokasi anggaran Rp.284.255.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.284.255.000,- atau setara dengan 100%. Output Jumlah Dokumen yang direviu.
- 4. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dengan alokasi anggaran Rp.108.357.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.108.344.000,- atau setara dengan 99,99%. Output Jumlah LHP yang dihasilkan.
- 5. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan APIP dengan alokasi anggaran Rp.578.230.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.578.229.310,- atau setara dengan 99,99%. Output Jumlah LHP yang dihasilkan. Jumlah LHP yang dihasilkan.

- Kegiatan Penyelenggaraan dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pengawasan dengan tujuan tertentu dengan Alokasi Anggaran Rp.855.260.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.855.116.000,- atau 99,98%.Output Jumlah LHP yang dihasilkan.

Permasalahan dan Solusi Urusan Pengawasan

a. Permasalahan

Dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan, Adapun permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

- 1. Dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan, kalau ditinjau dari segi Kuantitas sudah terpenuhi namun permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompetensi pendidikan pada bidang Pengawasan yang sesuai dengan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP)
- 2. Anggaran Pengawasan yang belum memadai

b. Solusi

- 1. Menyediakan Anggaran yang memadai untuk Diklat Pengembangan Kompetensi bagi dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) minimal 2 Kali dalam satu tahun
- 2. Diperlukan Komitmen dan Dukungan Kepala Daerah dalam memberikan anggaran yang memadai untuk kegiatan pengawasan serta mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: B/248/KSP.00/70-72/01/2023 Perihal: Penguatan Sumber Daya Manuasia (SDM) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Daerah.

8. BIDANG URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KECAMATAN)

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2023 adalah presentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai penugasan Kepala Daerah dari target yang ditetapkan pada tahun 2023. Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Kecamatan Tinangkung Utara

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian indikator kinerja Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 100% Alokasi anggaran program ini pada APBD murni Rp.1.813.126.425,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.1.932.587.213,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.867.147.299,- atau mencapai 96,61 %

- Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian 100% Alokasi anggaran program ini pada APBD murni Rp.5.000.000,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.5.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- atau mencapai 100%.
- Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian 97,37% Alokasi anggaran program ini pada APBD murni Rp.1.488.916.000,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.1.520.476.788,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.479.500.047,- atau mencapai 97,37%.

- Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian 97,31% Alokasi anggaran program ini pada APBD murni Rp.1.488.916.000,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.1.520.476.788,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.479.500.047,-atau mencapai 97,31 %.
- Sub Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian 98,99% Alokasi anggaran program ini pada APBD murni Rp.223.217.500,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.250.617.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.248.097.500,- atau mencapai 98,99 %.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian 86,88% Alokasi anggaran program ini pada APBD murni Rp.(-),- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.10.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.688.027,- atau mencapai 86,88%.

b. Program Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Sub Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan capaian 100% Alokasi anggaran program ini pada APBD murni Rp.8.000.000,- dan pada APBD Rp.18.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Perubahan menjadi Rp.18.000.000,- atau mencapai 100%.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepada Daerah dengan capaian 100% Alokasi anggaran program ini pada APBD murni Rp.20.000.000,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.20.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,- atau mencapai 100%.

2. Kecamatan Buko

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Capaian indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yaitu cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.33.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.33.200.000,- atau setara dengan 100 % dan dilaksanakan melalui Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Alokasi Anggaran Rp.33.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.33.200.000,- atau setara dengan 100 %. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang direncanakan.

b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yaitu cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan capaian 100 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100 %. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.0,dan pada APBD perubahan menjadi Rp.30.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,- atau setara dengan 100 %.

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dilaksanakan melalui 2 (Dua) Sub kegiatan antara lain:

- 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alokasi Anggaran Rp.10.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- atau setara dengan 100 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional. Alokasi Anggaran Rp.20.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,- atau setara dengan 100 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu cakupan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan capaian 100 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100 %. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.0,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.000.000,- atau setara dengan 100%

3. Kecamatan Bulagi Selatan

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan/Desa yaitu cakupan Kegiatan Pemberdayaan Keluarahan/desa dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.31.590.000,dan pada APBD perubahan menjadi Rp.29.290.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.29.290.000,- atau setara dengan 100%

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Alokasi Anggaran Rp.29.290.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.29.290.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Peresentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yaitu Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.0,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.1.030.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.029.400.000,- atau setara dengan 99,94%.

- 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Alokasi Anggaran Rp.10.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan HUT RI.
- 2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dengan Alokasi Anggaran Rp.1.020.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.019.400.000,- atau setara dengan 99,94%.. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan MTQ.

4. Kecamatan Bulagi Utara

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yaitu cakupan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan capaian 100% dari Target yang ditetapkan pada Tahun 2022 yaitu 100%. Alokasi Anggaran pada APBD Murni sebesar Rp.12.498.000,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.12.498.000,- dengan realisasi Rp.12.498.000,- atau setara dengan 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa APBD Murni sebesar Rp.12.498.000,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.12.498.000,- dengan realisasi Rp.12.498.000,- atau setara dengan 100%.

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Capaian Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yaitu cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan capaian 99.49% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 yaitu 100%. Alokasi Anggaran pada APBD Murni sebesar Rp.211.800.000,- dan pada APBD Perubahan menjadi RP.411.800.000,-atau setara dengan 99.49%

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:

- 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Alokasi Anggaran Rp.211.800.000,- dengan realisasi Rp.211.530.000,- atau setara dengan 99.87%.
- 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Alokasi Anggaran Rp.200.000.000,dengan realisasi Rp.198.200.000,- atau setara dengan 99.10%.

b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 100%. Alokasi Anggaran pada APBD Murni sebesar Rp.22.555.000,dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.42.555.000,- dengan realisasi Rp.42.555.000,atau setara dengan 100%

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:

- 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Alokasi Anggaran Rp.12.545.000,- dengan realisasi Rp.12.545.000,- atau setara dengan 100%
- 2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional Alokasi APBD Murni sebesar Rp.10.010.000,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.30.010.000,- dengan realisasi Rp.30.010.000,- atau setara 100%.

c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Indikator Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu cakupan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan capaian 100% dari Target yang ditetapkan pada Tahun 2022 yaitu 100%. Alokasi Anggaran pada APBD Murni sebesar Rp.0,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.5.000.000,- dengan realisasi Rp.5.000.000,- atau setara dengan 100%.

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan **Pemerintahan Desa**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa Alokasi APBD Murni sebesar Rp.0,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.5.000.000,- dengan realisasi Rp.5.000.000,- atau setara dengan 100%.

d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu cakupan Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Publik dengan capaian 99.50% dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 100%. Alokasi Anggaran pada APBD Murni sebesar Rp.100.000.000,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.100.000.000,- dengan realisasi Rp.99.500.000,- atau setara dengan 99.50%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemerintahan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta Alokasi APBD Murni sebesar Rp.100.000.000,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.100.000.000,- dengan realisasi Rp.99.500.000,- atau setara dengan 99.50%.

5. Kecamatan Liang

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Capaian indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yaitu cakupan Kegiatan Pemberdayaan Keluarahan/desa dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.15.250.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.0,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.250.000,- atau setara dengan 100%

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, Alokasi Anggaran Rp.15.250.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.250.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Kegiatan yg direncanakan.

b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yaitu cakupan Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.0,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.35.368.000,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.35.368.000,- atau setara dengan 100%

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Alokasi Anggaran Rp.15.368.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.368.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Kegiatan yg direncanakan.
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dengan Alokasi Anggaran Rp.20.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.000.00,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Kegiatan yg direncanakan.

6. Kecamatan Peling Tengah

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Capaian indikator Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yaitu cakupan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan dengan capaian 100% dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.10.289.700,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.10.289.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.289.700,- atau setara dengan 100%.

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Alokasi Anggaran Rp.10.289.700,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.10.289.700,- atau setara dengan 100%. Output Kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan yang di Rencanakan

b. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum

Capaian indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan capaian 100% dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.0,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.20.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,atau setara dengan 100%.

Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional. Alokasi Anggaran Rp.20.000.000,dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.20.000.000,- atau setara dengan 100%. Output Kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan yang di Rencanakan

7. Kecamatan Tinangkung

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Capaian indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, yaitu cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan. Alokasi anggaran program ini sebesar Rp.412.309.505,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.411.259.505,- atau setara dengan 99,7%.

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Alokasi Anggaran Rp.12.310.000, dengan realisasi sebesar Rp.11.560.000,- atau setara dengan 93,9%.

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan:

- 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Alokasi Anggaran Rp.150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.150.000.000,- atau setara 100%.
- 2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Alokasi anggaran Rp.249.999.505,dengan realisasi sebesar Rp.249.699.505,- atau setara dengan 99,9%.

b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah, yaitu cakupan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan. Alokasi anggaran program ini sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi anggaransebesar Rp.20.000.000,- atau setara dengan 100%.

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku, dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional. Alokasi Anggaran Rp.20.000.000,- dengan realisasi sebesar sebesar Rp.20.000.000,- atau setara 100%...

8. Kecamatan Totikum

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Capaian indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yaitu cakupan Kegiatan Pemberdayaan Keluarahan/desa dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.12.100.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.28.100.000,- dengan realisasi anggaransebesar Rp.28.100.000,- atau setara dengan 100%

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:

- 1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.12.100.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.20.100.000,- dengan realisasi anggaransebesar Rp.20.100.000,- atau setara dengan 100%
- 2. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.0,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.8.000.000,- dengan realisasi anggaransebesar Rp.8.000.000,- atau setara dengan 100%

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.0,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.34.995.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.34.995.000,atau setara dengan 100%

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan

- 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.0,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.15.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- atau setara dengan 100%
- 2. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar suku dan intrasuku umat beragama, Ras dan Golongan lainnya. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.0,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.19.995.000,- dengan realisasi anggaransebesar Rp.19.995.000,- atau setara dengan 100%.

d. Program Pembinanan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian indikator kinerja Program Pembinanan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.0,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.5.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,atau setara dengan 100%

9. Kecamatan Totikum Selatan

a. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Desa Pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan capaian 100% Alokasi anggaran program ini pada APBD murni Rp.(0) dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.5.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- atau mencapai 100%

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawsan Pemerintahan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa. Alokasi Anggaran Rp.5.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Yang direncanakan.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Capaian indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yaitu cakupan Kegiatan Pemberdayaan Keluarahan/desa dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran program ini Rp.20.800.000,- dengan realisasi anggaransebesar Rp.20.800.000,- atau setara dengan 100%

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Alokasi Anggaran Rp.20.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.800.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Terpenuhinya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanggunan Desa yang direncanakan.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yaitu cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran program ini Rp.40.600.000,- dengan realisasi anggaransebesar Rp.15.400.000,- atau setara dengan 37,10%

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:

- 1. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia alokasi Anggaran Rp.20.600.000,- dengan realisasi Rp.6.400.000,- atau setara dengan 31,06%.
- 2. Sub Kegiatan Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kecamatan Lokal, Regional dan Nasional. Alokasi Anggaran di APBD Murni Rp.(0) dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.20.000.000,- dengan realisasi Rp.9.000.000,- atau 45,00%

10. Kecamatan Tinangkung Selatan

Pencapaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk urusan Administrasi Pemerintahan Kecamatan Tinangkung Selatan Tahun 2023 adalah presentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai penugasan Kepala Daerah dari target yang ditetapkan pada tahun 2023. Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dengan capaian 100% Alokasi anggaran program ini pada APBD murni Rp.8.900.000,- dan pada APBDP menjadi Rp.8.900.000 dengan realisasi anggaran Rp.8.900.000,- atau mencapai 100%.

b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Desa dengan capaian 100% Alokasi anggaran program ini pada APBD murni Rp.(0) dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.35.600.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.35.600.000,atau mencapai 100%

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Alokasi anggaran program ini pada APBD murni Rp.(0) dan pada APBD Rp.35.000.000 Perubahan menjadi dengan realisasi anggaran Rp.35.600.000,- atau mencapai 100%.

11. Kecamatan Bulagi

a. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Capaian indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan/Desa yaitu cakupan Kegiatan Pemberdayaan Keluarahan/desa dengan capaian 99.92 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.220.000.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.455.000.000,- dengan realisasi anggaransebesar Rp.454.618.000,- atau setara dengan 99.92%

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan. Alokasi Anggaran Rp.55.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.55.000.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Kecamatan.

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan/Desa

Capaian indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yaitu cakupan Kegiatan Pemberdayaan Keluarahan/desa dengan capaian 99.92% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.220.000.000,- dan pada APBD perubahan tetap menjadi Rp.455.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.454.618.000,- atau setara dengan 97,84% dan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan. Alokasi Anggaran Rp.454.618.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.454.618.000,- atau setara dengan 99.92 %. Output kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.25.000.000,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.72.020.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,- setara dengan 100%.

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI. Alokasi Anggaran Rp.20.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan HUT RI di Kecamatan.

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional. Alokasi Anggaran Rp.20.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,- atau setara dengan 100 %. Output Kegiatan ini adalah Terlaksannya Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Capaian indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, pada Kegiatan Fasiitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi anggaran program ini pada APBD murni sebesar Rp.0,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp.5.000.000,- dengan realisasi anggaransebesar Rp.5.000.000,- atau setara dengan 100%.

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa. Alokasi Anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.5.000.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Asistensi APBDes Desa yang ada di wilayah Kecamatan Bulagi.

12. Kecamatan Buko Selatan

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Capaian Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yaitu cakupan Kegiatan Koordinasi Kegaiatan Pemberdayaan Desa dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi Anggaran pada APBD Murni sebesar Rp.7.500.000,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.20.000.000,- dengan realisasi Rp.20.000.000,- atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Alokasi Anggaran Sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi Anggaran Rp.20.000.000,- atau setara dengan 100%. Output Kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Kantor yang direncanakan.

b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yaitu cakupan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugsan Kepala Daerah dengan capaian 100% dari Target yang ditetapkan pada Tahun 2023 yaitu 100%. Alokasi Anggaran pada APBD Murni sebesar Rp.0,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.30.000.000,- dengan realisasi Rp.30.000.000,- atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:

- 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alokasi Anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dengan realisasi Rp.10.000.000,- atau 100%. Output Kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Kantor yang direncanakan
- 2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal dan Nasional. Alokasi Anggaran Sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi Rp.20.000.000,- atau setara dengan 100%. Output Kegiatan Ini adalah Jumlah Kegiatan Kantor yang direncanakan.

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Dalam rangka memecahkan masalah yang terjadi perlu ditetapkan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan. Beberapa kebijakan yang diambil selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.2 Kebijakan strategis Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

						Tujuan/ Masalah Yang
No	Kebijakan Strategis		Dasar Hu	ıkum		Diselesaikan
	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	tentang Pendapatar Tahun Angg	Nomor Perubah dan garan 202	4 Tahu an A Belanja 3	n 2023 Inggaran Daerah	pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran
	Pengalokasian dan Pembagian, Tata Cara Pengalokasian Serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2023		Tahun ian dan lokasian l	2023 Pembagi Serta Pei	tentang an, Tata nyaluran 23	Mengatur alokasi Dana Desa yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
	Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Daerah	Nomor 7 Perubahan	Tahun Kedua omor 23 enerapan Huk Seb n dan	2023 Atas Post Atas Atas P	tentang eraturan n 2020 in Dan Protokol Upaya endalian	
	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	Peraturan I Nomor 9 Perubahan Bupati No tentang Pendapatar Tahun 2023	Tahun Kedua omor 36 Penjaban dan	2023 atas P Tahur an A	tentang eraturan	pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran
	Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nomor 12 Pendelegas: Penandatar Perizinan F	. Tahun ian Igan Per Kepada D	2023 Kew izinan d inas per	tentang enangan lan Non nanaman	Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	Nomor 25 Perubahan Bupati No tentang Pendapatar Tahun Angg	Tahun Ketiga omor 36 Penjaban Dan garan 202	2023 Atas Po Tahun Tan A Belanja	tentang eraturan n 2022 anggaran Daerah	Upaya Meningkatkan Kesejahteraan dan Pelayanan Masyarakat
	Daerah Kabupaten Banggai	Nomor 26 Perubahan Nomor 16 Rencana K	Tahun Atas P Tahun erja Pen	2023 eraturan 2022 nerintah	tentang Bupati tentang Daerah	
	Implementasi Transaksi Non Tunai		Tahun	2023	tentang Tunai	mewujudkan penerimaan dan pembayaran yang tepat jumlah, cepat, aman, efesien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya perilaku koruptif dalam pengelolaan keuangan daerah

	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Mengatur penerimaan dan Nomor 41 Tahun 2023 tentang pengeluaran yang dilaksanakan Perubahan atas Peraturan Bupati Oleh pemerintah daerah selama Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
		Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
10.	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Tematik	Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Mensinkronkan dan Nomor 48 Tahun 2023 tentang mengintegrasikan setiap inputan Sistem Perencanaan Pembangunan Baerah Berbasis Tematik perencanaan pembangunan Daerah Bappeda Litbang sehingga membantu dalam menghasilkan pengambilan kebijakan yang lebih

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022

Berikut penjelasan atas tindak lanjut keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022

No		Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1.	Badan Pendapatan Daerah	Merekomendasikan kepada Bupati Banggai Kepulauan, untuk melakukan upaya nyata demi meningkatkan PAD khususnya sumber PAD pada sektor Pajak Daerah dan Restibusi Daerah. Sebab target PAD untuk dua sektor ini di tahun 2022 tidak dapat dipenuhi. Adapun realisasinya untuk Pajak Daerah hanya sebesar 95,17%, atau secara nominal sebesar Rp.6.291.389.688 dari total target sebesar Rp.6.611.000.000. Dan untuk retribusi daerah presentasenya hanya sebesar 56,10 % atau nilai nominal sebesar Rp.18.590.072.806 dari target sebesar Rp.19.387.000.000	Pendapatan Daerah dengan Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan penyempurnaan Zona Nilai Tanah serta penyesuaian NJOP dan meningkatkan Tarif layanan Retribusi daerah dengan mempertimbangakan Kemampuan Bayar Masyarakat serta biaya pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas	Realisasi pendapatan disektor Pajak Daerah dari Rp.6.291.389.688 dengan capaian 95,17% dari target sebesar Rp.6.611.000.000. di Tahun 2022 menjadi Rp.6.627.551.143 atau 104,39% dari Target Rp.6.348.922.837 di Tahun 2023 dan Realisasi pendapatan disektor Retribusi Daerah dari Rp.18.590.072.806 dengan capaian 56,10% dari target sebesar Rp.19.387.000.000 di Tahun 2022 menjadi Rp.13.827.629.320

				n 1. ~ ·
2.	Bagian	Merekomendasikan kepada Bupati Banggai Kepulauan,	Bupati Banggai Kepulauan melalui	Perangkat Daerah dengan serapan
	Administrasi	agar melakukan evaluasi	Bagian Administrasi	_
	Pembangunan	terhadap kinerja OPD yang	Pembangunan	pada Tahun 2022
		tercatat sangat minim terhadap penyerapan	Sekretariat Daerah Kab, Banggai Kepulauan	O
		anggaran di tahun 2022.	telah rutin	
		Dalam catatan Pansus,	melaksanakan Rapat	
		terdapat sejumlah OPD	Evaluasi Serapan	
		dengan penyerapan anggaran yang sangat	Anggaran setiap bulan untuk mengetahui	
		rendah. Beberapa OPD yang	progres di tiap	
		rendah dalam penyerapan	Perangkat Daerah yang	
		anggaran diantaranya : - Dinas Pariwisata dengan	tercatat Minim.	
		penyerapan anggaran		
		sebesar 34,73 persen		
		- Dinas Pertanian dengan penyerapan anggaran		
		sebesar 81,68 persen		
		- Dinas Pendidikan dan		
		Kebudayaan dengan penyerapan anggaran		
		sebesar 82,09 persen		
		- Sekretariat DPRD dengan		
		penyerapan anggaran sebesar 83,25 persen		
		- Dinas Pekerjaan Umum dan		
		Tata Ruang dengan		
		penyerapan anggaran		
		sebesar Rp.84,77 persen		
3	Bagian Organisasi	Merekomendasikan kepada	1.Perampingan Struktur	
		Bupati Banggai Kepulauan, untuk segera melakukan	Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan	Bagian Organisasi
		perampingan struktur		Evaluasi Perangkat
		organisasi perangkat daerah	perhitungan Pemetaan	Daerah yakni dengan
		di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai	urusan pemerintahan tidak memenuhi syarat	melakukan Pemetaan Perangkat Daerah
		Kepulauan. Dimana hal itu	NIlai Variabel Umum	
		dimaksudkan agar		dari segi
		konsentrasi pelaksanaan program kerja pemerintah	Variabel Teknis (80%), maka Urusan	penganggaran yang tidak terakomodir
		daerah dapat di fokuskan	Pemerintahann tersebut	
		serta tujuan lainnya agar		sehingganya Evaluasi
		terjadi efesiensi penggunaan anggaran di tengah		Perangkat Daerah dilaksanakan pada
		rendahnya kemampuan		tahun 2024.
		keuangan daerah.	kriteria :	Hal hal yang perlu
			a. Kedekatan Fungsi urusanpemerintahan	dipertimbangkan dalam pelaksanaan
				Evaluasi Perangkat
			penyelenggara	Daerah ;
			fungsi urusanpemerintahan	 Melakukan Pemetaaan
			ui usanpemennitanan	Perangkat Daerah
			2.Dalam hal Kemampuan	dari Urusan
			Keuangan Daerah atau	
			Ketersediaan Aparatur Sipil Negara yang	, ,
			dimiliki oleh Daerah	Wajib dan Urusan
			masih terbatas,maka	
			Tipelogi Perangkat Daerah dapat di	
			turunkan dari hasil	sebagaimana telah
			Pemetaan dengan	

			penetapan Tipelogi	72 Tahun 2019
			sebagai berikut: a. Total Score lebih dari 800 merupakan2 intensitas Besar dan diwadahi Perangkat Daerah Tipe A; b. Total Score dari 601 s/d 800 merupakan intensitas Sedang dan diwadahi Perangkat Daerah Tipe B; c. Total Score dari 401 s/d 600 merupakan intensitas Kecil dan diwadahi Perangkat Daerah Tipe C; d. Total Score lebih dari 300 s/d 400 merupakan intensitas sangat Kecil dan diwadahi Perangkat Daerah Setingkat Bidang; dan e. Total Score kurang dari atau sama dengan 300 merupakan intensitas sangat Kecil dan diwadahi Perangkat Daerah setingkat Bidang; dan e. Total Score kurang dari atau sama dengan 300 merupakan intensitas sangat Kecil dan diwadahi Perangkat Daerah setingkat Seksi / Sub Bidang.	tentang Perangkat Daerah. Pemetaan Perangkat Daerah terdiri atas: a. Variabel Umum 20 % dan b. Variabel Teknis 80 %
4	Dinas PUPR	- Merekomendasikan kepada Bupati Banggai Kepulauan, untuk memprioritaskan pembangunan sarana air bersih di Kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan dan Bulagi Utara tanpa meninggalkan kebutuhan air bersih di wilayah lainnya di Kabupaten Banggai Kepulauan	pembangunan sarana- air bersih di Kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan dan Bulagi Utara di usulkan ditangani oleh Kementerian PUPR melalui BWS dan BPPW	Rencana Kegiatan SPAM IKK Bulagi, Bulagi Utara dan Bulagi Selatan menggunakan nilai Anggaran yang sangat besar sehingga di usulkan ditangani oleh Kementerian PUPR melalui BWS dan BPPW dengan usulan Tekhnis sudah disampaikan dan lengkap hanya keadaan lahan yang masih dalam keadaan proses pengurusan Diluar Tiga Wilayah yang menjadi Prioritas, telah dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu Kec. Tinangkung Utara, Totikum, Liang, Tinangkung Selatan dan Bulagi Utara.

			L	<u> </u>
		Banggai Kepulauan untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di titik ruas jalan yang kondisinya masih memprihatinkan	o ,	16,65 Kilometer dan Melalui DAK dengan panjang jalan 14,08 Kilometer
5	Dinas Dikbud	Merekomendasikan kepada Bupati Banggai Kepulauan, untuk melakukan pembangunan atau rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana Pendidikan di semua tingkatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah baik pada tingkatan PAUD, SD dan SMP di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melakukan upaya guna menciptakan pemerataan tenaga pengajar di semua tingkatan jenjang Pendidikan baik PAUD, SD dan SMP di seluruh wilayah Kabupaten	 Telah ditindaklanjuti Pembangunan dan Rehabilitasi Fisik sejumlah 7 dari 172 pada Satuan Pendidikan PAUD Telah ditindaklanjuti Pembangunan 112 Paket, Rehabilitasi 84 Paket dan Pengadaan Mobiler sejumlah paket pada Satuan Pendidikan SD dan SMP. Pemerataan Tenaga Guru telah terakomodir melalui Perekrutan PPPK Tenaga Guru Tahun 2023 sejumlah 410 Tenaga Guru yang tersebar di 12 Kecamatan 	beberapa point sesuai dengan yang tertuang dalam rekomendasi.
6	Dinas Kesehatan	Banggai Kepulauan. - Merekomendasikan kepada Bupati Banggai Kepulauan untuk melakukan pembangunan dan perbaikan terhadap fasilitas Kesehatan baik pada fasilitas Kesehatan seperti Pustu, Polindes, Poskesdes, Puskesmas dan Rumah Sakit di seluruh	- Untuk fasilitas Kesehatan seperti Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit di seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.2023 sudah ditindak lanjuti akan tetapi belum keseluruhan	Telah di tindaklanjuti Tahun 2023 melalui Dana Alokasi Umum dan 2024 melalui Dana Alokasi Khusus

		wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. - Merekomendasikan kepada bupati Banggai Kepulauan untuk menata Kembali sistem pengadaan obat dan alat Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Trikora Salakan, dengan tujuan untuk memastikan ketersedian obat-obatan serta alat Kesehatan demi menunjang pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat.	dan di tahun 2024 akan di tindak lanjuti melalui DAK - untuk kebutuhan obat – obatan pada tahun 2023 pengadaan dilaksanakan melalui E-Catalog dan unutk keperluan tersebut sudah terpenuhi.	
		- Merekomendasikan kepada Bupati Banggai Kepulauan untuk melakukan upaya pemerataan penyebaran tenaga medis di seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan guna mendorong maksimalnya pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat di semua pusat-pusat Pelayanan Masyarakat Desa	- Untuk pemenuhan tenaga medis tahun 2023 pemenuhan dan pemerataan di tunjang dengan penganggaran dana daerah dau dokter umum maupun dokter gigi termasuk tenaga kesehatan lainnya	
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Merekomendasikan kepada Bupati Banggai Kepulauan untuk melakukan pembangunan dan perbaikan terhadap fasilitas Kesehatan baik pada fasilitas Kesehatan seperti Pustu, Polindes, Poskesdes, Puskesmas dan Rumah Sakit di seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.	Perbaikan faskes yg menjadi kewenagan Desa adalah Polindes dan poskesdes sudah di lakukan pembangunan dan rehabilitasi disertai dengan pengadaan peralatan kesehatan dan obat - obatan bahkan 2024 hal tersebut kembali di maksimalkan karena polindes dan poskesdes menjadi ujung tombak dalam penanganan stunting skala desa yang menjadi e-marking penggunaan Dana Desa tahun 2024.	Telah di tindaklanjuti Tahun 2023 dan 2024

Bab 4

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, dan Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yangmenjadi kewenangan Daerah Provinsi. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota Pemerintah Kabupaten Indramayu Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Secara umum landasan hukum pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yaitu:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

4.1.1 Tugas Pembantuan yang diterima

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun 2023 tidak ada atau tidak terlaksana karena tidak ada Anggaran Tugas Pembantuan yang diberikan baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, sehingga realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan untuk Tahun 2023 tidak ada.

Bab 5

Penutup

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai Kepulauan Tahun disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (good clear governance). Secara governance dan prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tetap dapat berjalan secara keberhasilan ini merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan dari seluruh komponen pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh perubahan kebijakan yang mendasar. Berbagai permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2023 diraih berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen pemerintahan daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) Kabupaten Banggai Kepulauan, jajaran Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Banggai Kepulauan dan seluruh elemen masyarakat. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan masukan, saran dan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2023, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua untuk mewujudkan "Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Yang Maju, Mandiri, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera". Amiiin.

> Salakan, Juni 2024 Pj. Bupati Banggai Kepulauan

IHSAN BASIR, SH.,LL.M